

343.04

PRA

p e l

**PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS PENYERAHAN JASA TELEKOMUNIKASI PADA
PT. TELKOM DIVRE IV JATENG DAN DIY**



TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

TATYA HERLANA PRAMUDITA
B4A 097 066

Dibawah Bimbingan :

Dr. Moempoeni Martojo, SH

Prof. Dr. Miyasto, SU

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
2001**

UPT-PUSTAK-UNDIP

**PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS PENYERAHAN JASA TELEKOMUNIKASI PADA
PT. TELKOM DIVRE IV JATENG DAN DIY**

Disusun oleh :

TATYA HERLANA PRAMUDITA, SH
B4A 097 066

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 4 Oktober 2001

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui Pembimbing :

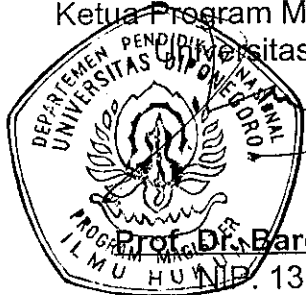


Dr. Moempoeni Martojo, SH
NIP 130 324 140



Prof. Dr. Miyasto, SU
NIP. 130 516 585

Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Barda Nawawi, SH
NIP. 130 350 519

Kupersembahkan untuk Bapak yang telah tiada,

Toeloes Koesoemaboedaja

dan

Ibu, Koentjarawati

KATA PENGANTAR

Setelah sekian lama berselang, pada akhirnya selesai sudah penyusunan Tesis dengan judul PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA TELEKOMUNIKASI PADA PT. TELKOM DIVRE IV JATENG DAN DIY.

Banyak sekali kesulitan yang dihadapi penulis untuk menyelesaikan Tesis ini, antara lain adalah begitu banyaknya sumber data yang harus diperoleh, diolah, disajikan dan dianalisis. Walaupun demikian, banyak pihak yang telah membantu penulis dalam hal memberikan data, dokumen dan sumber informasi baik lisan maupun tertulis. Dalam hal ini juga termasuk di dalamnya, masukan-masukan yang didapatkan dari tahapan-tahapan pengujian seperti *review* proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian akhir.

Oleh karenanya, peneliti melalui kata pengantar ini ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. Miyasto, SU dan Ibu DR. Moempoeni Martojo, SH yang telah berkenan untuk menjadi pembimbing dalam penulisan Tesis ini.
2. Seluruh staf pengajar pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNDIP Semarang, yang telah membantu penulis memperoleh ilmu yang lebih luas dan dalam.

3. Semua pihak yang telah bersedia memberikan data yang diperlukan untuk menyusun Tesis ini, khususnya PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY.
4. Rekan-rekan mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Teknologi, yang selama ini telah banyak membantu terselesaikannya Tesis.
5. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam hal perolehan data.

Ucapan terima kasih secara khusus juga patut peneliti sampaikan kepada orang tua peneliti yaitu : Bapak yang telah tiada Toeloes Koesoemaboedaja dan Ibu Koentjarawati, yang telah membiayai dan memberikan kesempatan untuk mengikuti Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNDIP.

Peneliti menyadari bahwa Tesis ini tentu memiliki banyak kekurangan. Untuk itu segala masukan dan kritikan akan peneliti terima dengan senang hati. Pada akhirnya peneliti berharap Tesis ini akan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum (khususnya ilmu hukum pajak) maupun secara praktis.

Semarang, Oktober 2001

Peneliti

ABSTRAK

PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY melakukan penyerahan Jasa Telekomunikasi kepada konsumen akhir yang merupakan Objek Pajak berdasarkan UU PPN 1984. UU PPN 1984 yang dimaksud adalah sebagaimana telah diubah oleh UU No. 11 Tahun 1994 dan UU No. 18 Tahun 2000. Pengenaan yang dimaksud adalah pemberlakuan ketentuan UU PPN 1984 diatas terhadap Objek PPN yang diantaranya adalah penyerahan Jasa Telekomunikasi yang merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak (Pasal 1 angka 7 dan Pasal 4 huruf c). Boleh tidaknya Penyelenggara Wartel A dan B memungut PPN atas penyerahan Jasa Telekomunikasi dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN, merupakan permasalahan pertama. Untuk permasalahan kedua, perbedaan antara Saat Terutang Pajak bagi penyerahan Jasa Telekomunikasi berupa Sambungan Telepon Lokal, SLJJ, SLI dan Internet (CJY.net) untuk penyerahan secara langsung dengan penyerahan tidak langsung kepada konsumen akhir. Keduanya merupakan permasalahan dalam Tesis ini yang berjudul : PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA TELEKOMUNIKASI PADA PT. TELKOM DIVRE IV JATENG DAN DIY.

Gabungan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan perolehan data melalui studi kepustakaan, wawancara serta *questionnaire* merupakan metode pemecahan permasalahan studi kasus ini. Analisis kualitatif-induktif-deskriptif dan kualitatif-deduktif-deskriptif digunakan untuk menganalisa data menuju penarikan kesimpulan. Kesimpulan pertama, penyelenggara Wartel A dan B dibolehkan memungut PPN atas penyerahan Jasa Telekomunikasi dan membuat Faktur Pajak (Faktur Pajak Sederhana) sebagai bukti pemungutan PPN. Kesimpulan kedua, tidak terdapat perbedaan antara Saat Terutang Pajak bagi penyerahan Jasa Telekomunikasi berupa Sambungan Telepon Lokal, SLJJ, SLI di satu pihak dan Internet (CJY.net) di lain pihak untuk penyerahan secara langsung dengan penyerahan tidak langsung kepada konsumen akhir. Saran yang dapat dikemukakan adalah :

1. Secara teoritis, perlu dibuat kajian khusus mengenai Penyelenggaraan Wartel A dan B secara normatif maupun empiris / sosiologis. Secara praktis, bagi PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY perlu ketelitian dan kecermatan pengadministrasian perpajakan (PPN) Penyelenggara Wartel A dan B. Untuk pembuat UU dan peraturan pelaksanaan perlu menyusun ketentuan khusus yang mengatur masalah perpajakan penyelenggara Wartel A dan B.
2. Secara teoritis, perlu dibuat kajian khusus secara normatif dan empiris / sosiologis mengenai Saat Terutang Pajak baik untuk penyerahan Jasa Telekomunikasi secara langsung maupun tidak langsung untuk pengembangan hukum pajak. Secara praktis, perlu ditetapkan

keputusan menteri keuangan atau keputusan direktur jenderal pajak yang mengatur secara spesifik tentang Saat Terutang Pajak bagi penyerahan Jasa Telekomunikasi.

ABSTRACT

PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY executes the Telecommunication Service delivery to final consumer that constitute Tax Object according to the Value-Added Tax Act 1984. The Value-Added Tax Act 1984 that intended has been replaced by the Act number 11 in 1994 and the Act number 18 in 2000. Imposition that intended is caused to be effective the Value-Added Tax Act 1984 provision above toward the Value-Added Tax Object that among others is the Telecommunication Service delivery that constitute the Service Subject to Tax delivery (Article 1 number 7 and article 4 letter c). The permission for the Operator of Wartel A and B to collect the Value-Added Tax on the Telecommunication Service delivery and to make Tax Invoice as the collection proof of the Value-Added Tax, constitute the first set of problems. For the second one, the difference between Tax-Owed Period for the Telecommunication Service delivery in the form of Local Call, Long Distance Call, International Call, and Internet (CJY.net) for the direct delivery and the indirect one to the final consumer. They both constitute the set of problems in this Thesis that entitled : IMPOSITION THE VALUE-ADDED TAX ON THE TELECOMMUNICATION SERVICE DELIVERY AT PT. TELKOM DIVRE IV JATENG DAN DIY.

Combination of normative juridical and sociological juridical approaches, with data acquisition by means of literature study, interview, and questionnaire constitute methods to solve the set of problems of this case study. Qualitative-inductive-descriptive analysis and qualitative-deductive-descriptive analysis are used to analyze data aim to the conclusions drawing. The first conclusion, the Operator of Wartel A and B is allowed to collect Value-Added Tax on the Telecommunication Service delivery and to make Tax Invoice (Simple Tax Invoice) as the collection proof of Value-Added Tax. Secondly, there is not difference between Tax-Owed Period for the Telecommunication Service delivery in the form of Local Call, Long Distance Call, International Call on the one hand and Internet (CJY.net) on the other hand for the direct delivery and the indirect one to final consumer. The following recommendation could be proposed that :

1. Theoretically, it is necessary be made a particular study regarding the operation of Wartel A and B, normatively and empirically / sociologically. Practically, for PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY it is necessary carefulness and meticulousness administering taxation (Value-Added Tax) of the Operator of Wartel A and B. For legislator and implementation regulation it is necessary to arrange special provision that regulate taxation problem of the Operator of Wartel A and B.

2. Theoretically, it is necessary be made a particular study normatively and empirically / sociologically regarding Tax-Owed Period for the Telecommunication Service delivery directly or indirectly for developing of tax law. Practically, it is necessary be determined regulation of finance minister or general director of tax that regulate specifically regarding Tax-Owed Period for the Telecommunication Service delivery.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	v
Abstract	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	20
D. Kontribusi Penelitian	21
E. Metode Penelitian	21
F. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum	30
B. Pembagian Jenis-jenis Pajak, Objek PPN dan Saat Terutang PPN	34
C. Pajak Keluaran dan Faktur Pajak	40
D. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Telekomunikasi	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA	46
A. Tinjauan Umum PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk	46
B. PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY	70
C. Boleh Tidaknya Penyelenggara Wartel A dan B Memungut PPN atas Penyerahan Jasa Telekomunikasi dan Membuat Faktur Pajak sebagai Bukti Pemungutan PPN	93
C.1. Hasil Penelitian	93
C.1.1. Kemitraan PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY dengan Penyelenggara Wartel A dan B	93
C.1.2. Pemungutan PPN atas Penyerahan Jasa Telekomunikasi dan Pembuatan Faktur Pajak sebagai Bukti Pemungutan oleh Penyelenggara Wartel A dan B	110
C.2. Analisa	124
D. Perbedaan antara Saat Terutang Pajak bagi Penyerahan Jasa Telekomunikasi berupa Sambungan Telepon Lokal, SLJJ, SLI dan Internet (CJY.net) untuk Penyerahan secara Langsung dengan Penyerahan secara Tidak Langsung kepada Konsumen Akhir	130
D.1. Hasil Penelitian	130

D.1.1. Penyerahan Jasa Telekomunikasi berupa Sambungan Telepon Lokal, SLJJ, SLI dan Internet (CJY.net) untuk Penyerahan secara Langsung dan Penyerahan secara Tidak Langsung kepada Konsumen Akhir	130
D.1.2. Saat Terutang Pajak bagi Penyerahan Jasa Telekomunikasi	144
D.2. Analisa	148
BAB IV PENUTUP	154
A. Kesimpulan	154
B. Saran	155
DAFTAR PUSTAKA	158
LAMPIRAN	170
DAFTAR SINGKATAN.....	175

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1	170
LAMPIRAN 2	171
LAMPIRAN 3	172
LAMPIRAN 4	173
LAMPIRAN 5	174

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.¹ Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.² Selain itu definisi lain menyatakan, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin³ yang surplusnya digunakan untuk *public saving* dan merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.⁴ Dari pengertian pajak tersebut diketahui bahwa fungsi utama pajak adalah sebagai sumber keuangan negara, untuk membiayai pengeluaran rutin dan kelebihannya untuk membiayai pembangunan.⁵

¹ Tulis S. Meliala, *Perpajakan dalam Teori dan Praktek*, CV: Yrama Widya Dharma, Bandung, 1991, halaman 7.

² R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, 1995, halaman 2.

³ H.S. Munawir, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1997, halaman iii.

⁴ Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, Cetakan ke-2, PT. Eresco, Bandung, Jakarta, 1982, halaman 10.

⁵ H.S.Munawir, *loc.cit*.

Di samping itu fungsi lain dari pajak adalah fungsi regulasi atau fungsi mengatur. Fungsi regulasi terutama berkaitan dengan peranan pajak dalam mengatur irama kegiatan ekonomi, alokasi sumber, redistribusi pendapatan dan konsumsi.⁶

Di Indonesia untuk mengoptimalkan kedua fungsi dari pajak diatas telah dilakukan tiga kali reformasi atau pembaharuan terhadap sistem perpajakan nasional. Reformasi sistem perpajakan nasional ini terjadi pada tahun 1983, 1994 dan 2000. Ketiganya memiliki kesamaan yaitu bertujuan mengoptimalkan fungsi budgeter dan fungsi regulasi. Namun ketiganya memiliki pula perbedaan dalam hal kondisi lingkungan yang melatarbelakangi *tax reform*.

Sejak berakhirnya "boom minyak" pada awal tahun 80-an, sumber penerimaan negara yang semula didominasi oleh sektor minyak bumi dan gas alam (sektor migas), beralih ke sektor non-migas. Sejak saat itu, sektor non-migas diharapkan dapat berperan menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang utama, terutama dari sektor pajak. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, karena disamping jumlahnya yang relatif lebih stabil, dari sektor tersebut diharapkan partisipasi aktif

⁶ Miyasto, *Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Global, Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada Peresmian Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*, Semarang, 6 Desember 1997, Badan Penerbit UNDIP, Semarang 1997, halaman 6.

masyarakat dalam membiayai pembangunan.⁷ Pada tahun 1983 pemerintah telah melakukan pembaharuan sistem perpajakan nasional (PSPN) sebagai antisipasi terhadap semakin menurunnya peran minyak bumi dan gas alam (migas) sebagai sumber penerimaan keuangan negara.⁸ *Tax reform* yang pertama ini dinilai cukup berhasil dalam menarik dana dari masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan penerimaan pajak yang dicapai dalam 10 tahun setelah diadakannya *tax reform* tahun 1983. Perbandingan antara penerimaan pajak dengan penerimaan dalam negeri yang pada tahun 1984/1985 sebesar 20,7 % sepuluh tahun kemudian (tahun 1994/1995) prosentase tersebut meningkat menjadi sebesar 56,9 %. Sementara itu jika dilihat dari perbandingan antara penerimaan pajak dengan penerimaan migas, pada tahun 1984/1985 prosentasenya masih sebesar 31,6 tetapi pada tahun 1994/1995 meningkat 264,5 %.⁹

Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) yang dilakukan pemerintah sejak awal 1981 antara lain telah berhasil mengeluarkan lima

⁷ Mardiasmo, *Optimalisasi Peran Akuntan Dalam Peningkatan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak*, Makalah yang disampaikan dalam Simposium Nasional Mahasiswa Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, Tanggal 6 September 1994, dalam Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi 3, Andi Offset, Yogyakarta, 1995, halaman 303.

⁸ Mardiasmo, *Strategi Implementasi Sistem Perpajakan Tahun 1994 Dalam Rangka Menyaring Wajib Pajak*, Makalah yang disampaikan dalam Lokakarya Perpajakan Sehari, Pusat Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tanggal 22 April 1995, dalam Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi 3, Andi Offset, Yogyakarta, 1995, halaman 319.

⁹ Mardiasmo, *Seluk Beluk Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 dan Implikasinya Terhadap Dunia Usaha di Indonesia*, Makalah yang disampaikan dalam Lokakarya Perpajakan Sehari, Pusat Pengembangan Manajemen Fakultas

buah Undang-Undang Perpajakan yang penting. Salah satu Undang-Undang Perpajakan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN 1984).¹⁰

Penetapan Sistem PPN dalam Reformasi Sistem Perpajakan Nasional Pertama ini memiliki latar belakang. Jenis pajak ini mengalami sejarah yang cukup panjang di Indonesia. Sehingga, perlu pula diketahui bahwa PPN tidak lahir begitu saja di negara kita, namun melalui sejarah panjang mulai dari pengkajian, pembuatan peraturan hingga penerapannya tahun 1985. Sebelum PPN ini kita terapkan, telah ada sistem pajak tidak langsung lainnya yang kita terapkan yakni dengan sistem Pajak Penjualan, sebagaimana umumnya ada di berbagai negara. Namun pemerintah menginginkan sistem yang lebih mudah, sederhana dan tidak membebankan masyarakat didalam pelaksanaannya. Terlebih lagi dengan dilakukannya perubahan sistem perpajakan nasional dari "*Official Assesment System*" kepada "*Self Assesment System*", sehingga PPN ini kelihatannya sangat mendukung sistem yang kita terapkan.¹¹

Jadi sebelum sistem PPN ini diterapkan, kita telah memberlakukan jenis pajak tidak langsung lain yakni dengan pajak penjualan yang dasar

Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tanggal 22 April 1995, dalam Mardiasmo, Perpajakan, Edisi 3, Andi Offset, Yogyakarta 1995, halaman 335.

¹⁰ Mardiasmo, *Dampak UU PPN 1984 Terhadap Keputusan Manajemen dan Aspek Administrasi dan Akuntansi*, Makalah yang dimuat dalam Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Edisi Nopember, STIE YKPN, Yogyakarta, 1991 dalam Mardiasmo, Perpajakan, Edisi 3, Andi Offset, Yogyakarta, 1995, halaman 259.

hukumnya diatur dalam UU Darurat Nomor 19 Tahun 1956. Yang kemudian ditetapkan dengan UU Nomor 53 Tahun 1953, sehingga jenis pajak ini dikenal dengan nama Pajak Penjualan Tahun 1951 (PPN Tahun 1951). Dalam perkembangannya, UU ini telah mengalami banyak perubahan baik yang bersifat penyempurnaan maupun tambahan terhadap UU tersebut. Diantaranya yang terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 1968 mengenai Pajak Penjualan atas impor barang ke dalam Daerah Pabean Republik Indonesia.¹²

Selain sistem Pajak Penjualan ini, ada beberapa sistem pajak lainnya yang diterapkan sebelum PPN, antara lain dapat disebutkan :

Pertama, Pajak Pembangunan I (PPb I). Mengenai sistem ini pada permulaannya, pajak ini dipungut secara sukarela. Secara resmi pada tanggal 1 Juni 1947, dipungut PPb I atas rumah makan, penginapan dan penyerahan jasa di rumah-rumah makan. PPb I ini pada awalnya merupakan pajak pusat namun kemudian dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perimbangan keuangan negara dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.¹³

Kedua, Pajak Peredaran 1950 (PPe 1950). Pajak Peredaran yang disingkat dengan PPe adalah pajak atas penyerahan barang dan

¹¹ Liberty Pandiangan, *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, halaman 26 – 27.

¹² *Ibid*, halaman 27.

jasa yang pertama sejak Indonesia Merdeka. Berlakunya Pajak Peredaran berdasarkan Undang-undang Darurat Pajak Peredaran 1950 (UU PPe Tahun 1950). Umurnya hanya sembilan bulan, mulai berlaku 1 Januari dan berakhir 30 September 1951.¹⁴

Dalam pelaksanaannya ternyata Pajak Penjualan ini mempunyai banyak kekurangan yang mengakibatkan jenis pajak ini tidak efektif dan tidak produktif.¹⁵

Sebagaimana telah diuraikan diatas sebelumnya, Reformasi Sistem Perpajakan Nasional Pertama memang menunjukkan keberhasilan. Dibalik keberhasilan itu, *tax reform* tahun 1983 tersebut masih banyak kekurangannya. Antara lain adalah karena pemungutan pajak masih condong ke fungsi *budgetair* (sumber penerimaan negara), fungsi pengaturan dan pemerataan (*regularend*) menjadi kurang diperhatikan. Hal ini dapat dimaklumi karena sektor pajak sedang diusahakan untuk dapat menjadi tulang punggung dalam pembiayaan pembangunan nasional. Implikasinya, pajak sering dirasakan sebagai beban oleh masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang enggan untuk membayar pajak. Kekurangan yang lain adalah masih banyak Wajib Pajak yang belum terjaring. Hal tersebut disebabkan antara lain, karena masih

¹³ Untung Sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai*, PT. Rajabratindo Persada, Jakarta, 1999, halaman 12.

¹⁴ B. Boediono, *Uraian Dasar Pajak Pertambahan Nilai*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986, halaman 15 – 16.

¹⁵ Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, halaman 128.

banyak celah (*loopholes*), interpretasi istilah dan pasal-pasal yang masih bias, serta masih banyak bentuk-bentuk aktivitas yang aspek perpajakannya belum diatur dalam Undang-undang Perpajakan Tahun 1983,¹⁶ walaupun telah diupayakan berbagai perbaikan untuk menyempurnakan sistem tersebut.¹⁷

Berdasarkan beberapa hal diatas dan adanya tuntutan untuk dapat mengantisipasi perubahan dan perkembangan globalisasi ekonomi dan iptek, maka kemudian ditetapkan Reformasi atau Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional kedua. Produk hukum yang dihasilkan antara lain adalah hukum pajak formal (Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994) dan hukum pajak material (Undang-undang Nomor 10, 11, 12 Tahun 1994).

Reformasi perpajakan kedua dilatar belakangi oleh kondisi lingkungan yang berbeda dengan yang dihadapi pada saat reformasi pertama. Perkembangan perekonomian yang sangat dinamis yang dimotori oleh perubahan-perubahan teknologi yang sedemikian cepat telah meningkatkan ketidakpastian masa yang akan datang. Terlalu cepatnya perubahan-perubahan lingkungan usaha sering menyebabkan ekspektasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan para ekonom menjadi kurang berarti. Tidak jarang para pengusaha mengambil

¹⁶ Mardiasmo, op.cit, halaman 335 – 336.

¹⁷ Mardiasmo, *Tinjauan Kritis Terhadap Sistem Perpajakan Nasional dan Faktor Pendorong Timbulnya Kejahatan Restitusi Pajak*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Hukum Pajak, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo, Tanggal 22 Januari 1994, dalam Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi 3, Andi Offset, Yogyakarta, 1995, halaman 287.

keputusan-keputusan strategis yang justru dapat menghancurkan perusahaannya sendiri. Tidak jarang pula para ekonom memberikan rekomendasi yang tidak valid kepada para pengambil kebijakan, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang terlihat kurang konsisten dengan kondisi eksternal yang dihadapi.¹⁸ Jadi, setelah 10 (sepuluh tahun) berlakunya, ternyata Undang-undang Perpajakan 1983, kurang dapat mengikuti timbulnya beberapa perubahan situasi politik dan ekonomi yang sangat cepat diberbagai belahan dunia.¹⁹

Reformasi perpajakan kedua diarahkan untuk mengelaborasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kemandirian penerimaan negara, keadilan dalam perpajakan, persaingan global, pembinaan pengusaha kecil, perkembangan teknologi, kelestarian alam dan lingkungan hidup. Hal ini tercermin pada peraturan-peraturan perpajakan baik yang terdapat dalam hukum pajak formal, maupun hukum pajak materiil. Strategi perpajakan nasional dalam reformasi ini terutama diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang berkaitan dengan kemandirian dan peningkatan daya saing ekonomi nasional di persaingan global. Beberapa tujuan lain yang ingin dicapai dalam reformasi ini adalah:

¹⁸ Miyasto, op.cit. halaman 15.

¹⁹ Hero Utomo Kuntjorojakti, *Kumpulan Esai-Esai Terpilih Ekonomi-Politik Internasional di Asia Pasifik*, Penyunting Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1995, halaman IX.

- peningkatan kemampuan pengusaha-pengusaha kecil untuk akses di pasar global
- peningkatan kualitas sumber daya manusia
- pengembangan teknologi
- pemeliharaan ekosistem
- penciptaan keadilan dalam perpajakan
- penciptaan aparat yang bersih dan berwibawa.²⁰

Tujuan-tujuan di atas merupakan tujuan dari produk hukum Reformasi Perpajakan Kedua khususnya hukum pajak formal yang memuat mengenai cara bagaimana hukum pajak material itu dilaksanakan.²¹ Tujuan-tujuan tersebut sebenarnya bersesuaian pula dengan arah dan tujuan penyempurnaan ketentuan tentang Pajak Pertambahan Nilai yang sebelum Reformasi Perpajakan Kedua ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Setelah Reformasi Perpajakan Kedua, ditetapkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 yang mengubah ketentuan lama.

Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan ketentuan baru tentang penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha (Pasal 4 c). Juncto ketentuan baru pasal 4 A yang berusaha memperluas objek Pajak Pertambahan Nilai.

²⁰ Ibid, halaman 19 – 20.

²¹ Hamdan Aini, *Perpajakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, halaman 8.

Perluasan ini dengan cara menetapkan secara limitatif jasa yang tidak dikenakan pajak melalui peraturan pemerintah. Penetapan tersebut adalah dengan PP No. 50 Tahun 1994, yaitu khususnya pasal 9 tentang jasa di bidang telekomunikasi yang tidak dikenakan pajak. Oleh pasal 21 jasa di bidang ini yang dimaksud adalah khusus jasa telepon umum coinbox dan jasa telegram. Dengan demikian jasa dibidang telekomunikasi yang lain menjadi objek pajak. Atau untuk lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penyerahan jasa telekomunikasi di luar jasa telepon umum coinbox dan jasa telegram. Dalam hal ini Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja²² dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan.²³

Selain kedua reformasi perpajakan diatas, saat ini telah ditetapkan reformasi perpajakan ketiga. Dalam era reformasi saat ini, perkembangan sosial ekonomi dan politik berlangsung sangat cepat sehingga perubahan sistem perpajakan yang pernah dilakukan belum dapat menampung perkembangan dunia usaha. Hal ini disebabkan karena masih dijumpai kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan, yaitu :

- a. belum adil walaupun sudah dilaksanakan sesuai ketentuan,

²² Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan, Seri Kepustakaan Lengkap, Salemba 4, Jakarta, 2000, halaman 263.

²³ Agustini Asikin, Tika Noorjaya dan Yulia Himawati, *Pajak, Citra dan Bebannya, Pokok-Pokok Pemikiran Salamun A.T.*, PT. Bina Reka Pariwara, Jakarta, 1990, halaman 107.

- b. kurang memberikan hak-hak Wajib Pajak,
- c. kurang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya,
- d. kurang memberikan kepastian hukum serta kurang sederhana.

Untuk itu dalam rangka menampung perkembangan dunia usaha dipandang perlu penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menitikberatkan pada peningkatan :

- a. asas keadilan,
- b. asas kepastian hukum,
- c. asas legalitas, dan
- d. asas kesederhanaan.

Berdasarkan hal-hal diatas, terdapat sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tahun 2000 (UU No. 18 Tahun 2000). Sasaran tersebut adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara.

Salah satu perubahan yang ingin mewujudkan sasaran yang hendak dicapai diatas adalah perubahan Pasal 4 c mengenai Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Ketentuan ini juncto dengan

perubahan ketentuan dalam Pasal 4 A ayat 1 yang menyatakan jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenakan pajak ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu juncto pula dengan penambahan ketentuan Pasal 4 A ayat 3 yang menetapkan kelompok-kelompok jasa yang menjadi dasar untuk penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 4 A. ayat 1. Diantara kelompok-kelompok jasa ini tidak ada satupun mengenai Jasa Telekomunikasi. Dengan demikian Jasa Telekomunikasi ini adalah salah satu jenis jasa yang atas penyerahannya dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Mengenai Jasa Telekomunikasi ini tidak dapat dilepaskan dari salah satu BUMN di Indonesia yang paling lama bergerak dibidang Jasa Telekomunikasi. BUMN yang dimaksud adalah PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (PT. TELKOM). PT. TELKOM merupakan BUMN yang memiliki sejarah panjang,²⁴ sama dengan Jasa Telekomunikasi yang dibidangnya merupakan jenis jasa tertua yang ada di negara kita²⁵ dan paling banyak digunakan. Banyaknya penggunaan jenis jasa telekomunikasi dapat dilihat dari jumlah Satuan Sambungan Telepon (SST) diseluruh Indonesia yang semakin hari semakin meningkat. Setidaknya telah tercatat pada tahun 1998 saja mencapai angka 5,6 juta

²⁴ Lihat dalam Legiman Misdiyono, Budi Waskito Tommy Pardede, *Telkom Di Tengah Era Reformasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, mulai halaman 1 dst.

²⁵ Ibid.

SST.²⁶ Sehingga pada tahun 1995 tiap pesawat telepon digunakan 70 orang dan pada tahun 1998 diperkirakan turun menjadi 26 orang.²⁷ Kecenderungan ini akan terus mengalami peningkatan hingga saat ini, seperti yang ditunjukkan pada tahun 1999 yang meningkat menjadi lebih banyak yaitu 6 juta SST.²⁸

Pada awalnya PT. TELKOM tunduk pada Undang-undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Undang-undang ini memberikan hak eksklusivitas kepada PT. TELKOM dan PT. INDOSAT untuk menangani kegiatan pertelekomunikasian di Indonesia sebagai Badan Penyelenggara.²⁹ Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1993 yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang diatas dinyatakan bahwa kedua operator tersebut merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyelenggarakan Jasa Telekomunikasi.³⁰ Kepada PT. TELKOM ditegaskan lagi dalam Kepmenparpostel No. KM. 60/PT.102/MPPT-1995 mengenai dua hak eksklusif. Yang pertama, hak eksklusif untuk menyelenggarakan Jasa Telekomunikasi lokal dengan menggunakan jaringan tetap (*wireline dan fixed wireless*) untuk jangka waktu selama

²⁶ Lihat dalam PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk., *Strategi Baru Dalam Era Baru, Laporan Tahunan 1998*, halaman 2.

²⁷ Lihat dalam Nasrudin Haris, *Telekomunikasi Indonesia, Sejarah, Perkembangan dan Proyeksi ke Depan*, Diterbitkan atas Kerjasama PT. TELKOM dan Yayasan Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) 1997, Bandung, 1997, halaman XXXIII.

²⁸ Lihat dalam PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk., *Laporan Tahunan 1999*, Bandung, 1999, halaman 3.

²⁹ Hikmahanto Juwana, *Eksklusivitas vs Persaingan dalam UU Telekomunikasi*, dalam Dot Net Edisi 2, 25, Juli – 7 Agustus 2000, halaman 20.

minimum 15 tahun (s.d. tahun 2010). Yang kedua adalah hak eksklusif untuk menyelenggarakan Jasa Telekomunikasi jarak jauh untuk jangka waktu minimum 10 tahun (s.d. tahun 2005).³¹ Dengan demikian PT. TELKOM menyelenggarakan Jasa Telekomunikasi dasar dalam negeri yang antara lain telepon lokal dan jarak jauh itu. Selain itu PT. TELKOM juga menyelenggarakan Jasa Telekomunikasi bukan dasar³² yang dikemudian hari kita kenal Internet termasuk di dalamnya. Kemudian dengan penyelenggara telekomunikasi lain, PT. TELKOM menyelenggarakan Jasa Interkoneksi. Penyelenggaraan jasa ini dilakukan melalui kerjasama dengan PT. INDOSAT dan PT. SATELINDO yang keduanya merupakan penyelenggara Jasa Telekomunikasi Internasional.³³

Memasuki abad 21 kita mengenal apa yang dinamakan globalisasi. Globalisasi itu sendiri menurut *Roland Robertson* adalah karakteristik hubungan antara penduduk bumi ini yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan negara. Dalam proses tersebut dunia telah dimampatkan (*compressed*) serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai satu kesatuan utuh.³⁴ Globalisasi mengandung

³⁰ Legal Department of PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk., *Telaah Kritis RUU Telekomunikasi (Bagian 1) : RUU Telekomunikasi dan Eksklusivitas Telkom*, dalam Telkom's Legal News, Volume 1, Edisi Januari 1999, halaman 2.

³¹ Donny Kertaputra W., *Perbandingan Hukum Telekomunikasi*, dalam Telkom's Legal News, Volume 4/1, Edisi Oktober, Desember 1999, halaman 4.

³² PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., *Prospektus*, Bandung, 1995, halaman 89 – 90.

³³ *Ibid*, halaman 91 dan 106.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global*, Makalah Disampaikan pada Pertemuan Dosen Pengajar Sosiologi Hukum se-Jawa

makna yang dalam dan terjadi di segala aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial budaya, IPTEK dan sebagainya.³⁵

Selama beberapa kurun waktu terakhir, akselerasi globalisasi terus meningkat seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, dan komunikasi³⁶, serta teknologi telekomunikasi. Akselerasi globalisasi ini banyak membawa perubahan lingkungan global termasuk sektor telekomunikasi. Perkembangan teknologi telekomunikasi mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi.³⁷ Perubahan tersebut dengan disertai hasil konvergensi dengan teknologi informasi dan penyiaran menuntut negara kita untuk menata kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional. Penataan kembali ini harus memperhatikan prinsip perdagangan bebas dan tidak diskriminatif. Penataan kembali ini kemudian diwujudkan dalam penetapan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.³⁸ Dalam Undang-Undang ini terkandung liberalisasi

Tengah dan DIY, Diselenggarakan oleh UMS, Surakarta, 5 – 6 Agustus 1996, halaman 1.

³⁵ Muladi, *Aspek Hukum Globalisasi*, Dalam Jurnal Bisnis Strategi, Program Magister Manajemen UNDIP, Vo. 2 Tahun I/1998, halaman 4.

³⁶ Martani Huseini, *Mencermati Misteri Globalisasi : Menata- Ulang Strategi Pemasaran Internasional Indonesia Melalui Pendekatan Resourced-Based*, Bagian Pertama dari dua tulisan, dalam *Usahawan* No. 01 Th. XXIX, Januari 2000, halaman 3.

³⁷ Edmon Makarim dan M. Sofyan, *Isu Merger Telkom dan Indosat, dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, dot.net edisi 1, 11 - 24 Juli 2000, halaman 16.

³⁸ Donny Kertapura W., *op.cit.*, halaman 3.

³⁹ Media Indonesia, *Monopoli Telkom-Indosat Usai, SLJJ dan Lokal Berakhir 2002*, SLI 2003, 2 Agustus 2000, halaman 2. Lihat pula www.kompas.com/business/news/0008/01/11.htm, *Hak Eksklusivitas TELKOM dan INDOSAT dipercepat*.

⁴⁰ Lihat dalam Ramadhan K.H., Sugiarta Sriwibawa dan Abrar Yusra, *Dari Monopoli Menuju Kompetisi, 50 Tahun Telekomunikasi Indonesia, Sejarah dan Kiat Manajemen Telkom*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1989, halaman 191 - 192.

Telekomunikasi dengan membuka investasi bagi pelaku usaha lain diluar PT. TELKOM dan PT. INDOSAT. Dengan demikian monopoli bidang penyelenggaraan telekomunikasi akan segera diakhiri menurut Undang-Undang yang baru ini. Pemerintah sendiri telah mempercepat proses mengakhiri sambungan telepon lokal yang semula berakhir tahun 2010, dipercepat menjadi tahun 2002. Sedangkan monopoli PT. TELKOM untuk SLJJ dari tahun 2005 akan diakhiri tahun 2002. Untuk PT. INDOSAT monopoli penyelenggaraan SLI dari tahun 2004 diperpendek menjadi tahun 2003.³⁹ Namun demikian walaupun monopoli akan berakhir PT. TELKOM tetap mendapatkan ijin dari pemerintah untuk menyelenggarakan Jasa Sambungan Telepon Lokal dan SLJJ tersebut diatas.

Selain hal tersebut diatas PT. TELKOM dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi terbagi menjadi beberapa Divisi Regional yang merupakan hasil dari restrukturisasi internal pada tahun 1995 (1 Juli 1995). Masing-masing Divisi Regional secara operasional berdiri sendiri dan saling bersaing meningkatkan mutu pelayanan, sedangkan PT. TELKOM Kantor Perusahaan hanya terbatas dalam kebijakan strategis saja.⁴⁰

Salah satu dari ketujuh Divisi Regional yang ada adalah Divisi Regional IV. Divisi Regional ini dikenal pula dengan nama PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY. PT. TELKOM DIVRE IV ini merupakan Divisi

Regional yang tergolong sukses dalam mengembangkan usaha. Hal ini bisa dilihat dari semakin banyaknya jenis-jenis produk dan layanan. Semakin meningkatnya pendapatan usaha, semakin banyaknya satuan sambungan telepon (SST), dan semakin pesatnya pemasaran melalui kemitraan dengan Wartel dan Warnet.⁴¹

Sebenarnya ada sekian banyak jenis Jasa Telekomunikasi yang merupakan produk dan layanan PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY. Sambungan Telepon Lokal dan SLJJ merupakan dua jenis jasa yang paling banyak memberikan kontribusi pendapatan bagi perusahaan ini. Selain jenis jasa ini terdapat pula Sambungan Langsung Internasional (SLI) yang juga cukup banyak memberikan kontribusi pendapatan. Kemudian Internet yang dipasarkan dengan nama CJY.net merupakan jenis Jasa Telekomunikasi yang termasuk paling baru dan banyak diminati para konsumen di wilayah Jateng dan DIY. Untuk masing-masing jasa tersebut oleh PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY dilakukan pemasaran melalui penyerahan secara langsung kepada konsumen akhir maupun tidak langsung. Pemasaran melalui penyerahan secara tidak

⁴¹ Lihat dalam : 1. *Wartel dan Bisnis Masa Depan Telkom*, Suara Merdeka, Jum'at 29 Agustus 2000, halaman 2.
2. *Dialog Telkom, Ingin Buka Warnet, Bagaimana Syaratnya*, Radar Semarang, 26 Oktober 2000, halaman 2.
3. *KSO Divre IV Meraih Hasil Maksimal Melalui Kebersamaan*, Suara Karya, 26 Januari 2001, halaman 3.
4. PT. Telkom Divre IV Jateng dan DIY, *Produk dan Layanan*, 1999, halaman 10.

langsung dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan Wartel A dan B untuk Sambungan Telepon Lokal, SLJJ dan SLI dan kemitraan dengan Warnet untuk Internet yang dikenal dengan CJY.net.⁴² Untuk masing-masing penyerahan ini merupakan kegiatan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, karena merupakan suatu penyerahan Jasa Kena Pajak yang menjadi Objek Pajak Pertambahan Nilai.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas, nampak dengan jelas bahwa PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY baru ada mulai tanggal 1 Juli 1995. Hal ini menunjukkan bahwa saat itu telah berlaku UU PPN 1984 yang telah dilakukan perubahan pertama oleh Undang-undang No. 11 Tahun 1994. Setelah itu beberapa tahun kemudian diubah lagi dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000. Dengan demikian Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Telekomunikasi pada PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY didasarkan atas ketentuan UU PPN 1984 sebagaimana diubah dengan kedua undang-undang diatas dan dilaksanakan dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Mengenai pengenaan ini tidak hanya dilakukan terhadap penyerahan Jasa Telekomunikasi berupa Sambungan Telepon Lokal, SLJJ, SLI secara langsung tetapi juga secara tidak langsung kepada konsumen akhir. Semua penyerahan Jasa Telekomunikasi tersebut dilakukan oleh PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY secara langsung dan tidak langsung.

⁴² *Ibid.*

Penyerahan langsung dilakukan PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY kepada konsumen akhir tanpa melalui perantara siapa pun. Sedangkan penyerahan tidak langsung dilakukan dengan jalan melalui pihak lain yaitu dengan kemitraan bersama Wartel, baik Wartel tipe A maupun tipe B. Dalam hal ini belum diketahui dengan pasti siapa yang menjadi PKP (Pasal 1 huruf I UU PPN 1984 sebagaimana diubah UU No.11 Tahun 1994 dan Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 sebagaimana diubah UU No. 18 Tahun 2000). Secara normatif pada saat Penyerahan Jasa Kena Pajak yang wajib memungut PPN dan membuat Faktur Pajak adalah PKP. Ketentuan ini dapat dilihat dalam UU PPN 1984, baik yang telah diubah pertama kali (Pasal 3A ayat 1 UU PPN 1984 sebagaimana diubah UU No.11 Tahun 1994) atau untuk kedua kalinya (Pasal 3A ayat 1 UU PPN 1984 sebagaimana diubah UU No.18 Tahun 2000). Namun secara empiris Wartel memungut PPN dengan bukti berupa Faktur Pajak yang dibuat dan diserahkan kepada konsumen akhir. Dengan demikian maka hal ini akan menjadi permasalahan yang pertama yaitu :

1. Apakah Penyelenggara Wartel A dan B dibolehkan memungut PPN atas penyerahan Jasa Telekomunikasi dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN ?

Selain permasalahan pertama diatas, dibawah ini akan diketengahkan mengenai Saat Terutang Pajak untuk masing-masing penyerahan baik langsung maupun tidak langsung melalui Wartel A dan B

dan Warnet yang mendorong timbulnya permasalahan yang kedua. Sebagaimana disebutkan diatas dan didalam latar belakang, penyerahan Jasa Telekomunikasi berupa Sambungan Telepon Lokal, SLJJ, SLI dan Internet (CJY.net) pada PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen akhir. Secara tidak langsung melalui kemitraan dengan Wartel A dan B untuk Sambungan Telepon Lokal, SLJJ dan SLI. Sedangkan Warnet untuk Internet (CJY.net). Secara normatif saat terutang pajak adalah saat penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan (Pasal 11 ayat 1 UU PPN 1984 sebagaimana diubah pertama kali dan Pasal 11 ayat 1 huruf c untuk perubahan kedua). Tetapi secara empiris penyerahan Jasa Telekomunikasi diatas tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi juga tidak langsung melalui perantaraan mitra PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang kedua, yaitu :

2. Apakah terdapat perbedaan antara Saat Terutang Pajak bagi penyerahan Jasa Telekomunikasi berupa Sambungan Telepon Lokal, SLJJ, SLI dan Internet (CJY.net) untuk penyerahan secara langsung dengan penyerahan tidak langsung kepada konsumen akhir?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis boleh tidaknya Penyelenggara Wartel A dan B memungut PPN atas penyerahan Jasa Telekomunikasi dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN.

2. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan antara Saat Terutang Pajak bagi penyerahan Jasa Telekomunikasi berupa Sambungan Telepon Lokal, SLJJ, SLI dan Internet (CJY.net) untuk penyerahan secara langsung dengan penyerahan tidak langsung kepada konsumen akhir.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Dari segi teoritis, dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pajak, baik dilihat dari segi normatif maupun dari segi empiris / sosiologis.
2. Dari segi praktis, dapat memberikan masukan bagi PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (PPN). Selain itu juga dapat memberikan masukan bagi pembuat undang-undang beserta pembuat peraturan pelaksanaan untuk meneliti kembali substansi peraturan yang dibuatnya.

E. METODE PENELITIAN

E.1. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang dipakai penelitian ini adalah *yuridis normatif* dan *yuridis sosiologis*. Pada pendekatan yuridis normatif, fokus penelitian diarahkan pada segi-segi hukum yang tertulis (peraturan perundang-undangan) yang berhubungan dengan objek penelitian. Untuk

metode pendekatan *yuridis normatif* akan digunakan dua macam penelitian yaitu :

1. Penelitian terhadap inventarisasi hukum positif, yang ditujukan pada seluruh peraturan perpajakan yang terkait dan peraturan perundangan telekomunikasi yang berhubungan.
2. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum vertikal dan horisontal, yang ditujukan pada seluruh peraturan perpajakan yang terkait dan peraturan perundangan telekomunikasi yang berhubungan.

Metode pendekatan kedua yang dipakai dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis* atau *socio legal research*. Dipergunakannya metode pendekatan ini disebabkan oleh karena permasalahan yang akan diteliti berhubungan erat antara *law in books* dan *law in action*. Apalagi dalam penelitian ini memang tidak hanya memperbincangkan segi normatif saja, tetapi juga segi sosiologis.

Mengenai metode pendekatan *yuridis sosiologis* ini berkaitan erat dengan *law in action*. Sehingga metode pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai variabel bebas (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh atau akibat bagi aspek kehidupan sosial tetapi juga sebagai variabel tergantung (*dependent variable*) yang justru dipengaruhi oleh aspek kehidupan sosial. Kemudian untuk paradigma penelitian *yuridis sosiologis* yang digunakan adalah kualitatif-induktif-deskriptif dan kualitatif-deduktif-deskriptif.

E.2. TIPE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, khususnya penelitian kasus (studi kasus). Dalam penelitian ini penelitian dilakukan secara intensif, terperinci, mendalam dan lengkap terhadap suatu institusi atau lembaga. Bersifat *grounded* atau berpijak pada kenyataan yang ada, sesuai kejadian yang sebenarnya dan bercorak holistik. Kesimpulan penelitian hanya berlaku bagi lembaga yang diteliti. Institusi atau lembaga yang dimaksud adalah PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY sebagai satu kesatuan yang berdiri sendiri yang tidak terkait dengan DIVRE lainnya pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

E.3. METODE PENGUMPULAN DATA

E. 3. 1. Jenis Data

- a. Data primer : yaitu data yang diperoleh di lapangan berupa hasil dari wawancara / interview dan hasil dari angket/questionnaire. Dari data ini, peneliti dapat memperoleh masukan yang bersifat empiris sebagai akibat dari adanya pengenalan PPN. Sehingga dapat membantu tercapainya tujuan penelitian yang pertama dan kedua. Untuk wawancara/interview dilakukan terhadap responden seperti bagian Finance dan Yantel untuk PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY. Untuk angket/questionnaire dilakukan

terhadap bagian Finance PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY dan bagian lainnya.

- b. Data sekunder : yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, antara lain berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari data ini diharapkan akan diperoleh masukan yang bersifat sekunder. Sifat sekunder dari masukan ini disebabkan oleh karena adanya pemisahan antara *law in books* dan *law in action* (empiris) atau adanya *das sollen* dan *das sein*. Masukan dari data ini dapat merupakan bahan awal bagi peneliti untuk mencapai tujuan penelitian pertama dan kedua. Sebagai contoh data ini dapat diperoleh di perpustakaan PT.TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY.

E.3. 2. Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

E.3.2.1. Studi Kepustakaan :

Dalam studi ini tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mendapatkan data sekunder, mencari teori-teori, beberapa pendapat atau pandangan yang berkaitan dengan permasalahan.

E.3.2.1.1. Data sekunder dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya

antara lain :

a. Bahan hukum primer :

- Peraturan perundang-undangan, baik dibidang perpajakan dan pertelekomunikasian, misalnya UU PPN 1984 dan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

b. Bahan hukum sekunder : bahan ini terkait erat dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yaitu antara lain adalah hasil karya ilmiah para sarjana berupa buku-buku tentang perpajakan dan hukum pajak. Misalnya : Hukum Pajak Elementer karangan Chidir Ali.

c. Bahan hukum tersier : bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Ensiklopedia Perpajakan dan lain-lain.

E.3.2.1.2. Data sekunder dilihat dari sudut tipenya, yaitu khususnya

data sekunder yang bersifat publik berupa data resmi yang dipublikasikan, misalnya Laporan Tahunan Tahun 1999 PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY.

E.3.2.2. Wawancara/Interview :

Cara ini dilakukan dalam bentuk mengadakan wawancara secara langsung kepada para responden yang dipilih. Sedangkan jenis

wawancara yang dipergunakan adalah interview bebas terpimpin yang menggunakan catatan mengenai pokok-pokok pertanyaan. Wawancara atau interview jenis ini dipilih karena memiliki keluwesan (variasi-variasi pertanyaan) sehingga dapat dicapai hasil yang optimal. Sebagai contoh wawancara ini dapat ditujukan pada Bapak Sunarno, Senior Manager Finance pada PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY. Ini merupakan *sample* yang diambil melalui metode *purposive non random sampling*.

E.3.2.3. Angket/Questionnaire :

Angket merupakan daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti yang dibagikan kepada responden, dengan tujuan mendapatkan jawaban secara tertulis. Sebagai contoh angket ini dapat ditujukan pada Bapak Sunarno, Senior Manager Finance pada PT.TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY.

E.4. METODE ANALISIS DATA

Setelah kegiatan pengumpulan data dan pengolahan data telah selesai dilakukan, kemudian dilakukan analisa data dengan menggunakan analisa kualitatif.

Dalam metode analisis data ini, data primer dan data sekunder yang telah terkumpul dan diolah kemudian akan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Metode analisa kualitatif yang digunakan adalah metode analisis domein dan analisis taksonomis. Dalam hal ini yang menjadi domein adalah perundang-undangan Pajak yang terkait dan perundang-

undangan pertelekomunikasian yang berhubungan. Domein ini akan dianalisis menurut apa yang seharusnya (*das sollen*) dan kemudian dihubungkan dengan pengamatan yang senyatanya (*das sein*). Dari analisis ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang pokok permasalahan yang diteliti. Hasil analisis digunakan sebagai dasar penelaahan lebih rinci dan mendalam dengan fokus pada domein jenis. Domein jenis ini adalah tersusun secara hirarkis yaitu antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri dan seterusnya. Kemudian dilakukan analisis taksonomis. Baik analisis domein maupun taksonomis, keduanya digunakan untuk mencapai tujuan penelitian pertama dan kedua. Dengan demikian analisis domein dan taksonomis ini merupakan analisis dengan pendekatan deduktif, karena dimulai dari peraturan-peraturan yang ada lebih dulu baru kemudian mengarah pada fakta sosial. Selain itu metode analisis data dalam tesis ini juga menggunakan pendekatan induktif, yaitu yang dimulai dengan fokus kepada fakta sosial, baru mengarah kepada peraturan-peraturan yang bersangkutan. Disamping itu oleh karena dalam Tesis ini tidak menggunakan angka-angka, maka metode analisisnya menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian oleh karena dalam Tesis ini diadakan suatu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu maka menggunakan pendekatan

deskriptif. Jadi secara singkat metode analisis yang digunakan adalah kualitatif-induktif-deskriptif dan kualitatif-deduktif-deskriptif.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I adalah Pendahuluan, berisikan mengenai upaya penggambaran secara umum terhadap permasalahan dan kerangka berpikir yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Sehingga, pendahuluan disusun ke dalam beberapa sub bab antara lain : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, didalamnya terdapat gambaran secara lebih mendalam terhadap kajian teoritis yang akan digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian. Tinjauan Pustaka ini terdiri : Pajak Ditinjau dari Segi Hukum; Pembagian Jenis-jenis Pajak, Objek PPN dan Saat Terutang PPN; Pajak Masukan, Pajak Keluaran dan Faktur Pajak; Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Telekomunikasi.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Analisa, berisi tentang pengkajian secara ilmiah terhadap data-data yang terkumpul selama penelitian dilakukan. Sub bab dari Bab III meliputi : Tinjauan Umum PT. Telkom, PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY, Boleh Tidaknya Penyelenggara Wartel A dan B Memungut PPN atas Penyerahan Jasa

Telekomunikasi dan Membuat Faktur Pajak Sebagai Bukti Pemungutan PPN, Perbedaan antara Saat Terutang Pajak Bagi Penyerahan Jasa Telekomunikasi Berupa Sambungan Telepon Lokal, SLJJ, SLI, dan Internet (CJY.net) untuk Penyerahan Secara Langsung dengan Penyerahan Tidak Langsung Kepada Konsumen Akhir.

Bab IV adalah Penutup , bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan diupayakan untuk dirumuskan secara singkat tentang analisis permasalahan yang telah dilakukan dalam Bab III. Saran diupayakan berhubungan dengan permasalahan, tujuan serta kontribusi penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PAJAK DITINJAU DARI SEGI HUKUM

Sudahlah menjadi kelaziman, jika akan mempelajari sesuatu hal itu terlebih dahulu haruslah diketahui apa yang akan dipelajari dan bagaimana (apa) batasannya. Begitu juga jika akan mempelajari pengetahuan perpajakan, maka haruslah diketahui dulu apa pajak itu.⁴³

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama.⁴⁴ Dari sekian banyak definisi tentang pajak tersebut, dalam penelitian ini hanya akan diambil satu definisi saja. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak ditinjau dari segi hukum adalah :

“Perikatan yang timbul karena Undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU (*TATBESTAND*) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong-penghambat) untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan.”⁴⁵

Dari definisi diatas ada beberapa unsur didalamnya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada, yaitu :

⁴³ Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, PT. Eresco, Bandung, 1993, halaman 83.

⁴⁴ Munawir, *op. cit.*, halaman 3.

⁴⁵ Untung Sukardji, *op. cit.*, halaman 2.

Unsur pertama, tatbestand. *Tatbestand* ini dapat berupa perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa dalam masyarakat (yang menimbulkan hutang pajak)⁴⁶

Tatbestand yang dimaksud diatas dapat diberikan contoh sebagai berikut :

- a. Perbuatan : dilakukannya penyerahan barang atau jasa dari pabrik atau pengusaha jasa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa.
- b. Keadaan : adanya bumi dan bangunan pada suatu negara menimbulkan Pajak Bumi dan Bangunan, adanya penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan, adanya kendaraan bermotor dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor.⁴⁷
- c. Peristiwa : meninggalnya pewaris. Sejak saat meninggalnya si pewaris, maka harta warisan yang belum terbagi merupakan obyek pajak penghasilan dan dikenakan pajak. Jika warisan itu sudah dibagi-bagi kepada ahli warisnya maka tidak lagi terkena pajak.⁴⁸

Dalam hubungannya dengan *tatbestand* terdapat dua teori, yaitu:

1. Ajaran Material. Menurut ajaran ini hutang pajak timbul karena Undang-Undang⁴⁹ pada saat dipenuhi *TATBESTAND* (Kejadian, keadaan

⁴⁶ Sartan G., *Perpajakan, Pengantar Hukum Pajak Positif di Indonesia*, Djambatan, Semarang, 1980, halaman 4.

⁴⁷ Munawir, *op. cit*, halaman 33.

⁴⁸ H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1993, halaman 84.

⁴⁹ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, PT. Eresco, Bandung, 1965, halaman 36.

peristiwa).⁵⁰ Jadi menurut teori ini apabila *TATBESTAND* itu sudah dipenuhi, maka dengan sendirinya timbul hutang pajak.⁵¹ Menurut ajaran ini walaupun belum ada surat ketetapan Pajak, hutang pajak sudah ada.⁵² Ajaran ini cocok diterapkan untuk pajak-pajak tidak langsung. Sebagai contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Bea Meterai.⁵³

2. Ajaran Formal. Menurut ajaran ini, hutang pajak timbul karena Undang-Undang pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Dirjen Pajak. Jadi menurut ajaran ini, walaupun telah dipenuhinya persyaratan adanya subyek pajak yang mempunyai obyek pajak, utang pajak belumlah ada (timbul) apabila belum diterbitkan SKP oleh Dirjen Pajak⁵⁴. Dengan demikian selama belum ada SKP, belum ada hutang pajak walaupun *TATBESTAND* sudah dipenuhi⁵⁵

Unsur kedua, seseorang. Hal ini menunjuk kepada subjek pajak.

- Dalam hubungannya dengan judul tesis, maka yang dimaksud adalah subjek Pajak Pertambahan Nilai. Subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak⁵⁶ Secara lebih mendalam dapat dikatakan bahwa subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat-

⁵⁰ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, halaman 11.

⁵¹ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT.Eresco, Bandung, 1987, halaman 5 - 6.

⁵² Suwito Ardiyanto, *Dasar-Dasar Kepajakan Negara*, CV. Nur Cahaya, Jakarta, 1981.

⁵³ Eko Lasmana, *Sistem Perpajakan di Indonesia*, Edisi Kedua, Prima Campus Grafika, Jakarta, 1994, halaman 32 - 33.

⁵⁴ Tulis S. Meliala, *Perpajakan Dalam Teori dan Praktek*, CV. Yrama Widya Dharma, Bandung, 1991, halaman 32 - 33.

⁵⁵ Rochmat Soemitro, *op. cit.*, halaman 5 - 6.

⁵⁶ Imam Wahyutomo, *Pajak*, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 1994, halaman 10.

syarat subjek, yaitu yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia⁵⁷. Subjek pajak baru menjadi wajib pajak kalau ia sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif⁵⁸. Dengan demikian pengertian subjek pajak adalah lain daripada pengertian wajib pajak⁵⁹. Wajib pajak itu sendiri adalah subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif, jadi memenuhi *Tatbestand* yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi jika kita rumuskan, wajib pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif. Orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif merupakan subjek pajak, tetapi belum tentu merupakan wajib pajak sebab untuk menjadi wajib pajak, subjek pajak itu harus memenuhi syarat objektif⁶⁰.

Pada dasarnya dalam pengenaan pajak tidak langsung tidak dikenal subjek pajak karena dikenakan atas peristiwa atau kegiatan. Jika timbul kegiatan kena pajak maka baru terutang pajak, tanpa melihat orangnya. Akan tetapi terhadap utang pajak tersebut harus ditetapkan penanggung jawabnya, dan penanggung jawab tersebut yang disebut subjek pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak atau yang bertanggung jawab atas penyetoran pajak ke Kas Negara, berdasar Undang-undang PPN 1984 disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak.⁶¹ Dengan kata lain secara singkat dapat dikemukakan bahwa subjek pajak tidak langsung

⁵⁷ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, PT. Eresco, Bandung, 1986 halaman 78.

⁵⁸ *Ibid*, halaman 61.

⁵⁹ *Ibid*, halaman 60.

⁶⁰ *Ibid*, halaman 61 - 62.

adalah orang atau badan yang karena perusahaannya, profesinya, atau perbuatannya, mungkin memenuhi *Tatbestand* yang ditentukan oleh Undang-undang.⁶²

B. PEMBAGIAN JENIS-JENIS PAJAK, OBJEK PPN DAN SAAT TERUTANG PPN

Pembagian jenis-jenis pajak berikut ini hanyalah pembagian yang berhubungan erat dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Mengenai hal ini, pembagian pajak yang sangat populer adalah yang didasarkan pada mekanisme pemungutannya⁶³ atau pembagian menurut golongannya⁶⁴ atau pembagian dari segi siapa pihak yang menanggung bebannya⁶⁵. Berdasarkan pembagian ini, pajak dibagi kedalam Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Dalam pembagian ini dapat dilakukan dalam arti ekonomi, yuridis dan administrasi. Namun dalam hubungannya dengan permasalahan, dibawah ini hanya disebutkan dalam arti administrasi saja.

Dalam arti administrasi Pajak Langsung dikenakan secara berulang-ulang⁶⁶ hanya pada waktu-waktu tertentu (periodik)⁶⁷ dimulai dengan terjadi pemberian Surat Pemberitahuan (SPT) yang harus diisi

⁶¹ Munawir, *op. cit.*, halaman 214.

⁶² Rochmat Soemitro, *op. cit.*, halaman 78.

⁶³ Untung Sukardji, *op. cit.*, halaman 3.

⁶⁴ B. Usman dan K. Subroto, *Pajak-Pajak Indonesia*, Yayasan Bina Pajak, Jakarta, 1980, halaman 6.

⁶⁵ T. Gilarso, *Ekonomi Indonesia, Sebuah Pengantar I*, Kanisius, Yogyakarta, 1985, halaman 182.

⁶⁶ Munawir, *op. cit.*, halaman 22.

⁶⁷ Hartono Hadisoeperto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta, 1996, halaman 198.

oleh wajib pajak⁶⁸ atau surat ketetapan pajak yang memuat nama dan alamat wajib pajak, hari-hari pembayaran, besarnya pajak, tahun pajak, nomor ketetapan dan sebagainya.⁶⁹

Sedangkan dari segi administrasi Pajak Tidak Langsung baru terutang jika terjadi keadaan, perbuatan dan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak.⁷⁰

Sehingga dengan demikian pembagian kedalam Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung dapat bermanfaat untuk menentukan saat timbulnya hutang pajak.⁷¹ Hal ini disebabkan karena Pajak Langsung membutuhkan Surat Ketetapan Pajak, sedangkan Pajak Tidak Langsung cukup dengan adanya *Tatbestand* yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Sebagai contoh jenis-jenis pajak yang termasuk Pajak Langsung antara lain : Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).⁷² Selain pembagian jenis pajak menjadi Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, juga ada pembagian berdasarkan faktor yang sangat dominan untuk menentukan timbulnya kewajiban pajak. Berdasarkan hal tersebut Prof. Adriani membedakan antara Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Pajak Subjektif

⁶⁸ Marhainis Abdul Hay, *Dasar-Dasar Hukum Pajak*, Badan Penerbit-Unit Penerbitan Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta, 1984, halaman 82.

⁶⁹ Munawir, *loc. cit.*

⁷⁰ *Ibid*, halaman 23.

⁷¹ Hamdan Aini, *op. cit.*, halaman 16.

⁷² Bambang Surantono dan Muljadi P.S., *Pengetahuan Praktis Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 2.

adalah suatu jenis pajak yang kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh keadaan subjektif subjek pajak walaupun untuk menentukan timbulnya kewajiban membayar pajak tergantung pada keadaan objek pajaknya.⁷³ Dapat pula dirumuskan, Pajak Subjektif dimulai dengan menetapkan orangnya, baru kemudian dicari syarat-syarat objektifnya.⁷⁴ Dalam pajak ini, keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar.⁷⁵ Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak Penghasilan.⁷⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh objek pajak. Keadaan subjektif subjek pajak tidak relevan, walaupun dalam kasus-kasus tertentu ikut dipertimbangkan.⁷⁷ Dengan rumusan lain, Pajak Objektif dimulai dengan objeknya seperti keadaan, peristiwa, perbuatan dan lain-lain, baru kemudian dicari orangnya yang harus membayar pajaknya, yaitu subjeknya.⁷⁸ Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor dan lain sebagainya.⁷⁹ Secara lebih lengkap, yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu

⁷³ Untung Sukardji, *op. cit.*, halaman 3.

⁷⁴ Santoso Brotodihardjo, *op. cit.*, halaman 90.

⁷⁵ Munawir, *op. cit.*, halaman 32.

⁷⁶ Untung Sukardji, *loc. cit.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Santoso Brotodihardjo, *loc. cit.*

⁷⁹ Untung Sukardji, *loc. cit.*

jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yaitu adanya *tatbestand*. Adapun yang dimaksud dengan *tatbestand* adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama objek pajak. Sebagai Pajak Objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan. Pajak Pertambahan Nilai tidak membedakan antara konsumen berupa orang dengan badan, antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah. Sepanjang mereka mengkonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama, mereka diperlakukan sama.⁸⁰

Dari beberapa uraian diatas dapat mengarah pada objek PPN dan saat Terutang PPN. Secara umum dapat dikatakan yang menjadi objek PPN adalah "Penyerahan Barang atau jasa"⁸¹, yang berdasarkan uraian diatas merupakan *tatbestand*.

Tatbestand disini adalah khususnya perbuatan hukum berbentuk penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang ditentukan oleh dan Undang-Undang.

Seperti yang telah diuraikan diatas saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yaitu adanya *tatbestand*. Saat timbulnya kewajiban pajak ini sebenarnya adalah saat timbulnya hutang pajak atau

⁸⁰ *Ibid*, halaman 20.

⁸¹ Rinsky K. Judisseno, *op.cit.*, halaman 325.

saat terutang pajak. Mengetahui saat terutang adalah salah satu bagian penting untuk diketahui dalam melaksanakan pemotongan PPN. Dengan mengetahui kapan saat terutang dengan pasti berarti kita terhindar dari keraguan-raguan mengenai waktu pengenaannya.⁸² Penetapan saat terutang dan saat pembayaran PPN ini sebagai salah satu perwujudan kepastian hukum dari perpajakan, sehingga masyarakat tidak ragu-ragu lagi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Disamping itu juga, masyarakat terlebih lagi para kalangan dunia usaha (Pengusaha Kena Pajak) secara rutin serta juga secara administratif akan dapat merencanakan, mengelola serta melaksanakan kewajiban perpajakannya (*tax management*) dengan baik.⁸³

Ada dua macam cara dalam menentukan terhutangnya suatu jenis pajak, yaitu dengan cara menggunakan Prinsip Dasar Akrua (*Accrual Basis*) dan/atau Prinsip Dasar Pelunasan (*Cash Basis*).⁸⁴

Accrual Basis : adapun yang dimaksud dengan prinsip akrual adalah bahwa pajak terutang pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau impor barang kena pajak, tanpa mengaitkannya dengan saat pembayaran, yakni meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya.⁸⁵

⁸² Rinsky K. Judisseno, *op.cit.*, halaman 331.

⁸³ Liberty Pandiangan, *op.cit.*, halaman 110.

⁸⁴ Saadudin Ibrahim dan Pranoto K., *Pajak Pertambahan Nilai, Suatu Peralihan dari Pajak Penjualan*, Jaya Persada, Jakarta, 1984, halaman 92.

⁸⁵ Liberty Pandiangan, *op.cit.*, halaman 111.

Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai dianut asas *Accrual Basis*, artinya pajak terhutang pada saat penyerahan barang / jasa, atau pada saat barang itu diimpor. Ini berarti bahwa barang/jasa sudah terhutang sejak terjadinya peristiwa penyerahan atau pengimporan barang tersebut, meskipun atas penyerahan tersebut belum sepenuhnya diterima pembayarannya.⁸⁶ Dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai tetap dikenakan baik sudah dibayar maupun tidak oleh pembeli.⁸⁷ Meskipun demikian, UU PPN 1984 menentukan pula tentang saat terhutangnya PPN atas penyerahan yang diterima sebelum dilakukan pernyataan BKP atau JKP. Ketetapanannya adalah terhutang pada saat terjadi pembayaran itu, yang berarti pula tidak dengan memperhatikan telah terjadi penyerahan BKP atau JKP sebagaimana ditentukan sebagai unsur terhutang pajak.⁸⁸

Cash Basis : sedangkan yang dimaksud dengan prinsip kas adalah pajak terhutang pada saat diterima pembayaran. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, maka telah dianggap terhutang pajak.⁸⁹

⁸⁶ Saadudin Ibrahim dan Pranoto K., *loc. cit.*

⁸⁷ Sophar Toruan, *Ensiklopedi Perpajakan Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996, halaman 2.

⁸⁸ B. Boediono, *op. cit.*, halaman 71.

⁸⁹ Liberty Pandiangan, *loc. cit.*

C. PAJAK KELUARAN DAN FAKTUR PAJAK

Didalam UU PPN 1984 menganut metode pengkreditan yang dikenal dengan nama credit method. Dalam credit method, dikenal adanya pajak yang dibayar pada saat perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan pajak yang dipungut pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Karena Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diperoleh tersebut merupakan masukan (*input*) untuk kegiatan usaha, maka pajak yang dibayar pada saat perolehannya dinamakan "PAJAK MASUKAN" (*input tax*).⁹⁰ Sehingga merupakan PPN yang terkait dengan transaksi perolehan/pemanfaatan BKP/JKP.⁹¹ Sebaliknya Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan kepada pihak lain selaku pembeli atau penerima jasa, merupakan produk (*output*) dari kegiatan usaha. Oleh karena itu pajak yang dipungut dinamakan "PAJAK KELUARAN" (*output tax*).⁹² Pajak Keluaran ini dengan rumusan lain, merupakan PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pihak lain.⁹³ Salah satu sarana penting dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berguna baik untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) sendiri, maupun juga bagi Direktorat Jenderal Pajak

⁹⁰ Untung Sukardji, *op. cit.*, halaman 32.

⁹¹ Agus Sambodo, *Kewajiban Perpajakan Bagi Badan Usaha dan Orang Pribadi, Tinjauan dari Sisi Wajib Pajak (dilengkapi dengan perlakuan akuntansi)*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, 1999, halaman 104.

⁹² Untung Sukardji, *loc. cit.*

⁹³ Liberty Pandiangan, *op. cit.*, halaman 56.

adalah apa yang disebut dengan Faktur Pajak. Dengan adanya Faktur Pajak ini syarat adanya Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak secara sah akan menjadi lebih diakui keberadaannya dalam PPN apabila timbul kewajiban perpajakan untuk PPN. Misalnya para Pengusaha Kena Pajak yang hendak melakukan pengkreditan Pajak Masukan, maka untuk dapat hal itu dilakukan haruslah didukung oleh adanya Faktur Pajak.⁹⁴

Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat impor Barang Kena Pajak. Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib, karena Faktur Pajak adalah bukti pungutan syah yang menjadi sarana pelaksanaan mekanisme pengkreditan PPN.⁹⁵ Tegas disini dikatakan "sebagai bukti pemungutan pajak" bukan "sebagai bukti pembayaran pajak", sebab seorang pembeli sudah menerima faktur pajaknya, sekalipun belum melakukan pembayarannya.⁹⁶ Jadi pengenaan atau pemungutan PPN harus didukung dengan bukti berupa faktur pajak.⁹⁷ Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, bagi orang pribadi dan badan yang tidak dikukuhkan

⁹⁴ Liberty Pandiangan, *op. cit.*, halaman 117.

⁹⁵ Tulis S. Meliala, *op. cit.*, halaman 106.

⁹⁶ Rochmat Soemitro, *Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi Revisi, PT. Eresco, Bandung, 1990, halaman 46.

⁹⁷ Muqodim, *Perpajakan*, Buku Dua, Edisi ke-2 (Revisi), UII Press, Yogyakarta, 1999, halaman 176.

sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak. Larangan membuat Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya.⁹⁸ Setiap pemungutan PPN, Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan wajib membuat "FAKTUR PAJAK". Bagi Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak, dinamakan "FAKTUR PAJAK KELUARAN". Sebaliknya, bagi Pengusaha Kena Pajak yang menerima, merupakan "FAKTUR PAJAK MASUKAN".⁹⁹

Pengadaan formulir faktur pajak harus disediakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dengan bentuk dan isi seperti yang telah ditentukan.¹⁰⁰

Selengkapnya fungsi faktur pajak tersebut adalah:

1. Sebagai bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat penyerahan pembayaran atau Impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
2. Sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh pembeli BKP atau JKP kepada PKP atau Direktorat Bea dan Cukai.

⁹⁸ Waluyo dan Bambang B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia, Penyesuaian dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Baru Tahun 2001*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, halaman 324.

⁹⁹ Untung Sukardji, *loc. cit.*

¹⁰⁰ Munawir, *op. cit.*, halaman 247.

3. Sebagai sarana pengawasan administrasi pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan baik oleh PKP penjual atau pengusaha jasa maupun yang dilakukan oleh pembeli atau penerima jasa.¹⁰¹

Dalam hubungannya dengan judul Tesis, terdapat dua macam Faktur Pajak, yaitu Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana.

Faktur Pajak Standar merupakan Faktur Pajak yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu Faktur Pajak Standar.¹⁰²

Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak yang digunakan sebagai tanda bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir.¹⁰³ Yang dimaksud dengan pembeli Barang Kena Pajak dan atau penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap adalah misalnya pembeli Barang Kena Pajak/penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui Nomor Pokok Wajib Pajaknya atau tidak diketahui nama dan atau alamat lengkapnya. Faktur Pajak Sederhana dapat berupa kontan, faktur penjualan, segi cash register,

¹⁰¹ Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, *op. cit.*, halaman 418.

¹⁰² Waluyo dan B. Irawan Ilyas, *loc. cit.*

karcis, kuitansi yang dipakai sebagai tanda bukti penyerahan atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan. Perlu diperhatikan bahwa Faktur Pajak Standar yang diisi dengan tidak lengkap bukan merupakan Faktur Pajak sederhana. Faktur Pajak Sederhana harus dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau pada saat pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.¹⁰⁴

D. PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA TELEKOMUNIKASI

Dasar hukum Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Telekomunikasi adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak Penjualan Atas Barang Mewah. UU ini kemudian kita kenal dengan UU PPN 1984. UU PPN 1984 yang dimaksud adalah sebagaimana telah diubah dua kali. Pertama adalah pada saat Reformasi Sistem Perpajakan Nasional Kedua dengan UU No. 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kedua adalah pada saat Reformasi Sistem Perpajakan Nasional Ketiga dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983

¹⁰⁴ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *op. cit.*, halaman 96.

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Selain itu juga berhubungan dengan UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah sebanyak dua kali dengan UU No. 9 Tahun 1994 untuk perubahan pertama dan UU No. 16 Tahun 2000 untuk perubahan kedua. Kemudian berhubungan pula dengan UU No. 3 Tahun 1989 yang kemudian digantikan oleh UU No. 36 Tahun 1999 yang keduanya tentang Telekomunikasi. Pengenaan yang dimaksud adalah pemberlakuan ketentuan UU PPN 1984 diatas terhadap Objek PPN yang diantaranya adalah penyerahan Jasa Telekomunikasi yang merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak (Pasal 1 angka 7 dan Pasal 4 huruf c).

Yang menjadi Subjek Pajak dalam hal ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP.¹⁰⁵ Sedangkan yang menjadi Objek Pajak adalah penyerahan Jasa Telekomunikasi yang merupakan salah satu jenis jasa yang atas penyerahannya dikenai PPN. Jadi penyerahan Jasa Telekomunikasi merupakan salah satu jenis penyerahan Jasa Kena Pajak yang merupakan Objek PPN yang sekaligus menentukan Saat Terutang Pajak. Dikatakan demikian karena Saat Terutang Pajak untuk penyerahan Jasa Telekomunikasi adalah saat penyerahan Jasa Kena Pajak.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *op. cit.*, halaman 328 - 329.

¹⁰⁵ Muqodim, *Perpajakan*, Buku 2, *op. cit.*, halaman 155.

¹⁰⁶ Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *op. cit.*, halaman 289.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A. TINJAUAN UMUM PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.

A.1. SEJARAH SINGKAT PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.¹⁰⁷

Cikal bakal TELKOM adalah suatu badan usaha bernama *Post-en Telegraafdienst* yang didirikan dengan Staatsblad No. 52 tahun 1884. Penyelenggaraan telekomunikasi di Hindia Belanda pada waktu itu pada mulanya diselenggarakan oleh swasta. Bahkan sampai tahun 1905 tercatat 38 perusahaan telekomunikasi, yang pada tahun 1906 diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan berdasarkan Staatsblad No.395 tahun 1906. Sejak itu berdirilah *Post, Telegraaf en Telefoondients* atau disebut **PTT - Dienst**. *PTT – Dienst* ditetapkan sebagai Perusahaan Negara berdasarkan Staatsblad No. 419 tahun 1927 tentang *Indonesische Bedrijvenwet* (I.B.W. Undang-undang Perusahaan Negara).

Jawatan PTT ini berlangsung sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.19 tahun 1960 oleh Pemerintah Republik Indonesia, tentang persyaratan suatu perusahaan Negara dan *PTT–Dienst* memenuhi syarat untuk tetap menjadi suatu

¹⁰⁷ PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., *Album Pembangunan Telekomunikasi*, diterbitkan Kerjasama dengan Yayasan Karya Adiguna, Bandung, 1997, halaman 4 - 7.

Perusahaan Negara (PN). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961, tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi disebutkan, bahwa Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.B. dilebur kedalam ***Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN. Pos dan Telekomunikasi)***.

Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah memandang perlu untuk membagi PN Pos dan Telekomunikasi untuk menjadi 2 (dua) Perusahaan Negara yang berdiri sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965, maka berdirilah Perusahaan Pos dan Giro (PN. Pos dan Giro) dan pendirian ***Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN. Telekomunikasi)*** diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965. Bentuk inipun dikembangkan menjadi ***Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi*** melalui Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974. Dalam peraturan tersebut dinyatakan pula Perusahaan Umum Telekomunikasi sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri maupun luar negeri. Tentang hubungan telekomunikasi luar negeri pada saat itu juga diselenggarakan oleh *PT. Indonesian Satellite Corporation (Indosat)*, yang masih berstatus perusahaan asing, yakni dari *American Cable & Radio Corporation*, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan negara bagian *Delaware*, Amerika Serikat.

Seluruh saham PT. Indosat dengan modal asing ini pada akhir tahun 1980 dibeli oleh Negara Republik Indonesia dari *American Cable &*

Radio Corporation. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1980 tentang telekomunikasi untuk umum yang isinya tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1974. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1980, PERUMTEL ditetapkan sebagai badan usaha yang berwenang menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum dalam negeri dan Indosat ditetapkan sebagai badan usaha penyelenggara telekomunikasi untuk umum International.

Memasuki Repelita V pemerintah merasakan perlunya percepatan pembangunan telekomunikasi, karena sebagai infrastruktur diharapkan dapat memacu pembangunan sektor lainnya. Selain hal tersebut penyelenggaraan telekomunikasi membutuhkan manajemen yang lebih profesional, oleh sebab itu perlu menyesuaikan bentuk perusahaan. Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, maka bentuk Perusahaan Umum (PERUM) dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 9 tahun 1969. Sejak itulah berdirilah **Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia atau TELKOM**.

Mengantisipasi era globalisasi, seperti diterapkannya perdagangan bebas baik internasional, maupun regional, maka TELKOM pada tahun 1995 ini melaksanakan tiga program besar secara simultan. Program-program tersebut adalah restrukturisasi internal, penerapan Kerja Sama

Operasi (KSO) dan persiapan Go Public / International atau dikenal dengan Initial Public Offering.

A.1.1. Restrukturisasi Internal TELKOM

Restrukturisasi Internal meliputi bidang usaha sekaligus pengorganisasiannya. Bidang usaha TELKOM dibagi tiga, yaitu bidang usaha utama, bidang usaha terkait dan bidang usaha pendukung. Bidang usaha utama TELKOM adalah menyelenggarakan jasa telepon lokal dan jarak jauh dalam negeri, sedangkan bidang terkait termasuk Sistem Telepon Bergerak Selular (STBS), sirkuit langganan, teleks, penyewaan transponder satelit, VSAT dan jasa nilai tambah tertentu.

Bidang usaha terkait ini ada yang diselenggarakan TELKOM dan ada juga yang diselenggarakan bekerja sama dengan pihak ketiga melalui perusahaan patungan. Sedangkan bidang usaha pendukung adalah bidang usaha yang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan jasa telekomunikasi, namun keberadaannya mendukung kelancaran bidang usaha utama dan bidang terkait, yang termasuk dalam bidang pendukung adalah pelatihan, sistem informasi, atelir, properti, riset teknologi informasi.

Untuk menampung bidang-bidang usaha tersebut, maka sejak 1 Juli 1995 TELKOM telah menghapuskan struktur Wilayah Usaha Telekomunikasi (WITEL) dan secara defacto meresmikan dimulainya era Divisi. Sebagai pengganti WITEL, bisnis bidang utama dikelola oleh tujuh

Divisi Regional dan satu Divisi Network, Divisi Regional menyelenggarakan jasa telekomunikasi diwilayahnya masing-masing, sedangkan Divisi Network menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh dalam negeri melalui pengoperasian jaringan transmisi jalur utama nasional.

Divisi Regional TELKOM mencakup wilayah-wilayah yang dibagi sebagai berikut :

1. Divisi Regional I, Sumatera
2. Divisi Regional II, Jakarta dan Sekitarnya
3. Divisi Regional III, Jawa Barat
4. Divisi Regional IV, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Divisi Regional V, Jawa Timur
6. Divisi Regional VI, Kalimantan
7. Divisi Regional VII, Kawasan Timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Maluku dan Irian Jaya

Masing-masing Divisi dikelola oleh suatu tim manajemen yang terpisah berdasarkan prinsip desentralisasi serta bertindak sebagai pusat investasi (Divisi Regional) dan pusat keuntungan (Divisi Network dan Divisi lainnya) serta mempunyai laporan keuangan internal yang terpisah. Sedangkan Divisi-divisi Pendukung terdiri dari Divisi Pelatihan, Divisi Properti, Divisi Sistem Informasi. Beralihnya kebijakan sentralisasi ke kebijakan dekonsentrasi dan desentralisasi kewenangan maka struktur

dan fungsi kantor Pusat juga mengalami perubahan. Berdasarkan organisasi Divisional ini, maka Kantor Pusat diubah menjadi pusat **biaya** (*cost centre*). Berlakunya kebijakan dekonsentrasi menjadikan jumlah sumber daya manusia Kantor Perusahaan juga menjadi lebih sedikit.

Kantor Perusahaan TELKOM berdasarkan akte perubahan yang terakhir berkedudukan di Jl. Japati No. 1 Bandung, bertanggung jawab atas penyampaian, sasaran pengelolaan perusahaan melalui kegiatan unit kerja perusahaan secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan Divisi, Kantor Perusahaan hanyalah menetapkan hal-hal yang strategis, sedangkan penjabaran operasionalnya dilaksanakan oleh masing-masing Divisi.

Struktur manajemen TELKOM, secara garis besar meliputi Kantor Perusahaan, Divisi Regional I s/d VII, Divisi Network, dan Divisi Pendukung. Kantor Perusahaan strukturnya sangat sederhana, hanya terdiri Dewan Direksi, yang dibantu kelompok Pengembangan Bisnis, Sekretaris Perusahaan Kepala Audit Internal dan beberapa Vice President.

A.1.2. Kerja Sama Operasi

Untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan sekaligus mengatasi pendanaannya, maka TELKOM mengikutsertakan swasta dalam pembangunan prasarana jaringan, penyediaan jasa-jasa khusus dan pelaksanaan operasinya. Partisipasi swasta sampai saat ini dikenal

dalam bentuk pola bagi hasil (PBH), perusahaan patungan dan Kerja Sama Operasi (KSO). KSO ini merupakan suatu organisasi kemitraan yang tidak membentuk suatu badan hukum, namun tetap sebagai suatu Divisi dari TELKOM. Divisi-divisi dari KSO meliputi Divisi Regional I Sumatera, Divisi Regional III Jawa Barat, Divisi Regional IV Jawa Tengah & DIY, Divisi VI Kalimantan dan Divisi VII Kepulauan, Divisi KSO dikelola oleh mitra KSO, yang merupakan konsorsium dari beberapa perusahaan dari dalam dan luar negeri. Maka KSO ditetapkan selama 15 tahun, dan pada akhir masa KSO seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan Mitra KSO yang berkaitan dengan sarana/jaringan baru dan semua pekerjaan yang sedang berjalan dialihkan kepada TELKOM. Dari 5 juta SST yang harus dibangun selama REPELITA VI, 2 juta SST akan dilaksanakan oleh Mitra KSO.

A.1.3. Initial Public Offering (IPO)

Keputusan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui pasar modal, baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan cara menjual saham TELKOM, yang keputusannya dituangkan dalam Akta Berita Acara No. 52, tanggal 17 Juli 1995, yang dibuat oleh notaris Imas Fatimah, SH. Untuk itu TELKOM mencatatkan saham-saham yang ditawarkan di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, New York Stock Exchange dan London Stock Exchange.

Saham yang dikeluarkan TELKOM terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham seri B. Saham seri Dwiwarna yang jumlahnya hanya 1 (satu) lembar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun juga.

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak istimewa, diantaranya menentukan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian para anggota Direksi yang dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan saham seri B adalah Atas Nama dan dapat dipindah tangankan.

Dalam kaitan IPO ini, khusus karyawan TELKOM mendapat penjatahan khusus sejumlah Saham seri B baru yang jumlahnya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum di Indonesia. Program pemilikan saham oleh karyawan atau *Employee Stock Ownership Plan (ESOP)*, mengharuskan karyawan tidak menjual saham yang diperoleh dalam jangka waktu 12 bulan (1 Tahun) setelah pencatatan saham pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Penerimaan bersih dari Emisi saham baru akan digunakan untuk membiayai program investasi perusahaan. Sekitar 39,22% digunakan untuk perluasan kapasitas transmisi dan sentral, penambahan kapasitas dan pengembangan jaringan kabel melalui penggantian kabel tembaga dengan kabel serat optik serta pengadaan wireless local loop. Selain itu 39,51% akan digunakan untuk

meningkatkan mutu pelayanan dan 21,27% dipersiapkan untuk pengembangan sistem teknologi baru serta peningkatan sumber daya manusia.

Semua usaha TELKOM ini untuk mengantisipasi dilaksanakannya perdagangan bebas baik Regional maupun Internasional, peningkatan kemampuan kompetitif ini diharapkan dapat menjadikan TELKOM menjadi salah satu Operator Telekomunikasi Kelas Dunia (*World Class Operator*).

A.2. KEGIATAN USAHA¹⁰⁸

Jasa telekomunikasi yang disediakan TELKOM dibagi dalam dua kelompok, jasa telekomunikasi dasar dan bukan dasar. Pengelompokan inipun belum dilaksanakan secara tegas, mengingat teknologi telekomunikasi dan informasi berkembang dengan pesat. Bisnis utama TELKOM sampai saat ini adalah menyediakan PSTN (*Public Switch Telephone Network*) dan menyelenggarakan jasa melalui PSTN.

Jenis jasa telekomunikasi yang sudah beroperasi sampai 1995 adalah :

1. Jasa Telepon Dalam Negeri,
2. Jasa Interkoneksi kepada Penyelenggara Telekomunikasi lain,
3. Jasa Telepon Bergerak Seluar
4. Jasa Satelit,
5. Jasa Lainnya.

¹⁰⁸ *Ibid.*

Jasa Telepon Dalam Negeri merupakan kegiatan usaha TELKOM yang memberikan pendapatan terbesar. Komposisi pendapatan jasa ini meliputi, biaya pasang, biaya abonemen (langganan) bulanan dan biaya pemakaian telepon untuk panggilan lokal jarak jauh. Dari catatan tahun 1994 ternyata kontribusi terbesar berasal dari biaya pemakaian telepon. Pelayanan jasa telepon dalam negeri ini juga termasuk penyediaan Telepon Umum, baik kartu maupun coin. Disamping memperoleh pendapatan dari pelanggan untuk jasa telepon dalam negeri, TELKOM juga menerima pendapatan interkoneksi dari penyelenggaraan telekomunikasi lainnya, seperti dari penyelenggara telekomunikasi internasional dan STBS (Sistem Telepon Bergerak Selular).

Pendapatan Interkoneksi diantaranya diperoleh dari PT.INDOSAT dan SATELINDO. Selain pendapatan Interkoneksi, TELKOM juga berpartisipasi dalam penyelenggaraan STBS, melalui usaha patungan ataupun dengan pola bagi hasil. Sementara itu penyewaan transponder Satelit, mulai 1996 akan beralih kepada SATELINDO, namun TELKOM terus melanjutkan jasa stasiun bumi untuk hubungan telekomunikasi melalui sistem satelit komunikasi.

Jasa telekomunikasi lainnya adalah VSAT, e-mail, calling cards, telex dan telegram. Jasa telex dan telegram dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan bergeser dengan penggunaan faksimili. Menghadapi kondisi ini TELKOM pun sudah menandatangani

memorandum of understanding dengan PT. Pos Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1995 mengenai pengalihan pengoperasian dan pengelolaan usaha telegraf.

A.3. VISI DAN MISI¹⁰⁹

A.3.1. Visi

TELKOM akan terus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui upaya perluasan dan pembaharuan jaringan yang berkelanjutan, serta terus berupaya mencari peluang-peluang baru di masa depan melalui pengembangan teknologi dan inovasi untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang akan menempatkan TELKOM sebagai pemimpin di bidang industri jasa telekomunikasi.

A.3.2. Misi

TELKOM menyediakan layanan telekomunikasi dan penyaluran informasi yang berkualitas, lengkap, terpadu, dan selalu berorientasi untuk memberikan hasil yang terbaik bagi pelanggan, pemilik, pegawai, dan lingkungan perusahaan (stakeholders).

A.4. TINJAUAN USAHA 1999¹¹⁰

Kondisi Ekonomi. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang jasa maupun manufaktur senantiasa akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di negara yang bersangkutan. Semua parameter ekonomi makro seperti tingkat inflasi, tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan

¹⁰⁹ PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., *Laporan Tahunan*, op. cit., halaman 2.

¹¹⁰ *Ibid*, halaman 5 - 10.

pendapatan nasional dan nilai tukar mata uang terhadap valuta asing, secara langsung dan tidak langsung dapat memberikan dampak terhadap hasil usaha. Kenyataan ini juga berlaku bagi TELKOM yang kegiatan usahanya adalah memberikan berbagai ragam jasa telekomunikasi.

Krisis ekonomi dan moneter yang mulai terjadi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada tahun 1998, telah menyebabkan merosotnya daya beli masyarakat sehingga mempengaruhi permintaan akan sambungan telepon dan layanan jasa telekomunikasi. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai parameter ekonomi makro sudah barang tentu juga mempengaruhi kinerja operasional dan keuangan Perusahaan.

Walaupun kondisi ekonomi tahun 1999 belum sepenuhnya menggembirakan, namun tanda-tanda awal pemulihan kondisi ekonomi mulai dirasakan. Tingkat inflasi yang menurun, diikuti turunnya suku bunga pinjaman dan membaiknya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, memberikan dampak positif bagi TELKOM yaitu hasil usaha yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Persaingan. Dalam perekonomian yang semakin maju dan terbuka, terjadinya persaingan di lingkungan usaha akan semakin ketat guna mendorong terjadinya peningkatan kualitas produk, kualitas layanan, serta meningkatkan efisiensi. Dibentuknya *World Trade Organization (WTO)*, *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, dan *Asian Free*

Trade Area (AFTA), yang perjanjiannya telah diratifikasi oleh Pemerintah RI pada dasarnya merupakan kesepakatan untuk mewujudkan pasar terbuka secara bertahap agar tercipta lingkungan usaha yang bersaing baik dalam cakupan regional maupun global. Perlu pula dipahami bahwa dengan telah ikutnya Pemerintah meratifikasi berbagai kesepakatan itu, sektor jasa telekomunikasi juga akan segera terbuka dengan konsekuensi masuknya pesaing regional maupun global.

Menyadari hal itu Pemerintah telah memperbaharui regulasi dengan menerbitkan Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagai pengganti atas Undang-undang No. 3 Tahun 1989. Nuansa Undang-undang tentang Telekomunikasi yang baru itu adalah : pro-kompetisi; liberalisasi sektor telekomunikasi; peningkatan peran swasta; pembukaan akses pasar domestik secara bertahap, serta kecenderungan pengaturan sektor yang berorientasi pada mekanisme pasar. Sebagai Badan Penyelenggara, tentunya TELKOM harus segera menyesuaikan diri agar dapat tetap tumbuh dan berkembang dan era kompetisi ini.

Dalam Undang-undang No. 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi yang akan berakhir pada bulan September 2000, tidak tampak dengan jelas adanya kemungkinan persaingan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Hal ini dikarenakan Undang-undang tersebut menyatakan bahwa TELKOM menjadi satu-satunya Badan Penyelenggara Jasa

Telekomunikasi Dalam Negeri dan semua penyelenggara jasa telekomunikasi dasar diharuskan bekerjasama dengan TELKOM. Keadaan yang demikian inilah yang mengakibatkan TELKOM memiliki saham hampir di semua perusahaan jasa telekomunikasi.

Dalam kenyataannya, selama ini TELKOM menghadapi persaingan dengan "perusahaan telekomunikasi lain" yang juga adalah anak perusahaan TELKOM. Pelanggan jasa telepon selular misalnya, telah berkembang pesat dengan pertumbuhan yang sangat tinggi.

Pada posisi akhir tahun 1999, jumlah sambungan telepon seluler telah mencapai lebih dari 2.000.000 satuan sambungan dan meningkat dua kali bila dibandingkan dengan posisi akhir tahun 1998. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, pertumbuhan jumlah pelanggan seluler mencapai rata-rata 80,19% per tahun. Sementara itu, jumlah satuan sambungan telepon TELKOM (*Fixed Wirelines*) selama lima tahun terakhir hanya tumbuh sebesar rata-rata 16,59% per tahun.

Gambaran tersebut menandakan bahwa sambungan telepon seluler bukan lagi merupakan pelengkap terhadap kebutuhan sambungan telepon tetap, tetapi telah menjadi alternatif dan substitusi bagi sambungan telepon yang dijual TELKOM. Demikian pula jasa sirkit langganan dan jasa transponder satelit telah dapat ditawarkan oleh beberapa perusahaan yang juga merupakan anak perusahaan TELKOM.

Keadaan pasar seperti ini tentunya pantas disebut sebagai suatu "persaingan terselubung".

Mencermati hal tersebut, TELKOM seyogyanya perlu meninjau kembali kepemilikan sahamnya di anak-anak perusahaan karena secara "tidak sengaja " banyak diantaranya telah menjadi pesaing TELKOM.

Strategi. Pemilihan strategi di dalam menjalankan usaha, pada dasarnya merupakan suatu hal yang sangat penting dan dalam pelaksanaannya harus senantiasa memperhatikan kondisi ekonomi dan persaingan yang ada. Hal ini menjadi lebih penting lagi apabila perusahaan dihadapkan kepada suatu "persaingan terselubung" seperti yang terjadi antara TELKOM dengan anak-anak perusahaannya, karena setiap rencana investasi maupun operasional akan dihadapkan kepada pilihan apakah akan dilakukan oleh TELKOM sendiri atau melalui anak-anak perusahaannya. Berkaitan dengan hal itu, maka perencanaan di berbagai sumber daya, yaitu sarana produksi, sumber daya manusia, dan dana yang diperlukan TELKOM untuk menghasilkan apa-apa yang dibutuhkan masyarakat adalah ssuatu hal yang juga amat penting dan mendapatkan prioritas pemikiran yang utama.

Selama tahun 1999 yang kondisi ekonominya belum pulih sepenuhnya, TELKOM tetap menerapkan strategi konsolidasi. Karena itu Perusahaan senantiasa berhati-hati dalam mengambil keputusan yang menyangkut rencana investasi berskala besar dan kegiatan operasional

yang akan mempengaruhi beban usaha. Strategi ini telah terasa sekali manfaatnya dan efektif dalam upaya bertahan untuk tetap eksis pada saat kondisi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bahkan dengan strategi tersebut, TELKOM telah berhasil mempersiapkan berbagai sumber daya yang dimaksud guna menghadapi masa depan yang sudah dapat diperkirakan akan memiliki tingkat persaingan yang lebih tinggi lagi.

Sarana produksi yang sekaran dimiliki TELKOM seperti ribuan kilometer jaringan terestrial berupa kawat tembaga dan serat optik di tanah, di udara, maupun di laut, *microwave*, satelit, dan berbagai sarana penunjang lainnya merupakan aset pokok yang diperlukan dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi. Dengan semua aset itulah TELKOM memberikan pelayanannya kepada para pelanggan berupa jasas percakapan telepon biasa maupun jasa-jasa baru lainnya yang dikenal dengan istilah multimedia seperti data, gambar, serta kebutuhan khusus lainnya yang merupakan inovasi mutakhir teknologi telekomunikasi.

Sumber daya lainnya yang tidak ternilai harganya adalah manusia yang akan mengoperasikan dan menjalankan semua sarana produksi. Seluruh jajaran karyawan yang telah menjalani bermacam ragam pendidikan dan pelatihan diharapkan memiliki kemampuan dan kenadalan yang tinggi dalam bekerja. Sejalan dengan kesejahteraan yang diberikan Perusahaan kepada para karyawan, maka motivasi, dedikasi,

loyalitas, dan integritas yang dimiliki karyawan juga diperkirakan mempunyai kadar kualitas yang tinggi pula. Di samping itu diyakini pula bahwa semua sumber daya manusia yang ada di TELKOM mampu mengantisipasi semua perubahan paradigma dilingkungan usaha dengan cara menyesuaikan diri untuk berpandangan luas dan berkeinginan untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan semua mitra kerja yang ada.

Dana merupakan sumber daya yang juga sangat penting dalam menjalankan usaha, sebab semua sarana produksi dan sumber daya manusia tidak akan mungkin dioperasikan tanpa adanya dana. Arti penting dari pada dana ini menjadi lebih tinggi karena pada umumnya ketersediaan dana di dalam perekonomian selalu terbatas bila dihadapkan kepada kebutuhan yang diperlukan. Sangatlah disyukuri bahwa pada akhir tahun 199 ini, TELKOM mampu mempersiapkan dana yang jumlahnya diharapkan cukup untuk digunakan dalam menghadapi masa depan.

A.5. IKHTISAR PER TRIWULAN TAHUN 1999¹¹¹

Triwulan Pertama

Dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, dapat diketahui bahwa Pendapatan Usaha Perusahaan meningkat sebesar 14,27% menjadi sebesar Rp.1.753,4 milyar. Komponen terbesar

¹¹¹ *Ibid*, halaman 11 - 15

Pendapatan Usaha pada triwulan ini adalah Pendapatan Telepon yaitu sebesar 58,94%, diikuti oleh Pendapatan KSO sebesar 23,45%, Pendapatan Jasa Telekomunikasi Lainnya sebesar 9,39% dan Pendapatan Interkoneksi sebesar 8,22%. Sementara itu, Beban Usaha meningkat sebesar 15,44% menjadi Rp 990,24 milyar. Dengan demikian pada triwulan ini Perusahaan memperoleh Laba Usaha sebesar Rp 763,16 milyar.

Adapun Beban Lain-lain Bersih turun sebesar 67,25% menjadi Rp 415,13 milyar bila dibandingkan dengan triwulan pertama tahun lalu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya Rugi Kurs sebesar 86,56% yaitu dari Rp 1.162,25 milyar menjadi Rp 156,20 milyar.

Laba Bersih pada triwulan ini adalah sebesar Rp 306,04 milyar yang merupakan suatu titik balik dari Rugi Bersih sebesar Rp 398,88 milyar yang dialami pada triwulan yang sama tahun lalu.

Penambahan *Installed Lines* selama triwulan pertama ini berjumlah 45.560 satuan sambungan, sedangkan jumlah *Lines In Service* bertambah sebanyak 75.053 satuan sambungan atau turun sebesar 43,3% bila dibandingkan dengan penambahan sebanyak 132.458 pada triwulan pertama tahun lalu. Selama triwulan pertama ini, terjadi pencabutan sambungan telepon sebanyak 69.676 satuan sambungan. Produksi pulsa selama triwulan pertama ini berjumlah 14,660 milyar pulsa.

Triwulan Kedua

Sampai dengan akhir triwulan kedua, Pendapatan Usaha meningkat sebesar Rp 33731,9 milyar bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Untuk periode ini, Pendapatan Telepon tetap merupakan komponen terbesar dari Pendapatan Usaha, yaitu sebesar 57,30%, diikuti oleh Pendatan KSO sebesar 22,28%, Pendapatan Interkoneksi sebesar 11,03% dan Pendapatan Jasa Telekomunikasi Lainnya sebesar 9,39%. Sementara itu, Beban Usaha meningkat sebesar 22,78% menjadi Rp 2.139,0 milyar. Hingga triwulan kedua ini Perusahaan memperoleh Laba Usaha sebesar Rp 1.592,9 atau meningkat sebesar 6,59% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sampai dengan akhir triwulan kedua tahun ini Perusahaan memperoleh Pendapatan Lain-lain Bersih sebesar Rp 329,4 milyar yang merupakan perubahan mendasar dari Beban Lain-lain Bersih berjumlah Rp 3.262,7 yang terjadi tahun lalu. Perubahan yang luar biasa ini terutama disebabkan oleh membaiknya nilai tukar Rupiah, sehingga Rugi Kurs yang pada akhir triwulan kedua 1998 berjumlah Rp 2.933,2, berubah menjadi Laba Kurs sebesar Rp 514,5 milyar pada akhir triwulan kedua 1999. Di samping itu Pendapatan Bunga meningkat sebesar 127,0% yaitu dari Rp 183,2 milyar yang tercatat sampai dengan akhir triwulan kedua 1988 menjadi Rp 415,8 milyar untuk periode yang sama tahun 1999. Laba

Bersih sampai dengan akhir triwulan kedua ini berjumlah Rp 1.473,9 milyar yang juga merupakan suatu perubahan yang sangat mendasar bila dibandingkan dengan Rugi Bersih sebesar Rp 1.176,7 milyar yang dialami Perusahaan tahun lalu.

Penambahan *Installed Lines* sampai dengan akhir triwulan kedua ini mencapai 123.926 satuan sambungan. Sedangkan jumlah *Lines In Service* sampai akhir triwulan kedua 1999 bertambah besar 187.136 satuan sambungan atau turun sebesar 25,1% bila dibandingkan dengan penambahan sebanyak 249.911 untuk periode yang sama tahun lalu. Selama dua triwulan ini, pencabutan sambungan telepon berjumlah 127.644, satuan sambungan. Produksi pulsa selama dua triwulan ini berjumlah 29,641 milyar pulsa.

Triwulan Ketiga

Sampai dengan akhir triwulan ketiga, Pendapatan Usaha meningkat sebesar 18,7% menjadi sebesar Rp 5.740,6 milyar bila dibandingkan dengan tahun lalu. Pendapatan Telepon masih tetap memberi kontribusi terbesar yaitu 58,3% dari total Pendapatan Usaha, diikuti oleh Pendapatan KSO sebesar 21,90%, Pendapatan Interkoneksi sebesar 11,00% dan Pendapatan Jasa Telepon Lainnya sebesar 8,77%. Sementara itu, Beban Usaha mengalami peningkatan sebesar 19,24% menjadi Rp 3.221,8 milyar bila dibandingkan dengan tahun lalu. Laba Usaha yang diperoleh Perusahaan sampai dengan triwulan ketiga adalah

sebesar Rp 2.518,9 milyar atau meningkat sebesar 18,03% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Beban Lain-lain Bersih mengalami penurunan sebesar 64,70%, yaitu menjadi Rp 641,4 milyar bila dibandingkan dengan tahun lalu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh terjadinya penurunan Rugi Kurs sebesar 85,42%, yaitu dari Rp 1.560,3 milyar sampai akhir triwulan ketiga tahun lalu menjadi Rp 227,6 milyar untuk periode yang sama tahun ini.

Laba Bersih sampai akhir triwulan ketiga ini adalah sebesar Rp 1.474,0 milyar atau meningkat sebesar 352,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Penambahan *Installed Lines* sampai akhir triwulan ketiga ini berjumlah 155.266 satuan sambungan, sedangkan jumlah *Lines In Service* bertambah sebesar 376.698 satuan sambungan atau turun sebesar 14,8% bila dibandingkan dengan penambahan sebanyak 442.088 pada periode yang sama tahun lalu. Selama tiga triwulan ini pencabutan sambungan telepon berjumlah 185.014 satuan sambungan. Produksi pulsa selama tiga triwulan ini berjumlah 46,143 milyar pulsa.

Triwulan Keempat

Sampai dengan akhir triwulan ini, Perusahaan memperoleh Pendapatan Usaha sebesar Rp 7.790,2 milyar atau meningkat sebesar 18,03% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan Telepon senantiasa merupakan komponen terbesar dari Pendapatan

Usaha, yaitu sebesar 58,1%, diikuti oleh Pendapatan KSO sebesar 21,6%, Pendapatan Interkoneksi sebesar 11,4%, dan Pendapatan Jasa Telekomunikasi Lainnya sebesar 8,9%. Sementara itu, Beban Usaha meningkat sebesar 21,2% menjadi Rp 4.846,7 milyar. Dengan demikian Laba Usaha sampai dengan akhir triwulan keempat ini adalah sebesar Rp 2.943,5 milyar atau meningkat sebesar 13,2% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan Lain-lain Bersih adalah sebesar Rp 19,2 milyar yang merupakan suatu titik balik dari Beban Lain-lain Bersih sebesar Rp 1.175,3 milyar yang dialami Perusahaan pada tahun sebelumnya. Perubahan yang mendasar ini terutama disebabkan karena Perusahaan memperoleh Laba Kurs sebesar Rp 280,2 milyar dan anak perusahaan memberi kontribusi positif sebesar Rp 424,8 milyar. Sedangkan pada akhir tahun 1998 Perusahaan mengalami Rugi Kurs sebesar Rp 965,5 milyar dan anak perusahaan hanya memberi kontribusi positif sebesar Rp 7,1 milyar.

Laba Bersih untuk tahun ini adalah sebesar Rp 2.173,3 milyar atau meningkat sebesar 85,9% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Penambahan *Installed Lines* sampai dengan akhir triwulan keempat 1999 berjumlah 232.163 satuan sambungan, sedangkan jumlah *Lines In Service* bertambah sebanyak 508.549 satuan sambungan atau

turun sebesar 13,7% bila dibandingkan dengan penambahan sebanyak 5589.178 satuan sambungan selama periode yang sama tahun lalu. Selama tahun 1999 ini terjadi pencabutan sambungan telepon sebanyak 232.343 satuan sambungan. Produksi pulsa selama empat triwulan ini berjumlah 62,429 milyar pulsa.

A.6. STRUKTUR USAHA¹¹³

Usaha	Divisi I (Sumatera)
Utama	Divisi II (Jakarta)
	Divisi III (Jawa Barat)
	Divisi IV (Jawa Tengah)
	Divisi V (Jawa Timur)
	Divisi VI (Kalimantan)
	Divisi VII (Kawasan Timur Indonesia)
	Divisi Network

Usaha	Divisi Sistem Informasi
Pendukung	Divisi Pelatihan
	Divisi Properti
	Divisi Atelir
	Divisi Riset dan Teknologi
	Divisi Pembangunan
	Divisi Multimedia

Usaha	Anak Perusahaan
Terkait	
Lainnya	

A.7. ANAK PERUSAHAAN¹¹⁴

Besarnya kepemilikan TELKOM pada anak perusahaan per 31 Desember 1999 adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Nama Perusahaan

Kepemilikan
Telkom (%)

Jenis Layanan

¹¹³ *Ibid*, halaman 20.

¹¹⁴ *Ibid*, halaman 21.

PT Telekomunikasi Selular	42,72	Penyedia jasa telepon selular nasional dengan sistem GSM
PT Satelit Palapa Indonesia	22,90	Penyedia jasa telepon selular dengan sistem GSM; Penyedia jasa sambungan telepon internasional dan layanan sewa satelit domestik dan internasional
PT Komunikasi Selular Indonesia	35,00	Penyedia jasa telepon selular regional dengan sistem AMPS
PT Metro Selular Indonesia	20,17	Penyedia jasa telepon selular regional dengan sistem AMPS
PT Mobile Selular Indonesia	25,00	Penyedia jasa telepon selular regional sistem NMT-450S
PT Radio Telepon Indonesia	13,00	Penyedia jasa telekomunikasi regional, dengan sistem fixed wireless
PT Telekomindo Primabhakti	9,00	Holding company yang memiliki jenis usaha antara lain penyedia jasa telepon dengan sistem GSM nasional, PBH untuk sambungan tetap dan beberapa jenis jasa keuangan dan perhotelan
PT Pasifik Satelit Nusantara	22,57	Penyedia jasa sewa transponder satelit dan jasa komunikasi satelit.
PT Aplikanusa Lintasarta	37,66	Penyedia jasa komunikasi VSAT, e-mail, digital data network, dan electronic banking system
PT Citra Sari Makmur	25,00	Penyedia jasa komunikasi

		VSAT dan konsultan bidang teknologi telekomunikasi
PT Patra Telekomunikasi	30,00	Penyedia jasa komunikasi VSAT untuk industri perminyakan
PT Infomedia Nusantara	51,00	Penyedia jasa informasi telekomunikasi
PT Batam Bintang Telekomunikasi	5,00	Penyedia jasa sambungan telepon tetap di Pulau Batam
PT Bangtelindo	3,18	Penyedia jasa konstruksi dan konsultan
PT Menara Jakarta	20,00	Penyedia infrastruktur untuk jasa multimedia di Jakarta
PT Multimedia Nusantara	31,00	Penyedia jasa multimedia
PT Indonusa Telemedia	35,00	Penyedia jasa multimedia
PT Napsindo Primatel Internasional	32,00	Penyedia jasa network access point
PT Tangara Mitrakom	25,00	Penyedia jasa komunikasi VSAT

B. PT TELKOM DIVRE IV JATENG DAN DIY¹¹⁵

B.1. PROFIL UNIT KS0 DIVRE IV

B.1.1. Organisasi

Kerja sama operasi (KSO) antara PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Divisi Regional IV Jawa Tengah dan DIY dengan Mitra KSO (MGTI) telah berjalan selama empat tahun, dimana selama periode

¹¹⁵ PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY, *Laporan Tahunan 1999 - 2000*, Semarang 1999, halaman 2 - 22.

tersebut secara organisasi telah banyak mengalami perubahan baik dalam struktur organisasi maupun mekanisme kerjanya. Sesuai dengan perjanjian KSO, unit KSO Divre IV dioperasikan dibawah manajemen, pengawasan, kendali dan tanggung jawab Mitra. *General Manager (GM)* selaku pimpinan Unit KSO Divre IV yang dibantu oleh *Deputy General Manager (DGM)* yaitu *DGM Operation, DGM Marketing & Sales, DGM Finance & Administration, DGM Human Resource & Training, DGM Business Development* dan Kepala Indikator. Wilayah geografis Unit KSO Divre IV dibagi dalam 5 (lima) Distrik Pelayanan Telekomunikasi (Distel) yaitu Semarang, Yogyakarta, Solo, Purwokerto, dan Pekalongan. Dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, Unit KSO Divre IV mempunyai 83 Area Work Group (AWG).

General Manager Unit KSO Divre IV mempunyai wewenang penuh dalam kegiatan pengelolaan sehari-hari melalui pengendalian keuangan dan operasi serta tanggung jawab unit KSO. Pola organisasi yang dianut adalah sentralisasi fungsi. Dengan pola sentralisasi ini dimana fungsi pendukung berpusat di Kantor Divisi dimana yang melaksanakan fungsi operasional adalah Distrik, sedangkan fungsi pendukung yang ada di Distrik merupakan pelaksanaan fungsi dari Kantor Divisi.

Dalam operasional harian Bidang Operasi mempunyai fungsi perencanaan, pengarahan dan kontrol operasi untuk mencapai tujuan

bisnis. Bidang *Marketing & Sales* mempunyai fungsi pengembangan, pengarahan, kontrol strategi bisnis dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai target pendapatan, penjualan serta keuntungan. Bidang *Finance & Administration* mempunyai fungsi pengarahan, kontrol, penilaian keuangan serta informasi guna memastikan kegiatan dan pengarahannya memenuhi tujuan perusahaan. Selain pengarahan, kontrol dan koordinasi kegiatan administrasi. *Human Resources & Training* dengan fungsi perencanaan, pengembangan, pengarahan program dan kebijakan SDM, serta implementasi prosedur untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan SDM. Sedangkan *Business Development* mempunyai fungsi perencanaan, pengembangan, analisa & evaluasi, integrasi, kontrol kegiatan pengembangan bisnis dan teknologi serta masalah-masalah strategis dan *research and development*. Fungsi evaluasi internal dilaksanakan oleh *Internal Auditor*.

B.1.2. VISI dan MISI

Untuk mewujudkan tujuan organisasi maka diperlukan suatu kesamaan pandang (persepsi) antara manajemen dengan seluruh karyawan. Perumusan konsep ini didasar adanya kepentingan antara pemilik perusahaan, manajemen dan karyawan serta sejalan dengan tuntutan kebutuhan pelanggan. Sinergis antara seluruh kepentingan ini menjadi dasar untuk menyatakan komitmen bersama dalam suatu Visi dan Misi perusahaan.

B.1.2.1. Visi

Perusahaan penyedia jasa komunikasi yang tangguh, terpercaya, peduli terhadap masyarakat serta berorientasi ke masa depan. (*"A strong and respected organization linking people to build their future, caring about customers, and committed to our community"*).

B.1.2.2. Misi

Bersama kita membangun sarana komunikasi untuk mendekatkan hubungan antar anggota masyarakat. (*"Together, we build communication links to bring people closer to each other"*)

B.1.3. NILAI-NILAI ORGANISASI

Dengan berpedoman pada Visi, Misi dan strategy manajemen Unit KSO Divre IV berupaya untuk mewujudkan komitmen untuk menjadi yang terbaik dengan Potensi yang dimilikinya melalui :

- Kerjasama
- Profesionalisme
- Integritas
- Kepedulian
- Inovatif

B.1.4. STRATEGI 4 KEUNGGULAN

Strategi yang digunakan dalam mencapai Visi, Misi dan Nilai-nilai organisasi yang akan diberlakukan di Unit KSO Divre IV serta MGTI dalam jangka pendek maupun menengah, mencakup 4 faktor utama yaitu:

- 1) **Keunggulan dalam pemahaman secara menyeluruh mengenai potensi dan pangsa pasar** dengan berbagai aktivitas antara lain : riset pasar untuk memenuhi kebutuhan pasar melalui, pengembangan produk baru, memberikan pelayanan khusus secara *end to end* kepada para pelanggan big bisnis, *Customer Satisfaction Survey*, peningkatan kualitas pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan internal maupun external Perusahaan.
- 2) **Keunggulan dalam Sumber Daya Manusia dan Kultur Organisasi** sesuai nilai-nilai bersama yang dianut perusahaan, dengan aktivitas antara lain peluncuran sistem manajemen *performance* dan remunerasi yang baru, *training Leadership line manager*, *Employee Opinion Survey*, *Realignment* Struktur Organisasi dan implementasi program-program komunikasi yang lebih baik.
- 3) **Keunggulan dalam optimalisasi nilai Ekonomi** secara seimbang dan menyeluruh berdasarkan pada prinsip Efektif dan Efisien dengan aktifitas antara lain kualitas data ADKAB, peningkatan ASR, ODS, sertifikasi ISO-9000 yang terkait langsung dengan *Sales* dan *Services* serta diversifikasi pelayanan produk.
- 4) **Keunggulan dalam pengembangan peraturan dan kebijakan organisasi maupun manajemen** dengan aktifitas antara lain terwujudnya komunikasi yang baik dari KSO IV & MGTI dan berkontribusi kepada masyarakat Jawa Tengah & DIY Yogyakarta;

kerjasama yang harmonis dengan pemerintah Daerah, DPR, dll; menjalin kerjasama dengan pemain ekonomi lain untuk membangun ekonomi Jawa Tengah & DI Yogyakarta; sosialisasi ke publik tentang kebijakan dalam industri telekomunikasi; serta komunikasi yang harmonis mengenai prinsip-prinsip KSO *Agreement* kepada seluruh karyawan.

B.2. TINJAUAN TAHUN 1999

B.2.1. UMUM

Strategi pengembangan yang diterapkan untuk mencapai *World best practices Company* pada tahun 2001, sebagai dasar kebijakan Unit KSO Divre IV dalam upayanya mencapai target-target yang telah ditetapkan (sesuai dengan kontrak KSO; Lampiran C), dalam implementasinya dilakukan secara bertahap melalui ***sinkronisasi*** berbagai faktor yang secara system dapat mempengaruhi kinerja Unit KSO Divre IV, diantaranya adalah :

1. Penggunaan teknologi piranti lunak komputer dan network telekomunikasi yang terintegrasi, sejalan dengan disain transisi bisnis proses, perubahan organisasi, peningkatan skill sesuai dengan teknologi dan bisnis proses yang diterapkan.
2. Pengembangan *rewarding sytem* dengan pola *measurement system* yang didasarkan pada bisnis proses dan teknologi yang telah digunakan serta menerapkan metodologi ISO-9000 yang

implementasinya melibatkan partisipasi karyawan secara dominan untuk meningkatkan kultur dan attitude karyawan yang memiliki keyakinan serta kemandirian dalam menyongsong arus perubahan untuk menjadi *World Best Practices Company* pada tahun 2001.

3. Integrasi dan sinkronisasi berbagai faktor untuk mengembangkan dan mewujudkan *system driving people* yang mampu menjaga kontinuitas pencapaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan manajemen.

B.2.2. PROGRESS PROGRAM T-2001

B.2.2.1. Bidang Sistem Informasi, 11 indikator kinerja T-2001 bidang Islam pada umumnya keakurasian data penting yang masih perlu diperbaiki mekanisme pengukurannya. Availability system (LAN, DCN, Legacy dan non Legacy system) performansinya mencapai 99,9% sedangkan Implementasi system informasi yang digunakan untuk menunjang operasional diantaranya *Billing system, DCN phase II, Upgrade Legacy (New Siskamaya)* dan Y2K masih dalam proses penyelesaian.

B.2.2.2. Bidang Network, Pelaksanaan proyek Senopati yang telah memasuki fase ketiga yaitu penambahan fasilitas pengolahan data trafik hasil pengukuran trafik secara *realtime*, proyek SDH dan akses fiber optik sepanjang 2000 Km, 12 loop menggantikan sistem transmisi *existing* yang dapat juga dimanfaatkan untuk

mendukung konsep Nusantara-21 dan proyek Pengendalian *Network Transition* sistem telekomunikasi yang merupakan program penyederhanaan (*simplified Network*) konfigurasi network dari 87 sentral menjadi 15 *Host Exchange*.

B.2.2.3. Bidang Teknologi Jaringan dan Pelayanan, melaksanakan proyek pengembangan produk dan jasa-jasa baru (antara lain pelayanan *dial-up information*, *voice mail* dan *virtual telepon*, *internet*, *toll free 800*, fasilitas *audio conference* dan *remote memory calling card*), pengembangan saluran, pengembangan bisnis telepon umum/WARTEL dan pengembangan PIN Akses atau Calling Card.

B.2.2.4. Bidang Sumber Daya Manusia, pengembangan SDM menjadi strong (*leadership vision*) melalui pendidikan, pengembangan keahlian, praktek-praktek kerja yang efisien dan efektif, fokus bisnis yang jelas, orientasi niaga yang jelas, penyiapan SDM dalam rangka Changes Management karena adanya sistem baru serta perwujudan budaya organisasi yang mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai bentuk perubahan. Peningkatan produktivitas dengan penataan penempatan pegawai, pengembangan kompetensi dan pemberian imbal jasa yang kompetitif.

B.2.2.5. Bidang Manajemen dan Gaya Bisnis, penataan struktur penghargaan kepada manajemen berprestasi, pengembangan manajemen dan kaderisasi, pengembangan gaya kepemimpinan; penyempurnaan *corporate* bisnis proses dan proyek ISO 9000 serta implementasi *rewarding system* secara bertahap yang berdasarkan pencapaian performansi tiap unit kerja dan SKI.

B.2.2.6. Bidang Finance, pembenahan mutu data keuangan, penyempurnaan sistem *budgeting & forecasting* serta mempersingkat periode rata-rata pengumpulan piutang dan batas maksimum pencairan piutang dan kerjasama dengan pihak ketiga (Bank).

B.2.3. CHANGE MANAGEMENT

Perubahan organisasi pada Unit KSO IV dari pola Kandatel menjadi pola Distrik mengakibatkan banyaknya perubahan yang akan berpengaruh terhadap upaya untuk mencapai WCO. Berbagai perubahan yang telah dilakukan saat ini, telah diarahkan pada target pencapaian parameter-parameter kinerja yang tercantum dalam perjanjian kontrak KSO maupun T-2001 dengan pola kebijakan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan sumber daya yang ada di Unit KSO Divre IV maupun MGTI.

Pada tahap awal, telah disusun terlebih dahulu konsep dasar rencana MGTI dalam perjanjian KSO sebagai kebijakan dalam upaya pencapaian *World Best Company* pada tahun 2001, kemudian didisain konsep *Changes Management Strategic Plan* sebagai pola dasar kebijakan Unti KSO Divre IV dan MGTI (disebut dengan *Borobudur Project*) dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian KSO maupun T-2001 dengan fokus kegiatan :

- a. Desain visi, misi dan strategi yang baru
- b. Evaluasi dan *Redesain core Business Process*
- c. Evaluasi dan Desain sistem Remunerasi yang baru (berdasarkan performansi dan kompetensi)
- d. Evaluasi dan *realignment organization plan* serta evaluasi *desain job description*.
- e. Pengembangan aktifitas manajemen transisi dari kondisi *existing* menuju kondisi ideal.

Sesuai dengan konsep T-2001, maka dalam penyusunan kebijakan *Changes Management Plan* dalam implementasinya didasarkan pada sinkronisasi berbagai macam faktor yang secara sistem dapat mempengaruhi kinerja Unit KSO DIVRE-IV yaitu :

- a. Penggunaan teknologi piranti lunak komputer dan *telecommunication network* tengah diupayakan terintegrasi, sejalan dengan disain transisi

bisnis proses, perubahan organisasi, peningkatan skill sesuai dengan teknologi dan bisnis proses yang diterapkan.

- b. Pengembangan *rewarding system* dengan pola *measurement system* yang didasarkan pada bisnis proses dan teknologi yang telah digunakan serta implementasi metodologi ISO-9000, diharapkan mampu melibatkan partisipasi karyawan secara dominan untuk meningkatkan kultur dan *attitude* karyawan yang memiliki keyakinan serta kemandirian dalam menyongsong arus perubahan untuk menjadi *World Best Practices Company* pada tahun 2001.
- c. Integrasi dan sinkronisasi berbagai faktor tersebut diatas ditujukan untuk mengembangkan atau mewujudkan suatu *System Driving People* yang diharapkan akan mampu menjaga kontinuitas pencapaian kinerja Unit KSO Divre IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

B.2.4. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam penerapan pelaksanaan konsep dan politik *change management* adalah perbaikan secara dramatis kinerja Financial, Operasi dan Pelayanan Unit KSO Divre IV secara efektif dengan mengembangkan suatu rencana manajemen yang menyeluruh berskala perusahaan dan terperinci sesuai struktur organisasi serta sistem-sistem manajemen yang berlaku di Unit KSO Divre IV maupun standart perusahaan operator kelas dunia.

Proyek-proyek yang diluncurkan sejak tahun 1996 sampai dengan saat ini, menggunakan teknologi baru seperti Senopati, *Simplified Network*, *SDH*, *Fiber to Home*, *WLL*, *DCN*, *SAP*, *New Siskamaya*, Sentralisasi pengendalian dan Pelayanan 1XX (107, 100, 117, 162 dll) telah menimbulkan perubahan dalam segi kebutuhan *skill*, bisnis proses dan organisasi.

Perubahan tersebut telah menimbulkan adanya berbagai macam dampak kesenjangan yang bila tidak ditangani dapat mengakibatkan timbulnya inefisiensi dalam pengelolaan perusahaan. Penerapan manajemen perubahan menuntut upaya-upaya sinkronisasi antara tiga faktor utama yaitu teknologi, kebutuhan *skill*, dan *realignment* organisasi agar optimalisasi dapat dicapai.

Konsep manajemen perubahan yang diberlakukan di Unit KSO Divre IV & MGTI pada dasarnya mempertimbangkan 9 faktor atau dimensi perubahan yang dijadikan dasar kebijakan perusahaan atau disebut dengan *Universal Management System (UMS)* yaitu *Business Process*, *Technology*, Organisasi, *Reward & Punishment*, *Measurement System* (indikator T-2001), *Management Method* (ISO-9000), Keimanan, Budaya/culture serta *knowledge* & olahraga dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan pimpinan puncak Unit KSO Divre IV dan MGTI. Bulan Juli 1999 melalui pembentukan *team change management* yang anggotanya terdiri dari semua wakil unit kerja di Unit KSO Divre IV

dan MGTI (Direktorat *Operation, Marketing & Sales*, Keuangan, SDM & *Training, Business Development* dan *Internal Auditor*).

B.2.5. PROGRESS KEGIATAN

Kegiatan program ISO-900 dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 1999 dan adalah :

1. Pembentukan Team ISO-9000 yang beranggotakan semua pimpinan di seluruh unit organisasi atau semua direktorat.
2. Penunjukkan *Management Representative (MR)* dan telah ditetapkan sebagai *MR* adalah *DGM Business Development*.
3. Pembentukan *Steering Committee* ISO-9000 yang beranggotakan semua pimpinan executive di Unit KSO Divre IV.
4. Komitment *management* dalam menerapkan ISO-9000 di Unit KSO Divre IV dengan komitmen meningkatkan kualitas pelayanan setara operator kelas dunia untuk memenuhi/ mencapai kepuasan karyawan, pelanggan dan pemegang saham.
5. Penetapan implementasi ISO-9000 yang dilakukan secara menyeluruh serta diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan pelayanan pelanggan seperti Pasang Baru, Penanggulangan Gangguan, Klaim, pelayanan operator (1XX), Billing, pelayanan tunggakan dan training yang terkait dengan pelayanan pelanggan.
6. Kampanye penerapan ISO-9000 di semua direktorat.

7. Kegiatan seminar maupun training ISO-9000 bagi para *Line Manager*.
8. Kegiatan *Benchmark* ke perusahaan-perusahaan yang telah mendapat sertifikat ISO-9000.
9. Desain *Global Business Process* dan Diagram Konteks yang mencakup semua lini organisasi Unit KSO Divre IV.
10. Pembuatan Prosedur sesuai dengan ketentuan klausul ISO-9000 yang rata-rata telah mencapai sekitar 50%.

B.2.6. WORLD CLASS OPERATOR (WCO) PROGRESS

Sejalan dengan agenda strategis yang telah ditetapkan dalam T2001, untuk dapat tetap *exist* menjadi perusahaan yang unggul dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat kita harus memberikan layanan kelas dunia. Selama tahun 1999 telah menjadikan 80 AWG mempunyai predikat *WCO Initial* (atau sebesar 96% dari total 83 AWG), dan ditargetkan sebelum akhir tahun 2000 seluruh AWG di Unit KSO Divre IV telah mempunyai predikat *WCO Maintenance*, sehingga pada tahun 2001 dapat mencapai predikat *WCO Assurance*.

AWG WCO DIVRE IV TAHUN 1998 / 1999

TAHUN	DISTRIK TELEKOMUNIKASI				
	SEMARANG	SOLO	YOGYAKARTA	PURWOKERTO	PEKALONGAN
1998	Kudus Kendal	Blora Karanganyar	Temanggung	Banjarnegara	Bumiayu
1999	Ambarawa	Baturetno	Bantul	Banyumas	Adiwerna

Bangsri	Boyotali	Godean	Cilacap	Balapulang
Boja	Cepu	Gombang	Kebumen	Bandar Sedayu
Demak	Delangu	Kalasan	Kroya	Batang
Godong	Klaten	Kaliurang	Majenang	Comal
Jepara	Ngawen	Magelang	Purbalingga	Ketanggungan
Juwana	Pedan	Muntilan	Purwokerto	Pekalongan
Karimun Jawa	Purwodadi	Parakan	Sidareja	Pemalang
Keling	Randublatung	Purworejo	Sukaraja	Randudongkal
Pati	Solo	Sleman		Slawi
Pecangaan	Sragen	Wates		Subah
Rembang	Sukoharjo	Wonosari		Tanjung Tegal
Salatiga	Tawangmangu	Wonosobo		Tegal
Sukorejo	Wirosari			
Tayu	Wonogiri			
Ungaran				
Weleri				

B.2.7. MASALAH TAHUN 2000 (Y2K)

Sebagai antisipasi terhadap pengaruh "year 2000 problem" (Y2K) maka dibentuk satgas *Contingency plan* yang bertugas untuk mengantisipasi segala perbuatan yang mungkin terjadi. Tahapan yang dilakukan diantaranya inventarisasi, tahap penilaian dan tahap analisis detail terhadap sistem informasi, identifikasi terhadap sistem operasi dan perangkat untuk mendukung program Y2K dikelompokkan dalam kategori:

- (i). Perangkat sentral
- (ii). Perangkat transmisi
- (iii). Perangkat sistem informasi
- (iv). Perangkat multi media
- (v). Perangkat kerja dan laboratorium

(vi). Telepon umum

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program tersebut, perusahaan menitik beratkan evaluasi pada :

- a. Semua sistem yang mempunyai pengaruh langsung terhadap pendapatan (sistim billing, akuntansi, transmisi, perangkat sentral dan lain-lain).
- b. Semua sistem yang berpengaruh terhadap pelayanan (yansus, wartel, telum dan lain-lain).
- c. Sistem operasi harian / computer.

Suksesnya program Y2K yang telah berhasil mengcompliantkan seluruh perangkat telekomunikasi merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Unit KSO Divre IV sehingga kita senantiasa peduli terhadap perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelanggan yang merupakan komitmen kita untuk menjadi yang terbaik.

B.2.8. BIDANG OPERATION DAN PELAYANAN

Dalam bidang Operation dan Pelayanan, Unit KSO Divre IV telah berhasil mengendalikan *network* dengan penyederhanaan konfigurasi *network eksisting* sentral-sentral diseluruh Jawa Tengah dan DIY menjadi 10 *host* sentral. Penyederhanaan *network* ini akan memudahkan pengendalian traffik dan pengaturan *routing network*, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan panggilan, dan meningkatkan *availability* (keandalannya).

Untuk mempermudah operasi dan pelayanan kepada masyarakat Sentralisasi *Call Centre* (1XX) adalah solusi yang paling tepat, karena disamping memudahkan control juga meningkatkan mutu pelayanan karena dapat mempermudah pelanggan untuk mendapatkan informasi atau pelayanannya.

Sampai dengan akhir tahun 1999, jumlah Kapasitas Sentral telepon sebanyak 726.868 SST dengan *Line in Service* sebanyak 531.593 SST, yang tersebar di Distel Semarang 194.543 SST, Distel Solo 111.317 SST, Distel Yogyakarta 122.212 SST, Distel Purwokerto 51.380 SST dan Distel Pekalongan 52.141 SST.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan performansi dan pelayanan selama tahun 1999 antara lain :

- Pembenahan dan penggantian Kabel Udara (KU) dan *Drop Wire* (DW)
- Perbaikan sistem penyambungan *Drop Wire*
- *Reboundary* DP dan validasi data adkab
- Pemeriksaan dan perbaikan kualitas transmisi dan *post dialling delay* untuk menanggulangi kegagalan *signaling*
- Observasi dan evaluasi pelanggan *Bbusy* dan *RNA*

Tak ada gading yang tak retak, keberhasilan DIVRE IV dari berbagai sektor yang telah memperlihatkan perfromansi bernilai positif, ternyata masih ada ganjalan yang masih harus terus diperjuangkan yaitu masalah Q gangguan. Sepanjang tahun 1999 angka Q report masih

sekitar 1,95 atau belum bisa mencapai target tahun 1999 yaitu sebesar 1,8 (meskipun Q real Desember 1999 sebesar 1,29). Didalam tahun-tahun berikutnya salah satu upaya yang dilakukan adalah menekan Q gangguan sehingga untuk meningkatkan pelayanan diharapkan pada tahun 2000 angka gangguan telah mencapai kurang dari 1 per 100 pelanggan.

B.2.9. TELEPON UMUM

Telepon umum terasa semakin penting sejalan dengan kemajuan jaman yang menuntut kecepatan informasi, sehingga keberadaannya selalu dirasa kurang. Permintaan akan bertambahnya telepon umum banyak diterima dari masyarakat baik secara perorangan maupun secara kelompok atau melalui badan/organisasi.

Sampai dengan akhir tahun 1999, jumlah telepon umum di wilayah Jawa Tengah dan DIY sebanyak 7.479 SST, yang terdiri dari telepon umum coint (TUC) 2.937 SST, telepon umum kartu (TUK) 4.542 SST.

B.2.10. WARUNG TELEKOMUNIKASI (WARTEL)

Sebagai perpanjangan tangan TELKOM dalam memberikan layanan jasa telekomunikasi kepada masyarakat, WARTEL adalah prasarana yang sangat mendukung, karena WARTEL ini sebagai agen TELKOM yang melayani masyarakat sebagaimana layanan yang dilakukan pada loket-loket TELKOM.

Wartel terbagi menjadi dua yaitu wartel A dan wartel B, dimana wartel A adalah wartel dengan jumlah KBU lebih dari dua, sedangkan

wartel B adalah wartel dengan jumlah KBU maksimal dua (dulu disebut TUT). Sampai dengan akhir tahun 1999, jumlah line untuk WARTEL di Divre-IV sebanyak 12.956 SST.

B.2.11. PEMASARAN

Keberhasilan pemasaran di tahun 1999 adalah 58.355 SST, sedangkan daftar tunggu pada posisi akhir tahun 1999 kurang lebih sekitar 72.889 calon pelanggan yang tersebar di lima Distel (48.629 calang di Area Distrik Semarang, 5.054 calang di Distrik Solo, 6.464 calang di Distrik Purwokerto, 9.168 calang di Distrik Pekalongan serta 3.574 di Distrik Yogyakarta), ini berarti bahwa Unit KSO Divre IV masih memiliki peluang yang cukup besar, karena dengan masih banyaknya, daftar tunggu berarti animo masyarakat akan jasa telekomunikasi masih terbuka lebar.

Sedangkan untuk daerah-daerah yang sudah jenuh, beberapa program untuk menarik pelanggan yang digelar selama tahun 1999 diantaranya adalah Program bulan pemasaran, buulan TELKOM Peduli, grand sales, paket insentif sales, spesial discount dan PSB via direct mail.

B.2.12. PRODUK

Produk *existing* yang ada di Unit KSO Divre IV diantaranya : Telepon Umum Satelit (TUS), PonPin, Telkom Memo, nada sela, lacak, trimitra, sandinada, andara, *Info Billing*, Info Keren, kontak jodoh serta *Dial Up Info* yang telah memberikan kontribusi pada pendapatan Unit

KSO Divre IV. Sedangkan beberapa produk baru yang telah diluncurkan Unit KSO Divre IV yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan selama tahun 1999 antara lain :

1. Bursa Otomotif
2. ROSS (Rincian Ongkos SLJJ Swalayan|)
3. CJY.net (*Internet instant*)

Selain produk-produk tersebut diatas, Unit KSO Divre IV telah melakukan kerjasama dengan Mitra lain dalam memanfaatkan perangkat *Interactive Voice Response System (IVRS)* untuk memberikan layanan yang lebih optimal pada masyarakat, kerjasama dilaksanakan dengan :

- PT. Grafika untuk layanan 109, Telkom Memo dan lain-lain
- PT. PLN untuk layanan tentang rekening listrik
- PDAM untuk informasi tagihan air dan
- PT. INDOLINK layanan Pager untuk panggilan telepon yang tidak diangkat/sibuk

B.2.13. JUMLAH PELANGGAN

Dengan keberhasilan pemasaran, berarti menambah jumlah pelanggan yang ada, sampai dengan akhir tahun 1999 jumlah pelanggan telepon di Unit KSO Divre IV sebanyak 511.158 customer berarti naik 11% bila dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah pelanggan sebanyak 420.621 *customer*.

B.2.14. BIDANG KEUANGAN

Jumlah pendapatan operasional yang berhasil diraih Unit KSO Divre IV selama tahun 1999 adalah sebesar Rp1.045.267.087.000,- mengalami pertumbuhan sebesar 36,22% dibandingkan pendapatan operasional tahun 1998 yaitu sebesar Rp 767.356.636.000,-.

Sedangkan perolehan laba sebelum pajak tahun 1999 adalah sebesar Rp 310.017.756.000,- atau mengalami kenaikan 66,93% dibandingkan dengan perolehan laba tahun 1998 yang sebesar Rp 185.719.000.000,-.

B.2.15. PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Manajemen SDM sangat mendapat perhatian, karena diakui bahwa untuk dapat mencapai perusahaan yang berstandar pelayanan kelas dunia, maka SDM sebagai salah satu asset sangat penting untuk diperhatikan, karena SDM dapat melandasi perubahan yang paling mendasar dari pola kerja lama ke pola kerja baru sebagaimana standar perusahaan kelas dunia. Kompetensi personil bukanlah individualistis, kerjasama dan kebersamaan selalu dibina meskipun peran dan kontribusi masing-masing tetap dibedakan, sehingga kerjasama dan kebersamaan tidak dapat dijadikan tempat persembunyian bagi yang tidak mampu.

B.2.16. POTENSI PEGAWAI

Jumlah pegawai Unit KSO Divre IV sampai dengan akhir Desember 1999 tercatat sebanyak 3321 orang, dimana pegawai yang tercatat masih

berpendidikan SD sebanyak 3 orang, SLTP 675 orang, SLTA berjumlah 1621 orang, D-1 sebanyak 63 orang, D-2 sebanyak 466 orang D-3 sebanyak 207 orang, S-1 sebanyak 300 orang dan S-2 berjumlah 6 orang.

B.2.17. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Untuk membekali dan meningkatkan wawasan SDM yang ada, beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam bidang teknik, non teknik dan manajemen telah diselenggarakan. Penyelenggaraan Diklat diselenggarakan sendiri maupun diikuti dalam program-program dari Kantor Pusat atau insitusi perguruan tinggi dan lembaga pelatihan swasta.

Selama tahun 1999 jumlah SDA yang menjalani pendidikan sebanyak 125 karyawan dan pelatihan sebanyak 15.094 karyawan, sehingga rata-rata Diklat tahun 1999 adalah 16,59 hari per karyawan melebihi dari target yang ditetapkan 16,00 hari per karyawan. Dalam meraih WCO tahun 2001 nanti beban jajaran SDM tidaklah ringan, mengingat potensi SDM yang ada masih banyak membutuhkan peningkatan *skill*, *knowledge* dan *attitude* sejalan dengan modernisasi teknologi yang sudah diterapkan sejak tahun 1996. Untuk mensinkronkan modernisasi teknologi diatas dengan kualitas sumber daya manusia berbagai upaya telah dilakukan yaitu antara lain SDM yang berpendidikan SD dan SLTP secara bertahap ditingkatkan melalui pendidikan perjenjangan dan pelatihan, diharapkan tahun 2001 sudah tidak lagi pegawai yang hanya mempunyai basic pendidikan SD dan SLTP.

B.2.18. IBO (IMAN, BUDAYA DAN OLAH RAGA)

Untuk menggalang kebersamaan dan dapat bekerja sama, menghilangkan pengkotak-kotakan antar pegawai, telah digelar beberapa kegiatan untuk menambah keimanan, memupuk kebudayaan dan seni serta meningkatkan kesehatan pertandingan-pertandingan olahraga rutin diselenggarakan baik untuk kalangan Unit KSO Divre IV sendiri maupun dengan Mitra dan DIVISI Penunjang.

Puncak acara kegiatan IBO tahun 1999 dilaksanakan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Postel (HUT Postel) yang dilaksanakan pada bulan September 1999. Kegiatan olah raga seperti Sepak bola, Volley, Bulu Tangkis, Tenis Lapangan/Meja SKJ merupakan ajang kebersamaan bagi seluruh karyawan untuk saling membina kebersamaan. Selain kegiatan olah raga juga dilaksanakan berbagai perlombaan kesenian dan olah raga tradisional.

**C. BOLEH TIDAKNYA PENYELENGGARA WARTEL A DAN B
MEMUNGUT PPN ATAS PENYERAHAN JASA TELEKOMUNIKASI
DAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK SEBAGAI BUKTI PEMUNGUTAN
PPN**

C.1. Hasil Penelitian

**C.1.1. Kemitraan PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY dengan
Penyelenggara Wartel A dan B¹¹⁶**

Dalam upaya bersama-sama memajukan dunia pertelekomunikasi di Indonesia, TELKOM khususnya di DIVRE IV Jateng dan DIY saat ini terdapat bidang-bidang usaha yang dapat diselenggarakan oleh perorangan atau badan hukum. Dalam kerangka kerjasama yang saling menguntungkan, bidang-bidang usaha tersebut antara lain :

- Penyelenggaraan Wartel¹¹⁷
- Penyelenggaraan Warung Internet
- Pengelolaan Telepon Umum Coin Pelanggan
- Instalatur IKR / G
- Penyelenggara SOPP

¹¹⁶ PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY, *Direktori Produk dan Layanan*, Semarang, 1999, halaman 53 - 56, dengan penyesuaian perkembangan kemitraan dan penambahan berbagai peraturan yang berhubungan.

¹¹⁷ Kemitraan PT.TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY dengan penyelenggara Wartel A dan B baru dimulai tahun 1998. Sebelumnya kemitraan dilakukan dengan Deparpostel, dan pada waktu itu Wartel A disebut dengan Wartel sedangkan Wartel B dikenal dengan TUT (Telepon Umum Tunggu). Masyarakat sendiri mengenal TUT ini sebagai kiospon atau kiostel. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sujono, Koordinator Account Wartel pada PT.TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY, Gedung Telkom, lantai VI, Jl. Pahlawan No. 10, Semarang, pada hari Kamis, 24 April 2001.

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, di masa datang masih terbuka peluang timbulnya bidang-bidang usaha lain yang dapat dikerjasamakan.

Dalam hal kemitraan dengan penyelenggara Wartel ada beberapa hal penting yang perlu diketahui :

Pertama, Pengelola Wartel :

Pengelola Wartel dapat digolongkan dalam tiga kelompok yaitu :

- Perorangan
- Badan usaha swasta
- Koperasi

Kedua, Jenis Wartel :

- Wartel Tipe A (disebut Wartel A)

Jenis Wartel dengan lebih dari 2 (dua) buah Kamar Bicara Umum (KBU) yang dikelola oleh Badan Usaha atau Koperasi.

- Wartel Tipe B (disebut Wartel B)

Jenis Wartel dengan 1 atau 2 buah Kamar Bicara Umum (KBU) yang dikelola oleh perorangan atau koperasi.

Ketiga, Jasa Wartel :

Jasa yang disediakan oleh Wartel terdiri dari dua jenis :

- Jasa wajib : Telepon Lokal, Interlokal / SLJJ, dan Faksimili

- Jasa tambahan : Telegram, Multimedia/Internet, Telepon Internasional/SLI, atau jasa lainnya yang diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

Keempat, Pembagian Pendapatan (komisi) :

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 78/1998 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998¹¹⁸ , besarnya komisi bagi pengelola Wartel terdapat didalam tabel di bawah ini :

Tabel 1

Pendapatan Wartel per bulan Rp.	Pendapatan Pengelola Wartel per bulan Rp.
0 s/d 1.000.000	50 %
1.000.000 s/d 3.000.000	40 %
Lebih dari 3.000.000	22,50 %

¹¹⁸ Untuk seluruh point yang ada kecuali point keempat didasarkan pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi. Keputusan ini dilaksanakan lebih lanjut oleh Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 160/Direktur Jenderal/1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi. Kemudian dilaksanakan lebih lanjut oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. melalui keputusan direksi. Keputusan direksi yang dimaksud adalah Nomor : KD.25/Hk.220/OPSAR-33/1998 tanggal 19 Nopember 1998 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi . Untuk point keempat, pembagian pendapatan didasarkan pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 78 Tahun 1998 tentang Pembagian Pendapatan/Komisi atas Penyelenggaraan Jasa Warung Telekomunikasi. Ketentuan ini hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1999 (Pasal 4). Untuk mengantisipasi hal ini PT. TELKOM DIVRE IV menetapkan Keputusan General Manager Unit KSO Divisi Regional IV Nomor : 12/YN180/RE4-00/2001 tentang Diskon atas Penyelenggaraan Wartel. Keputusan ini didasarkan atas Nota Dinas Nomor : C.TEL.459/YN.230/OPSAR-33/1999 perihal kebijakan Pembagian Pendapatan/Komisi atas Penyelenggaraan WARTEL, yang dimaksudkan untuk mengatasi kevakuman hukum. Di dalam keputusan general manager diatas ditetapkan pembagian pendapatan tetap sama, hanya mengganti istilah pembagian pendapatan atau komisi menjadi diskon.

Contoh :

Jika Wartel memperoleh pendapatan Rp. 4.000.000,- maka pengelola memperoleh komisi sebagai berikut :

50 %	x	Rp. 1.000.000,-	=	Rp. 500.000,-
40 %	x	Rp. 2.000.000,-	=	Rp. 800.000,-
22,50 %	x	Rp. 1.000.000,-	=	Rp. 225.000,-
<hr/>				
Total komisi				= Rp.1.525.000,-

Pendapatan Wartel dari jasa internasional adalah pembagian pendapatan Jasa Telekomunikasi Internasional yang merupakan pendapatan operator telekomunikasi internasional. Sekarang ini Wartel mendapat 8% dari total pendapatan jasa internasional.

Untuk layanan akses ke Sistem Telepon Bergerak Seluler (STBS) diberikan diskon sebesar 22,5% (dua puluh dua koma lima prosen) x hak TELKOM atas percakapan PSTN ke STBS x pendapatan pulsa (tidak termasuk pendapatan air time dan PPN) yang diperoleh penyelenggara per bulan.¹¹⁹

Kelima, Tarif :

Pengelola Wartel dalam memungut biaya jasa Wartel wajib memberitahukan tarif sesuai dengan ketentuan Tarif Jasa Telekomunikasi yang berlaku.

¹¹⁹ Pasal 1 ayat 2 Keputusan General Manager Unit KSO Divisi Regional IV Nomor : 12/YN180/RE4-00/2001 tentang Diskon atas Penyelenggaraan Wartel.

Keenam, Biaya Pengelola Wartel

Calon pengelola tidak dikenakan biaya apapun dalam pengurusan pendirian Wartel. Biaya yang diperlukan dalam usaha pengelolaan Wartel adalah biaya untuk investasi usaha seperti :

- Menyediakan tempat usaha.
- Menyediakan perangkat Wartel.
- Membayar biaya instalasi.
- Menyediakan perlengkapan Wartel lainnya seperti :

Wartel A : Minimal tersedia KBU, ruang tunggu dan meja pelayanan.

Wartel B : Minimal tersedia KBU.

Ketujuh, Setoran Pendapatan :

Setelah Wartel berjalan, TELKOM tidak akan memungut biaya bulanan dan biaya lainnya. Uang yang harus disetorkan ke TELKOM hanya bagian pendapatan TELKOM setelah dikurangi komisi untuk pengelola.

Setoran dilakukan pada bank-bank yang ditunjuk seperti tercantum dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) dan pengelola dibebaskan dari biaya transfer.

Kedelapan, Tata Cara Pendirian :

1. Informasi dan Konsultasi Pengelolaan Wartel

Untuk kelancaran pendirian Wartel, administrasi, pembinaan Wartel dan segala sesuatu mengenai Wartel dilakukan oleh koordinator WAS (Wartel Support) di :

Semarang : Jl. Arif Rachman Hakim No. 1
Telp. (024) 552000

Yogyakarta : Jl. Yos Sudarso No. 9
Telp. (0274) 586923 / 580677

Solo : Jl. Mayor Kusmanto No. 1
Telp. (0271) 41471

Purwokerto : Jl. Merdeka No. 26
Telp. (0281) 31550

Pekalongan : Jl. Merak No. 2
Telp. (0285) 22300

Magelang : Jl. Yos Sudarso No. 9
Telp. (0293) 64120

Kudus : Jl. Jend. Sudirman No. 69
Telp. (0291) 33510

Tegal : Jl. Gajah Mada No. 56
Telp. (0283) 358485

Cilacap : Jl. A. Yani No. 34
Telp. (0282) 31789

Cepu : Jl. Rumah Sakit No. 35

Telp. (0296) 21645

2. Pengajuan

Dalam prakteknya di PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY, untuk pengajuan Wartel, pemohon harus membuat Surat Permohonan Pendirian Wartel dan Surat Pernyataan dibuat rangkap 3 (tiga).

Lembar pertama (asli) disertai lampiran dikirimkan kepada Kepala Distrik Telekomunikasi (KADISTEL) berikut :

- KADISTEL Semarang : Jl. Arif Rachman Hakim No. 1
- KADISTEL Yogyakarta : Jl. Yos Sudarso No. 9
- KADISTEL Solo : Jl. Mayor Kusmanto No. 1
- KADISTEL Purwokerto : Jl. Merdeka No. 26
- KADISTEL Pekalongan : Jl. Merak No. 2

Lembar kedua (tanpa lampiran) ditujukan kepada Manager Public Calling, Direktorat Marketing dan Sales PT. TELKOM Divisi Regional IV, Jalan Pahlawan No. 10, Semarang.

Lembar ketiga (tanpa lampiran) ditujukan kepada :

- Kakanwil Perhubungan Jawa Tengah

Jl. Taman Tawang No. 1, Semarang

- Kakanwil Perhubungan DIY

Jl. Babarsari No. 33, Yogyakarta

(Untuk kedua jenis surat tersebut dapat dilihat kedua contoh surat pada lampiran).

3. Persetujuan

Dalam melayani pengajuan beroperasinya Wartel, Telkom berusaha terbuka dan adil dengan berpedoman dengan empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Tersedianya jaringan / fasilitas telekomunikasi (Jaringan kabel dan nomor sentral)
2. Kelayakan Usaha
3. Persyaratan Administrasi
4. Kebutuhan Masyarakat¹²⁰

Empat syarat di atas merupakan dasar diberikannya persetujuan pengajuan pendirian Wartel. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4 keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 160/DirekturJenderal/1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi.

Apabila seluruh syarat di atas terpenuhi maka persetujuan diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh pejabat TELKOM, dalam hal ini KADISTEL.

Dalam lingkup internal PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY untuk persetujuan didasarkan pada Nota Dinas GM KSO DIVRE IV Nomor Tel 1082/YN000/RE4-00/1998 yang antara lain menyebutkan :

"2. Persetujuan atau penolakan penyelenggaraan Wartel diberikan secara tertulis oleh Kadistel atas nama Kepala Divisi Regional IV

¹²⁰ Jawa Pos, *Dialog Telkom, Jangan Percaya kepada Biro Pengurusan Wartel*, 1 Juni 2000, halaman II.

berdasarkan permohonan dan pernyataan calon pengelola serta laporan hasil pemeriksaan teknis dan administrasi yang dilakukan di daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan diajukan."

Selain itu disebutkan pula :

"5.Persetujuan penyelenggaraan Wartel agar memperhatikan azas pelayanan, pemerataan, kelayakan usaha dan kemudahan."

Apabila SK Persetujuan telah terbit selanjutnya calon penyelenggara diwajibkan menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS). PKS berlaku selama 5 tahun. Perpanjangan waktu kerjasama harus diajukan secara tertulis oleh penyelenggara selambat-lambatnya 2 bulan sebelum masa berlakunya penyelenggaraannya habis. Surat ditujukan kepada KADISTEL dan tembusan Manager Public Calling.

Mengenai PKS ini dapat dilihat dasar berpijaknya pada Pasal 2 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi, menyatakan:

"Penyelenggaraan warung telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh perorangan, badan usaha, atau koperasi bekerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama."

Ketentuan di atas dipertegas lagi dalam Pasal 9 Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 160/Direktur Jenderal/1998 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi, yaitu :

"Penyelenggara Wartel yang telah mendapatkan persetujuan wajib membuat perjanjian kerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi."

Lebih lanjut lagi, mengenai PKS ini diatur dalam Pasal 16 ayat 1 Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor : KD.25/HK.220/OPSAR-33/1998 tanggal 19 Nopember 1998 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi. Dalam Pasal 16 ayat 1 disebutkan :

"Penyelenggaraan warung telekomunikasi yang dilaksanakan oleh badan lain maupun perorangan harus dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama."

Pengertian Perjanjian Kerjasama ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 8 Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor : KD 25/HK.220/OPSAR-33/1998 tanggal 19 Nopember 1998 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi yang menyatakan :

"Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah perjanjian kerjasama antara TELKOM dengan Penyelenggara Warung Telekomunikasi yang mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan warung telekomunikasi serta hak dan kewajiban masing-masing pihak."

Selanjutnya menurut Pasal 16 Keputusan Direksi itu, Perjanjian Kerjasama sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Lingkup kerjasama;
- b. Hak dan kewajiban;
- c. Bagian pendapatan masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Jangka waktu perjanjian kerjasama;
- e. Jangka waktu penyeteroran pendapatan;

- f. Sistem pelaporan;
- g. Cara penyelesaian perselisihan;
- h. Resiko;
- i. Force Majeure;
- j. Sanksi;"

Ketentuan ini didasarkan pula pada kedua peraturan diatas, baik dari menteri perhubungan maupun direktur jenderal pos dan telekomunikasi.

Isi dari Pasal 16 diatas sebenarnya merupakan pasal-pasal dalam PKS. Masing-masing pasal adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam PKS. Dalam hubungannya dengan permasalahan, ada beberapa bagian atau pasal tertentu dengan ayat-ayatnya yang tertentu pula yang berhubungan dengan analisa nantinya. Mengenai hal ini dapat diketengahkan sebagaimana dibawah ini.

Pertama, Dalam konsiderans menimbang dari PKS (tahun 2000) khususnya huruf a yang menyebutkan :

"Bahwa telekomunikasi dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh pemerintah, yang dalam pelaksanaannya TELKOM merupakan salah satu Badan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk umum dalam negeri, Badan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk luar negeri dikelola oleh PT. INDOSAT dan PT. SATELINDO."

Konsiderans menimbang huruf a ini masih didasarkan pada ketentuan UU Telekomunikasi yang lama yaitu UU No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Menurut UU ini, Penyelenggaraan Telekomunikasi dilaksanakan oleh pemerintah, yang selanjutnya untuk penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada badan

penyelenggara (Pasal 12 ayat 1). Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah pemegang kuasa penyelenggaraan jasa telekomunikasi (Pasal 25).

Undang-undang ini dilaksanakan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Dalam PP ini dikatakan pula bahwa pemerintah melimpahkan kewenangan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi kepada Badan Penyelenggara (Pasal 3 ayat 1). Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dalam negeri;
- b. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Internasional.

Selanjutnya ditegaskan pula, Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 3 ayat (3)).

Dalam PP ini disebutkan pula jenis Jasa Telekomunikasi yaitu jenis Jasa Telekomunikasi Dasar dan jenis Jasa Telekomunikasi Bukan Dasar. Untuk jenis Jasa Telekomunikasi Dasar meliputi jasa telepon, telex, telegram, sambungan komunikasi data paket, sirkit langganan dan kanal telekomunikasi (Pasal 10 ayat 1) dan lainnya yang ditetapkan oleh menteri (ayat 2).

Untuk lebih memperjelas lagi dasar hukum konsiderans huruf a .PKS diatas perlu pula ditambahkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.60/PT.102/MPPT-95 yang antara lain menegaskan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia adalah Badan Penyelenggara, dengan hak eksklusif penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hak eksklusif penyelenggara Jasa Telekomunikasi Lokal dengan menggunakan jaringan tetap (*wireline* dan *fixed wireless*) untuk jangka waktu selama minimum 15 (lima belas) tahun.
- b. Hak eksklusif penyelenggara Jasa Telekomunikasi jarak jauh, untuk jangka waktu selama minimum 10 (sepuluh) tahun.
- c. Hak eksklusif penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam butir a, termasuk penyelenggaraan yang dilaksanakan untuk dan atas nama PT. TELKOM melalui kerjasama operasi.

Selain itu juga Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.6/PT.102/MPPT-95 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar Internasional. Dalam keputusan ini disebutkan penyelenggara Jasa Telekomunikasi Internasional terdiri dari (Pasal 2) :

- a. PT. (Persero) INDOSAT, selanjutnya disebut INDOSAT, sebagai Badan Penyelenggara pemegang kuasa penyelenggaraan Jasa

Telekomunikasi Internasional bertindak berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah;

- b. PT. Satelit Palapa Indonesia, selanjutnya disebut SATELINDO, sebagai Badan Lain yang menyelenggarakan Jasa Telekomunikasi Internasional berdasarkan ijin Menteri melalui kerjasama dengan Badan Penyelenggara.

Dalam konsiderans menimbang huruf a untuk PKS tahun 2001 menunjukkan perbedaan oleh karena pemberlakuan Undang-Undang No.

- 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yaitu :

- "a. Bahwa TELKOM adalah PENYELENGGARA Jasa Telekomunikasi."

Dalam UU No. 36 Tahun 1999 ini tidak dibedakan antara Badan Penyelenggara dengan Badan Lain. Tidak ada perbedaan karena UU ini memungkinkan selain TELKOM dan INDOSAT untuk menjadi penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Menurut UU ini penyelenggaraan telekomunikasi meliputi (Pasal 7 ayat 1) :

- a. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
- b. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
- c. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Lebih lanjut UU ini menyatakan bahwa Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan atau Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a dan b, dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- c. badan usaha swasta, atau
- d. Koperasi

Jadi menurut UU Telekomunikasi yang baru ini penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi bukan monopoli TELKOM dan INDOSAT. Dengan singkat namun jelas dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantara penyelenggara telekomunikasi (Pasal 10 ayat 1). Namun dengan berlakunya undang-undang ini, hak-hak tertentu yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Penyelenggara untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 masih berlaku (Pasal 61 ayat 1). Jangka waktu hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dipersingkat sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dan Badan Penyelenggara (Pasal 61 ayat 2). Dengan demikian TELKOM dan INDOSAT masih memiliki hak eksklusif yang mereka miliki. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Telekomunikasi yang baru (UU No. 36 Tahun 1999) pada intinya juga mengatur hal yang sama dengan UU tersebut.

Kedua, Lingkup kerjasama dalam PKS (tahun 2000) khususnya

Pasal 2 ayat 4 :

"Dalam Penyelenggaraan Jasa WARTEL, menurut perjanjian ini PENYELENGGARA bertindak untuk dan atas nama TELKOM."

Ketiga, Lingkup kerjasama dalam PKS (baik PKS tahun 2000 maupun PKS tahun 2001) khususnya Pasal 2 ayat 5 :

"Sambungan telekomunikasi di WARTEL berstatus Dinas Berbayar"

Di dalam Pasal 1 tentang pengertian khususnya huruf j dikatakan :

"Sambungan Dinas Berbayar adalah sambungan telekomunikasi pelanggan berstatus dinas TELKOM yang tidak dikenakan biaya Pasang Baru dan Uang Pelanggan Bulanan tetapi tetap dikenakan Biaya Pemakaian Pulsa."

Ketentuan dari status sambungan diatas didasarkan pada Pasal 11 dari Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor : KD.25/HK.220/OPSAR-33/1998 tanggal 19 Nopember 1998 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa :

"Status sambungan layanan telekomunikasi warung telekomunikasi adalah dinas berbayar".

Keempat, Kewajiban Penyelenggara Wartel (PKS tahun 2000 dan tahun 2001) khususnya Pasal 1 huruf a angka 9 :

"PENYELENGGARA berkewajiban atas biaya sendiri menyediakan / melaksanakan fungsi kegiatan menjaga dan meningkatkan citra TELKOM".

Kelima, Kewajiban penyelenggara Wartel (PKS tahun 2000 dan tahun 2001) khususnya Pasal 1 huruf a angka 10, bahwa :

"Penyelenggara berkewajiban atas biaya sendiri menyediakan / melaksanakan fungsi kegiatan memberikan tanda terima/print out pembayaran kepada pemakai Jasa WARTEL."

Keenam, Kewajiban TELKOM khususnya Pasal 4 ayat 1 huruf c, bahwa :

"TELKOM berkewajiban untuk menanggung PPN Jasa Keagenan WARTEL sebesar 10% dari hak PENYELENGGARAAN atau sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku."

Selain beberapa hal penting dari PKS diatas yang berhubungan erat dengan permasalahan juga perlu ditambahkan isi dari Nota Dinas Nomor : C.Tel.564/YN250/OPSAR-33/2000 tentang Pelayanan *Incoming Call* di Wartel, khususnya angka 2a yang menyatakan :

"Pada dasarnya sampai saat ini hubungan antara TELKOM dengan pengelola Wartel masih bersifat keagenan, hal ini ditandai dengan :

1. Sst. Wartel merupakan Dinas Berbayar;
2. PPN Keagenan masih ditanggung oleh TELKOM;

Karena bersifat sebagai Agen TELKOM, maka fasilitas yang ada pada Sst. Wartel sepenuhnya menjadi wewenang TELKOM."

Disamping itu perlu pula ditambahkan bahwa, Wartel juga merupakan layanan publik yang dikelola pihak lain (perorangan atau badan) dengan melakukan PKS dengan PT. TELKOM untuk menjual pulsa/Jasa Telekomunikasi lainnya. Dengan demikian keberadaan Wartel lebih bersifat sebagai perpanjangan tangan pelayanan PT. TELKOM.¹²¹ Lebih lengkap lagi dapat disebutkan bahwa, dalam pola keagenan, Wartel

bersangkutan benar-benar merupakan kepanjangan layanan PT. TELKOM dan jasa-jasa layanan yang disediakan adalah jasa-jasa PT. TELKOM. Standar layanannya adalah standar layanan PT. TELKOM. Logo dan simbol yang dipakai di Wartel itu adalah khas logo PT. TELKOM. Komisi yang diberikan berdasarkan ketentuan PT. TELKOM.¹²²

Kemudian dapat juga ditambahkan Pasal 12 ayat 1 Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor : KD.25/HK.220/OPSAR-33/1998 tanggal 19 Nopember 1998 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi, yang menyatakan :

"Penyelenggara Warung Telekomunikasi dapat memungut langsung biaya pelayanan Jasa Telekomunikasi kepada pemakai jasa sesuai ketentuan tarif yang berlaku ditambah PPN."

C.1.2. Pemungutan PPN atas Penyerahan Jasa Telekomunikasi dan Pembuatan Faktur Pajak sebagai Bukti Pungutan oleh Penyelenggara Wartel A dan B.

Seperti yang telah disinggung dimuka, baik di dalam bab pendahuluan khususnya latar belakang maupun di dalam bab III khususnya Tinjauan Umum, dapat kita ketahui dengan jelas bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satu bagian dari PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. adalah usaha utama

¹²¹ Suara Karya, *Wartel Boleh Tentukan Tarif Sendiri*, 25 Agustus 2000, halaman X.

¹²² Suara Karya, *Telkom akan Luncurkan Pola Waralaba Wartel*, 25 Agustus 2000, halaman X.

yang terdiri dari tujuh buah divisi regional. Kebijakan yang bersifat strategis berada dalam kewenangan kantor perusahaan, sedangkan untuk penjabaran operasional dilaksanakan oleh masing-masing divisi tersebut dengan tim manajemen yang terpisah. Masing-masing divisi ini secara operasional berdiri sendiri dan saling bersaing meningkatkan mutu pelayanan.

Dalam hal penyelenggaraan Wartel, kebijakan strategis mengenai hal ini berada dalam kewenangan kantor perusahaan, sedangkan dalam hal yang lebih operasional berada di tangan masing-masing divisi dengan penjabaran yang tidak sama.¹²³ Dalam hal ini kantor perusahaan telah mengeluarkan Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor : KD.25/HK.220/OPSAR-33/1998 tanggal 19 Nopember 1998 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi sebagaimana pernah disinggung dimuka. Selain keputusan tersebut juga terdapat Surat Keputusan Direksi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor : KD.38/YN.230/OPSAR-30/1999 tanggal 15 Desember 1999 tentang Pembagian Pendapatan/Komisi atas Penyelenggaraan Wartel. Penjabaran lebih lanjut dari kedua peraturan diatas khususnya terdapat pada Perjanjian Kerjasama (PKS) yang disusun oleh masing-masing divisi regional yang ada.

¹²³ Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin Tanjung, staf Wartel divisi pada PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY, Gedung Telkom, Jl. Pahlawan No.10, Semarang, pada Hari Jum'at, 25 Mei 2001.

Untuk dasar hukum bagi Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Telekomunikasi semuanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa penjabaran lebih lanjut dalam peraturan internal kantor perusahaan maupun PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY.¹²⁴ Tetapi khusus untuk masalah pengkreditan Pajak Masukan diatur dalam Nota Dinas Nomor : C.tel./KU710/KUG-33/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Perusahaan.

Seperti yang disebutkan diatas bahwa masing-masing divisi berdiri sendiri, demikian pula dengan masalah perpajakan khususnya PPN atas Penyerahan Jasa Telekomunikasi. Untuk masalah PPN atas Penyerahan Jasa Telekomunikasi ini, masing-masing divisi regional merupakan PKP yang berbeda yang otomatis memiliki NPPKP/NPWP yang berbeda pula.¹²⁵ Mengenai PKP ini memiliki dasar hukum dalam UU PPN 1984 baik yang diubah pertama kali (Reformasi Perpajakan Kedua) maupun yang telah diubah kedua kalinya (Reformasi Perpajakan Ketiga).

Untuk dasar hukum bagi PKP ini dalam UU PPN 1984 yang diubah pertama kali oleh Undang-undang No. 11 Tahun 1994 (Reformasi Perpajakan Kedua) adalah Pasal 1 huruf l dan Pasal 1 huruf k.

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sunarno, Senior Manager Treasury dan Perpajakan pada PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY, Gedung Telkom, Jl. Pahlawan No. 10, Semarang, pada Hari Rabu, 23 Mei 2001.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sunarno, Senior Manager Treasury dan Perpajakan pada PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY, Gedung Telkom, lantai VI, Jl. Pahlawan No. 10, Semarang, pada Hari Kamis, 30 Nopember 2000.

Pasal 1 huruf l menyebutkan :

"Pengusaha kena pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud pada huruf k yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan /atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak."

Sedangkan Pasal 1 huruf k :

"Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean."

Untuk dasar hukum bagi PKP ini¹²⁶ dalam UU PPN 1984 yang diubah kedua kali oleh Undang-undang No. 18 Tahun 2000 (Reformasi Perpajakan Ketiga) adalah Pasal 1 ayat 15, Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 1 ayat 13.

Pasal 1 ayat 15 berisi :

"Pengusaha kena pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak."

Selanjutnya Pasal 1 ayat 14 menyatakan :

"Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,

¹²⁶ Lihat pula dalam www.pajak.go.id/FAQ/wajib_NPWP.html#judul,Wajib_Pajak.

mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean."

Yang terakhir, Pasal 1 ayat 13 menyebutkan :

"Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya."

Selain dalam undang-undang di atas, dalam UU KUP 1983 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 dan UU No. 16 Tahun 2000 juga terdapat pasal yang mengatur tentang PKP ini. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 2 ayat 2 UU No. 9 Tahun 1994 dan Pasal 2 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2000.

Pasal 2 ayat 2 UU No. 9 Tahun 1994 menyatakan :

"Setiap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak."

Pasal 2 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2000 menyebutkan :

"Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau

tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak."

Dalam kemitraan dengan Penyelenggara Wartel, penyerahan Jasa Telekomunikasi dilakukan melalui perantaraan Penyelenggara Wartel tersebut. Penyelenggara Wartel yang menyerahkan Jasa Telekomunikasi ini kepada penerima jasa atau konsumen akhir (*end user*). Penerima jasa ini diatur dalam Pasal 1 huruf s UU PPN 1984 sebagaimana diubah oleh UU No. 11 Tahun 1994 dan Pasal 1 ayat 22 UU PPN 1984 sebagaimana diubah oleh UU No. 18 Tahun 2000 seperti disebutkan di bawah ini.

Pasal 1 huruf s UU PPN 1984 sebagaimana diubah oleh UU No. 11

Tahun 1994 :

"Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan atau instansi pemerintah yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut."

Pasal 1 angka 22 UU PPN 1984 sebagaimana diubah oleh UU No.

18 Tahun 2000 :

"Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut."

Penyerahan Jasa Telekomunikasi oleh Wartel ini dilakukan dengan menyediakan :

1. PTUS atau Pesawat Telepon Umum Swalayan yang merupakan pesawat telepon pelanggan yang dirancang secara khusus dan

telah lulus uji dari TELKOM serta bersertifikat. PTUS ini terdiri dari *Central Processing Unit (CPU)*, *Display Monitor*, Pesawat Telepon dan *Printer* yang dapat menampilkan nomor telepon yang dihubungi, lama pembicaraan, jumlah pulsa terpakai dan besaran biaya lain serta jumlah total biaya yang harus dibayar (Pasal 1 huruf g PKS tahun 2000 dan tahun 2001). PTUS ini tersedia di Wartel A dan B.

2. Pesawat *Facsimile*; *Telex* dan lain-lain yang hanya tersedia di Wartel A.

Penggunaan fasilitas diatas oleh penerima jasa adalah merupakan bentuk penerimaan atas penyerahan Jasa Telekomunikasi. Atas penerimaan Jasa Telekomunikasi ini, penerima jasa mendapatkan *print out* dari penyelenggara Wartel. *Print out* ini kemudian kita kenal sebagai faktur pajak sederhana,¹²⁷ dan didalamnya tertera pengenaan PPN 10%.

Selain Faktur Pajak sederhana diatas dalam hal kemitraan antara PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY dengan penyelenggara Wartel juga dikenal Faktur Pajak Standar. Faktur Pajak Standar ini sebenarnya adalah kuitansi pembayaran telepon yang dikenal sebagai L11. Di dalam L11 ini berisi seluruh pemakaian Jasa Telekomunikasi (biaya pulsa) seperti telepon lokal, SLJJ, SLI, *air time*, *facsimile* dan PPN 10%. Hal ini berbeda dengan isi dari Faktur Pajak Sederhana yang berasal dari satu

kali penyerahan Jasa Telekomunikasi. Jadi dalam L11 Wartel ini merupakan total biaya pulsa dan *air time* dari lebih satu kali penyerahan Jasa Telekomunikasi. Tetapi penggunaan L11 Wartel ini hanya sampai tahun 1999. Setelah itu tidak digunakan L11 tetapi yang dikenal dengan WB7210 atau Nota Perhitungan Pendapatan. Untuk WB7210 ini berfungsi sebagai Faktur Pajak Standar.¹²⁸ (Untuk Faktur Pajak Sederhana dan WB7210 sebagai contoh dapat dilihat pada lampiran).

Untuk WB7210 diatas dalam lingkup PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY biasa dikenal sebagai Nota Perhitungan Pendapatan (NPP) yang merupakan L11 bantu.¹²⁹ Isi dari WB7210 ini sama dengan L11 namun ada tambahan perhitungan sharing.

Dalam hubungannya dengan permasalahan, untuk jenis Faktur Pajak Sederhana diatas lebih jelas lagi akan disebutkan beberapa pasal dari dasar hukum yang ada beserta aturan pelaksanaannya.

Pertama, dalam UU PPN 1984 sebagaimana diubah oleh UU No. 11 Tahun 1994, khususnya Pasal 13 ayat 1 dikatakan adanya kewajiban PKP membuat Faktur Pajak setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak dalam Daerah Pabean.

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sunarno Senior Manager Treasury dan Perpajakan pada PT.TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY, Gedung Telkom, lantai V, Jl. Pahlawan No. 10, Semarang, pada Hari Kamis, 30 Nopember 2000.

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Tio Rugun L.T., Billing & Credit Manager Distrik Semarang, Jl. Mpu Tantular, Semarang, pada Hari Jum'at, 8 Juni 2001.

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat 7 UU PPN 1984 sebagaimana diubah oleh UU No. 11 Tahun 1994 menetapkan bahwa Faktur Pajak Sederhana dapat dibuat oleh PKP dengan persyaratan dari Dirjen Pajak. Dalam penjelasan ayat ini dikatakan bahwa Dirjen Pajak dapat menetapkan tanda bukti pembayaran atau tanda bukti penyerahan yang memenuhi syarat menjadi Faktur Pajak Sederhana. Hal ini salah satunya dengan maksud menampung kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir dan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui identitasnya. Selain itu juga disebutkan isi dari Faktur Pajak Sederhana sedikitnya harus memuat :

1. Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengubahan PKP yang menyerahkan BKP atau JKP;
2. Macam, jenis dan kuantum;
3. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah;
4. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.

Sebagaimana pelaksanaan lebih lanjut Pasal 13 ayat 7 diatas adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-05/PJ./1995 tentang Faktur Pajak Sederhana. Salah satu pertimbangan ditetapkannya keputusan ini adalah memperhatikan kebiasaan dalam dunia usaha serta

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak. Sujono, Koordinator Account Wartel pada PT.TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY, Gedung Telkom, lantai VI, Jl. Pahlawan No.

dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dan ketertiban administrasi perlu ditetapkan syarat-syarat pengusaha yang dapat membuat Faktur Pajak Sederhana.

Pasal 1 keputusan ini menyebutkan :

"Pengusaha Kena Pajak yang melakukan :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, atau
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak yang kepada pembeli dan atau penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap, dapat membuat Faktur Pajak Sederhana."

Dalam Pasal 2 disebutkan :

"Faktur Pajak Sederhana sekurang-kurangnya harus memuat :

1. Nama, alamat usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak serta nomor dan tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
2. Macam, jenis dan kuantum;
3. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah;
4. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana."

Dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan :

- "1. Faktur Pajak Sederhana dapat berupa bon kontan, faktur penjualan segi cash register, karcis, kuitansi, yang dipakai sebagai tanda bukti penyerahan atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.
2. Faktur Pajak Standar yang diisi tidak lengkap bukan merupakan Faktur Pajak Sederhana."

Yang terakhir dari keputusan ini adalah Pasal 4 ayat 1 yang perlu pula diketengahkan, bahwa :

"Faktur Pajak Sederhana harus dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau pada saat pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak."

Kemudian yang perlu juga diketahui adalah Pasal 14 ayat 1 UU PPN 1984 sebagaimana diubah oleh UU No. 11 Tahun 1994, yang menyatakan :

"Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak."

Penjelasan ayat ini menambahkan :

"Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Larangan membuat Faktur Pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya."

Kedua, dalam UU PPN 1984 sebagaimana diubah oleh UU No. 18 Tahun 2000 khususnya Pasal 13 ayat 1 menyatakan kewajiban PKP membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak dalam Daerah Pabean. Dalam penjelasan ayat ini ada kewajiban Pengusaha Kena Pajak untuk memungut PPN dan memberikan Faktur Pajak setiap penyerahan BKP dan JKP.

Kemudian selanjutnya dalam Pasal 13 ayat 7 UU PPN 1984 sebagaimana diubah UU No. 18 Tahun 2000 dikatakan mengenai PKP dapat membuat Faktur Pajak Sederhana yang persyaratannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pajak. Di dalam penjelasan ayat ini disebutkan :

"Faktur Pajak Sederhana juga merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran sebagai Faktur Pajak Sederhana yang paling sedikit memuat :

- a. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Jenis dan kuantum;
- c. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah;
- d. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana."

Di dalam PP No. 143 Tahun 2000 sebagai pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001 ini dalam Pasal 15 ayat 2 juga ditetapkan bahwa Faktur Pajak salah satunya dapat berupa Faktur Pajak Sederhana. Direktur Jenderal Pajak kemudian menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-524/PJ./2000 tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana, yang berlaku mulai 1 Januari 2001. Dalam Pasal 1 keputusan ini dikatakan :

"Pengusaha Kena Pajak yang melakukan :

- a. penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, atau
- b. penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli dan atau penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap, dapat membuat Faktur Pajak Sederhana."

Keputusan direktur jenderal diatas diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-425/PJ./2001 tanggal 2 Juli 2001, khususnya pada pasal 1 yang mengganti kata "atau" menjadi "dan".

Untuk lebih jelas lagi perlu disebutkan isi Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat 1.

Dalam Pasal 2 disebutkan :

"Faktur Pajak Sederhana paling sedikit harus memuat :

- a. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Jenis dan kuantum Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan;
- c. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau besarnya pajak Pertambahan Nilai dicantumkan secara terpisah;
- d. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana."

Dalam Pasal 3 disebutkan :

- "(1) Tanda bukti penyerahan atau pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak tersebut di bawah ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperlakukan sebagai Faktur Pajak Sederhana yaitu :
 - a. bon kontan;
 - b. faktur penjualan;
 - c. segi cash register;
 - d. karcis;
 - e. kuitansi, atau
 - f. tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.
- (2) Faktur Pajak Sederhana yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Faktur Pajak yang tidak lengkap.
- (3) Faktur Pajak Standar yang diisi tidak lengkap bukan merupakan Faktur Pajak Sederhana."

Dalam Pasal 4 ayat 1, dikatakan :

"Faktur Pajak Sederhana harus dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak atau pada saat pembayaran, apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak."

Setelah menyinggung banyak hal mengenai Faktur Pajak Sederhana perlu pula diketengahkan tentang beberapa hal lain yang masih ada relevansinya dengan permasalahan sebagaimana dibawah ini.

Dalam hal kemitraan dengan Penyelenggara Wartel A dan B sebenarnya terjadi dua jenis penyerahan Jasa Kena Pajak. Pertama adalah penyerahan Jasa Telekomunikasi oleh TELKOM melalui perantaraan Penyelenggara Wartel A dan B. Kedua adalah penyerahan Jasa Keagenan yang dilakukan oleh Penyelenggara Wartel A dan B sebagai agen kepada TELKOM.

Dengan demikian ada dua jenis pajak (PPN) yang ada di Wartel A dan B, yakni PPN 10% yang dibayar oleh pengguna jasa dan disetor ke kas negara melalui TELKOM. Sedangkan yang kedua PPN Wartel dalam kapasitasnya sebagai Pengusaha Kena Pajak (sesuai edaran Dirjen Pajak Nomor : S.1042/PJ-51/1991 tanggal 2 Agustus 1991), yang pada intinya menyatakan bahwa PPN jasa penyelenggaraan Wartel terhutang sejak ditandatangani Nota Perhitungan Pendapatan (NPP) Wartel dan jasa Keagenan tersebut terhutang PPN 10%.

Untuk PPN 10% yang dibayar oleh pengguna jasa diatas adalah sebagai akibat penyerahan Jasa Telekomunikasi oleh TELKOM melalui perantaraan Penyelenggara Wartel. Sedangkan untuk PPN Wartel atau PPN Jasa Penyelenggaraan Wartel adalah PPN atas penyerahan Jasa Keagenan yang dilakukan Penyelenggara Wartel.¹³⁰

¹³⁰ Media Indonesia, *Pengusaha Wartel Tidak Dikenakan Pajak Ganda*, 7 Nopember 1998, halaman IX.

C.2. Analisa

Dari hasil penelitian diatas dapat diketahui dengan sangat jelas mengenai boleh tidaknya Penyelenggara Wartel A dan B memungut PPN atas penyerahan Jasa Telekomunikasi dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan.

Sebenarnya salah satu yang terpenting bagi pemecahan permasalahan ini adalah pada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY dengan Penyelenggara Wartel A dan B. Kemudian PKS ini perlu untuk dihubungkan dengan beberapa peraturan yang berhubungan dari internal TELKOM baik kantor perusahaan maupun PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY. Selain peraturan internal tersebut, perlu juga dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi baik lama maupun baru. Selain itu pula juga harus dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (PPN dan KUP) dan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Pertama, Mengenai pemecahan permasalahan, lebih dahulu harus dimengerti : siapa diantara PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY dan Penyelenggara Wartel A dan B yang menjadi PKP yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak. Mengenai hal ini bisa dilihat didalam PKS tahun 2000 khususnya konsiderans huruf a dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan Telekomunikasi

yang lama serta data tertulis. Berdasarkan ketiganya, sangat jelas bahwa TELKOM yang menyelenggarakan Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri dan memiliki Hak Eksklusif untuk menyelenggarakan Jasa Telekomunikasi Lokal dan Jasa Telekomunikasi Jarak Jauh. Sedangkan untuk operasional penyelenggaraan jasa dilakukan oleh masing-masing divisi regional (DIVRE) jadi bukan Penyelenggara Wartel A dan B yang menyelenggarakan. Walaupun kemudian monopoli penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri dihapus dalam UU No. 36 Tahun 1999 dan menjadi dasar hukum bagi konsiderans huruf a PKS tahun 2001, monopoli ini masih berlaku. Ini disebabkan karena Pasal 61 ayat 1 UU No. 36 Tahun 1999 masih memberlakukan ketentuan mengenai monopoli tersebut.

Kemudian uraian diatas dapat dihubungkan pula dengan ketentuan dalam UU PPN 1984 baik yang diubah oleh UU No. 11 Tahun 1994 maupun UU No. 18 Tahun 2000. Dalam ketentuan UU PPN 1984 yang telah diubah tersebut diatas nampak bahwa yang dimaksud PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (badan yang dalam lingkup perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha jasa). Masing-masing divisi regional memenuhi ketentuan UU PPN 1984 ini.

Lebih lengkap lagi berdasarkan hasil wawancara dan data tertulis juga diketahui bahwa yang menjadi PKP adalah PT. TELKOM DIVRE IV

Jateng dan DIY yang merupakan salah satu bagian usaha utama TELKOM untuk operasional penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Dengan demikian dari uraian diatas mengenai PKS tahun 2000 (konsiderans huruf a), PKS tahun 2001 (konsiderans huruf a), UU PPN 1984 sebagaimana diubah dua kali dan wawancara serta data tertulis, menunjukkan kesesuaian dengan Pasal 2 ayat 2 UU KUP 1983. UU KUP 1983 yang dimaksud adalah sebagaimana diubah oleh UU No. 9 Tahun 1994 dan UU No. 16 Tahun 2000. Bersesuaian oleh karena PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY yang dikenakan PPN oleh UU PPN 1984 telah dikukuhkan menjadi PKP sebagaimana diatur oleh Pasal 2 ayat 2 UU KUP 1983 tersebut.

Jadi yang menjadi subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif adalah PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY. Oleh karena memenuhi syarat-syarat objektif maka PT. TELKOM DIVRE IV ini merupakan wajib pajak yang memenuhi *tatbestand* yaitu dalam bentuk penyerahan jasa telekomunikasi, sehingga memenuhi syarat sebagai PKP.

Kedua, Kedudukan Penyelenggara Wartel A dan B dalam hubungan kemitraan dengan PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY. Mengenai kedudukan Penyelenggara Wartel A dan B dapat diketahui dari PKS tahun 2000 dan tahun 2001 dan peraturan internal TELKOM juga

data tertulis lainnya. Ada beberapa bagian dari PKS ini yang secara eksplisit menunjukkan kedudukan Penyelenggara Wartel A dan B.

Dalam Pasal 2 ayat 4 Lingkup Kerjasama (PKS tahun 2000) dikatakan bahwa Penyelenggara Wartel bertindak untuk dan atas nama TELKOM. Ketentuan ini diperkuat dengan kewajiban Penyelenggara Wartel untuk menjaga dan meningkatkan citra TELKOM (Pasal 1 huruf a PKS tahun 2000 dan 2001). Terlebih lagi dari data tertulis lain yang didapatkan peneliti menunjukkan bahwa keberadaan Wartel adalah bersifat sebagai perpanjangan tangan pelayanan TELKOM.

Selain itu didalam Nota Dinas Nomor C.Tel.564/YN250/OPSAR-33/2000, khususnya angka 2a menyatakan hubungan antara TELKOM dengan Wartel masih bersifat keagenan. Sifat hubungan ini ditandai dengan Sst. Wartel merupakan Dinas Berbayar dan PPN Keagenan yang ditanggung TELKOM. Dua hal ini juga terdapat dalam PKS tahun 2000 dan tahun 2001, sehingga semakin memperjelas kedudukan dari Penyelenggara Wartel A dan B (sebagai Agen TELKOM).

Ketiga, Kewajiban Penyelenggara Wartel (PKS tahun 2000 dan tahun 2001) untuk memberikan tanda terima / *print out* pembayaran kepada pemakai Jasa Wartel. Ketentuan dalam PKS ini dapat dihubungkan dengan Pasal 12 ayat 1 Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor : KD.25/HK.220/OPSAR-33/1998 tanggal 19 Nopember 1998 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi. Pasal ini memberikan wewenang Penyelenggara Wartel untuk memungut biaya pelayanan jastel kepada pemakai jasa sesuai ketentuan tarif yang berlaku ditambah PPN.

Secara normatif menurut Pasal 13 ayat 7 dari kedua perubahan UU PPN 1984, Faktur Pajak Sederhana dapat dibuat oleh PKP dengan persyaratan dari dirjen pajak. Mengenai hal ini Direktur Jenderal Pajak sendiri menetapkan Keputusan Nomor : KEP-05/PJ./1995 tentang Faktur Pajak Sederhana. Lalu Keputusan Nomor : KEP-524/PJ./2000 tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana (yang diubah dengan keputusan Nomor : KEP-425/PJ./2001), yang berisi antara lain PKP dapat membuat Faktur Pajak Sederhana. Kemudian Pasal 14 ayat 1 UU PPN 1984 sebagaimana diubah UU No. 11 Tahun 1994 menetapkan hanya PKP yang boleh membuat Faktur Pajak, sedangkan yang bukan PKP dilarang membuat Faktur Pajak. Namun secara empiris jelas bahwa Penyelenggara Wartel A dan B memungut PPN dan membuat bukti pungutan berupa *print out*.

Kalau dilihat dari ketiga hal diatas dan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa *print out* tersebut merupakan Faktur Pajak Sederhana yang dibuat oleh Penyelenggara Wartel A dan B sebagai agen PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY. Jadi tidak dibuat untuk dan atas nama penyelenggara Wartel A dan B sendiri. Secara normatif menurut

peraturan perpajakan (PPN) diatas hal ini tidak menjadi masalah karena walaupun Penyelenggara Wartel A dan B bukan PKP dalam hal penyerahan Jasa Telekomunikasi, tetapi merupakan agen PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY yang merupakan PKP. Agen berarti perpanjangan tangan pelayanan dan berarti pula bertindak untuk dan atas nama PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY. Apalagi didalam *print out* tertera logo TELKOM dan nama Penyelenggara Wartel A dan B yang bersangkutan, ini menunjukkan bertindak untuk dan atas nama TELKOM sesuai PKS.

Dengan demikian dari analisa diatas menunjukkan bahwa Penyelenggara Wartel A dan B dibolehkan memungut PPN atas penyerahan Jasa Telekomunikasi dan membuat Faktur Pajak (Faktur Pajak Sederhana) sebagai bukti pemungutan PPN.

**D. PERBEDAAN ANTARA SAAT TERUTANG PAJAK BAGI
PENYERAHAN JASA TELEKOMUNIKASI BERUPA SAMBUNGAN
TELEPON LOKAL, SLJJ, SLI DAN INTERNET (CJY.net) UNTUK
PENYERAHAN SECARA LANGSUNG DENGAN PENYERAHAN
SECARA TIDAK LANGSUNG KEPADA KONSUMEN AKHIR**

D.1. Hasil Penelitian

**D.1.1. Penyerahan Jasa Telekomunikasi berupa Sambungan Telepon
Lokal, SLJJ, SLI dan Internet (CJY.net) untuk Penyerahan
Secara Langsung dan Penyerahan Secara Tidak Langsung
kepada Konsumen Akhir.**

Sebenarnya ada banyak jenis Jasa Telekomunikasi yang merupakan produk dan layanan yang disediakan PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY. Namun dalam hal ini hanya akan disebutkan dan dijelaskan beberapa saja sesuai dengan permasalahan yang ada.

Pertama, Sambungan Telepon Lokal.

Sambungan Telepon Lokal disebut juga Jasa Telekomunikasi Lokal merupakan salah satu jenis Jasa Telekomunikasi Dasar Dalam Negeri yang hak eksklusif penyelenggaraan diberikan pemerintah kepada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.¹³¹ Sambungan Telepon Lokal ini dapat digunakan oleh konsumen akhir dengan menggunakan layanan telepon.

¹³¹ PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., *Prospektus*, *op. cit.*, Jakarta, 23 Oktober 1995, halaman 90 dan 95. Lihat pula dalam <http://www.telkom.co.id>, *PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., to become a leading infocom company in the region.*

Layanan berupa sarana telekomunikasi ini dapat digunakan oleh masyarakat yang terpasang di rumah/gedung. Saat ini layanan telepon tersedia 2 jenis media yakni : dengan kabel dan WLL (*wireless local loop*). Jenis terakhir ini disolusikan untuk melayani area-area yang tidak dilayani oleh media kabel.¹³² WLL atau Telepon Tanpa Kabel merupakan salah satu layanan dari TELKOM untuk mempermudah memperoleh sambungan telepon baru. Telepon Tanpa Kabel adalah telepon biasa yang menggunakan teknologi transmisi radio yang antenanya diarahkan ke lokasi terminal milik TELKOM yang disebut dengan *Cell Station*.¹³³

Kedua, Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ).

SLJJ atau Jasa Telekomunikasi Jarak Jauh merupakan salah satu jenis Jasa Telekomunikasi Dasar Dalam Negeri selain sambungan Telepon Lokal, yang penyelenggaraannya menjadi hak eksklusif PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.¹³⁴ SLJJ ini merupakan fasilitas baku di pesawat telepon untuk berkomunikasi antar kota di Indonesia. Besarnya pemakaian SLJJ berdasarkan lama pemakaian dan jarak yang dituju.¹³⁵

Ketiga, Sambungan Langsung Internasional (SLI).

Fasilitas baku di pesawat telepon untuk berkomunikasi kota di negara lain. Besarnya biaya pemakaian SLI berdasarkan lama pemakaian

¹³² PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY, *Direktori Produk dan Layanan*, Semarang, 1999, halaman 9.

¹³³ PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY, *Telepon Tanpa Kabel*, Semarang, tanpa tahun.

¹³⁴ Lihat dalam PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., *loc. cit.*

¹³⁵ PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY, *Direktori op. cit.*, halaman 11.

dan jarak yang dituju.¹³⁶ SLI ini diselenggarakan oleh INDOSAT dan SATELINDO yang disambungkan melalui jaringan milik TELKOM melalui kerjasama Interkoneksi Internasional.¹³⁷

Keempat, Internet (CJY.net).

Internet adalah sumber daya informasi yang menjangkau seluruh dunia.¹³⁸ Internet merupakan jaringan komputer yang sangat besar, terdiri atas jaringan-jaringan kecil yang terkoneksi yang menjangkau ke seluruh dunia. Bersamaan dengan perkembangan teknologi, Internet telah memberikan dampak sosial. Sepintas, Internet tampak sebagai kelompok jaringan yang kita lihat sehari-hari, tetapi terdiri atas jutaan koneksi.¹³⁹ Disamping itu Internet adalah jaringan (*network*) komputer terbesar di dunia. (Jaringan merupakan istilah yang berarti sekelompok komputer yang dihubungkan bersama sehingga dapat berbagi-pakai informasi dan sumberdaya). Sesuai dengan namanya, Internet bukan jaringan tunggal tetapi lebih merupakan jaringan dari jaringan. Internet mengandung sejumlah standar untuk melewatkan informasi dari satu jaringan ke jaringan lainnya, sehingga jaringan-jaringan di seluruh dunia dapat

¹³⁶ *Ibid*

¹³⁷ Lihat dalam PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., *op. cit.*, halaman 106.

Lihat pula dalam : 1. www.indosat.com, *Product and services*.

2. www.satelindo.co.id, *International Telecommunication Services*.

3. www.club008.com/services/index.html, *Layanan Satelindo 008*.

¹³⁸ Lani Sidharta, *Internet dengan Windows 95 : WSArchie, WSftp, WSFinger, WSPing, mIRC dan Mosaic*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Kompas Gramedia, Jakarta, 1997, halaman XIII.

¹³⁹ Steve Browne, *Internet Lewat Mosaic dan World - Wide Web*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 1995, halaman 1.

berkomunikasi. Internet berawal dari eksperimen Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada akhir tahun 1960-an yang menghubungkan jaringan riset militer. Eksperimen ini terus tumbuh dari tahun ke tahun, dan diperluas dengan menghubungkan jaringan-jaringan pada instansi penelitian dan universitas, dan akhir-akhir ini jaringan komersial juga dihubungkan.¹⁴⁰

Untuk dapat mengakses Internet diperlukan adanya *ISP (Internet Service Provider)* atau Penyedia Layanan Internet. Di Indonesia *ISP* ini diatur didalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM : 114/PT.102/MPPT-97 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet. Dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 ditetapkan :

- "(1) Jasa Internet dapat diselenggarakan oleh :
 - a. Badan Penyelenggara
 - b. Badan lain dengan atau tanpa kerjasama Badan Penyelenggara
- (2) Penyelenggara Jasa Internet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi."

Sebagaimana pernah disebutkan dimuka, bahwa Badan Penyelenggara yang dimaksud diatas adalah salah satunya PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TELKOM). TELKOM ini melalui salah satu divisi yang dimiliki yaitu Divisi Multimedia menjadi Penyelenggara Jasa Internet atau yang dikenal dengan nama TELKOMNET. Layanan yang disediakan oleh

¹⁴⁰ Clay Shirky, *Internet Lewat E-mail*, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 1995, halaman 2.

jaringan TELKOMNET ini kita kenal sebagai TELKOMNET Instan. Khusus di Jateng dan DIY, PT. TELKOM Divisi Regional IV menyediakan produk *Central Java and Yogyakarta Internet (CJY.net)*.¹⁴¹

CJY.net (*sijiwae.net*) merupakan layanan Internet instan yang memberikan kemudahan dan kecepatan untuk akses Internet dan didukung jaringan serat optik digital yang menjangkau hingga ibukota kecamatan.¹⁴² CJY.net diluncurkan sejak 4 Agustus 1999 dan merupakan layanan Internet Publik sebagai penerapan dari konsep Internet Instan hasil kerjasama PT. TELKOM Divisi Regional IV Jateng dan DIY dengan Divisi Multimedia PT. TELKOM.¹⁴³ Yang dimaksud instan adalah semua pelanggan telepon di Jateng dan DIY (pelanggan telepon DIVRE IV) yang mempunyai *modem* dan perangkat *PC (Personal Computer)* dapat langsung terhubung ke Internet (CJY.net) begitu diperlukan tanpa harus terlebih dahulu melakukan registrasi.¹⁴⁴

Keunggulan lain adalah biaya pemakaian CJY.net dihitung per menit bukan per jam.¹⁴⁵ Dan untuk kemudahan para pengguna, sistem tagihan digabung dengan tagihan telepon dalam satu kuitansi tagihan

¹⁴¹ Jawa Pos, *Produk Lokal Akses Global*, 30 Maret 2001, halaman 6.

¹⁴² www.sijiwae.net, *Layanan Sijiwae.Net*, dikelola oleh PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY, Jl. Pahlawan 10, Semarang, Jateng.

¹⁴³ Suara Merdeka, *Info Telkom, Internet Instan dan Murah*, 22 Agustus 1999.
Lihat pula dalam : 1. www.plasa.com/instan/, *Telkomnet Instan*.
2. <http://telkom.net.id/>, *Telkom Multimedia Service*.

¹⁴⁴ Wawasan, *Kontak Telkom, Cara Mengakses CJY.Net*, Kerjasama Telkom - Harian Sore, Wawasan, 24 Agustus 1999, halaman IV.

¹⁴⁵ Suara Merdeka, *Info Telkom "Sijiwae.Net" Internetnya Telkom Jateng dan DIY*, 10 Mei 2000, halaman 14.

telepon (L11), sehingga pelanggan tidak perlu membayar khusus biaya akses Internet (CJY.net).¹⁴⁶ Karena keseluruhan proses baik telepon maupun Internet (CJY.net) hanya dihitung dalam satu kuitansi saja, maka untuk menyesuaikan dengan bahasa di Jateng dan DIY disebut dengan *siji wae* (satu saja-satu kali proses saja).¹⁴⁷ Untuk tarif pelanggan *sijiwae.net* hanya dikenai tarif tetap Rp. 150,- / menit, dimanapun menggunakannya selama masih berada di Jateng dan DIY.¹⁴⁸

Bila dirumah sudah ada sambungan telepon dan satu unit komputer serta *modem*¹⁴⁹, berarti sudah bisa langsung (*instan*) terkoneksi ke jaringan Internet. Caranya sangat mudah, yaitu tinggal melakukan *setting* pada *PC* untuk melakukan dial ke nomor akses : 0809 8 9999, lalu memasukkan login : *telkomnet@instan* dan *password* : *telkom*. Maka langsung dapat menjelajah dunia Internet saat itu juga. Bagi pelanggan yang menggunakan sistem selain *windows*, mungkin perlu menambahkan setting DNS server : 202.134.0.155 (*primary*) dan 202.134.2.5 (*secondary*).¹⁵⁰ Perlu diingat bahwa *hardware* yang mesti dimiliki pengakses CJY-net *PC* dengan prosesor minimal *Pentium*. Itupun yang memiliki *Random Access Memory (RAM)* minimal 16 Mega Bites (MB),

¹⁴⁶ Wawasan, *Kontak Telkom, CJY.Net, Internetnya Telkom Jateng dan DIY ?*, Kerjasama Telkom-Harian Sore Wawasan, 19 April 2000, halaman IV.

¹⁴⁷ Kedaulatan Rakyat, *CJY.Net, Internetnya Telkom Jateng dan DIY*, 17 April 2000, halaman X..

¹⁴⁸ *www.sijiwae.net*, *loc. cit.*

¹⁴⁹ Suara Merdeka, *Pilihan Provider Makin Banyak, Berlomba Menjual "Kue" Internet*, 19 Agustus 1999, halaman VII.

¹⁵⁰ Jawa Pos, *loc. cit.*

modem berkecepatan minimal 14,4 *bites per second (bps)*, dan tentu saja *line* telepon. Sedangkan *software* yang wajib dimiliki adalah *Operating System (OS) windows 3.1, windows 95* atau di atasnya, *Browser Internet Explorer (IE)* atau *Netscape Navigator*.¹⁵¹

Sebenarnya penyerahan Jasa Telekomunikasi berhubungan erat dengan Pasang Baru Telepon (PSB). Untuk Sambungan Telepon Lokal, SLJJ dan SLI merupakan satu kesatuan untuk sekali permintaan PSB. Untuk penyerahan Jasa Telekomunikasi secara langsung kepada konsumen akhir yaitu khususnya untuk ketiga jenis jasa ini harus melalui Prosedur Pasang Baru Telepon di bawah ini :¹⁵²

1. Tahap Pelayanan PSB

Pada tahap ini merupakan pendaftaran / aplikasi, pelanggan mengajukan permintaan PSB dan tahap ini berlangsung hingga terbitnya Surat Perintah Kerja (SPK). Setiap calon pelanggan Telepon yang berminat mengajukan Pasang Baru Telepon di wilayah Divisi Regional IV Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dapat dilayani melalui beberapa saluran pelayanan yaitu :¹⁵³

¹⁵¹ Jateng Pos, *Bagaimana Menginstall CJY.Net dari PC ?, Cukup Modem, PC Pentium RAM 16 MB dan Telepon*, 3 September 1999, halaman XV.

¹⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Budiyanto Supervisor Bagian Kebijakan Prosedur untuk Penjualan dan Pelayanan Pelanggan pada PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY, Gedung Telkom, lantai VI, Jalan Pahlawan No. 10, Semarang, pada hari Senin, 30 April 2001.

¹⁵³ PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY, *Persyaratan dan Prosedur Pasang Baru Telepon*, Semarang, April 1999.

- **YANTEL (Pelayanan Telekomunikasi)**

Untuk keperluan Pasang Baru Telepon, calon pelanggan Telkom dapat mendatangi YANTEL (Pelayanan Telekomunikasi) terdekat. Dan apabila sambungan telepon tersedia dan secara teknis dapat dilayani pada lokasi yang diinginkan, maka calon pelanggan dapat segera mengisi serta menandatangani form Tel. 2B/Tel.2R (Tel.2RF) di atas materai Rp. 6.000,- dan menyerahkan persyaratan yang ditetapkan.

- **IN BOUND TELEMARTETING (162)**

Bagi calon pelanggan yang berminat mendaftar Pasang Baru Telepon tetapi tidak dapat datang ke YANTEL, dipersilakan menghubungi nomor telepon 162. Petugas pelayanan 162 akan menjelaskan segala sesuatunya yang berkaitan dengan permohonan pasang baru telepon, berlangganan FITUR, TELKOM MEMO atau produk/jasa Telkom lainnya. Selanjutnya petugas pelayanan 162 akan mengirimkan Form Tel.2R (Tel.2RF) melalui Pos kepada calon pelanggan yang bersangkutan. Pelanggan setelah menerima Form Tel.2R, (Tel.2RF) segera memeriksa/mencocokkan data yang tertera serta menandatangani di atas materai Rp. 6.000,- sekaligus melampirkan persyaratan yang ditetapkan untuk kemudian mengirimkannya kembali ke Telkom melalui Pos bebas biaya kirim. Disamping melayani Pasang Baru Telepon, 162 juga melayani

permohonan berlangganan FITUR, TELKOM MEMO dan informasi umum tentang produk/jasa Telkom lainnya.

- **OUT BOUND TELEMARKETING**

Unit pelayanan Telkom yang bertugas menawarkan tambahan sambungan telepon baru dengan menghubungi pelanggan potensial lewat telepon. Apabila pelanggan berminat untuk menambah saluran baru, petugas *Out Bound Telemarketing* Telkom akan mengirimkan Form Tel.2R (Tel.2RF) melalui Pos ke alamat yang bersangkutan. Pelanggan setelah menerima Form Tel.2R, (Tel.2RF) segera memeriksa/mencocokkan data yang tertera serta menandatangani di atas materai Rp. 6.000,- sekaligus melampirkan persyaratan yang ditetapkan untuk kemudian mengirimkannya kembali ke Telkom melalui Pos bebas biaya kirim. *Out Bound Telemarketing* Telkom disamping menawarkan penambahan sambungan baru Telepon, juga menawarkan Pemasangan FITUR, TELKOM MEMO dan produk jasa Telkom lainnya.

- **PELAYANAN KELILING (PK)**

Unit pelayanan Telkom yang bertugas menawarkan sambungan telepon dengan cara mengunjungi lokasi/alamat calon pelanggan potensial. Calon pelanggan yang berminat untuk pasang baru telepon dapat segera mengisi Form Tel.2B/Tel.2R (Tel.2RF) yang diperoleh dari petugas PK, serta melengkapi persyaratan yang

ditetapkan. Setelah Form diisi lengkap serta menandatangani di atas materai Rp.6.000,- calon pelanggan dapat langsung menyerahkannya kembali kepada petugas PK yang bersangkutan.

- **ACCOUNT MANAGER (AM)**

Unit pelayanan Telkom yang bertugas menawarkan sambungan telepon dengan cara mengunjungi lokasi/alamat pelanggan khusus seperti perusahaan besar (*Big Customer*). Pelanggan yang berminat untuk pasang baru telepon dapat segera mengisi Form Tel.2B/ Tel.2R (Tel.2RF) yang diperoleh dari petugas AM, serta melengkapi persyaratan yang ditetapkan. Setelah Form diisi lengkap serta menandatangani di atas materai Rp.6.000,- calon pelanggan dapat langsung menyerahkannya kembali kepada petugas AM yang bersangkutan.

Kemudian Pembayaran biaya pasang telepon baru dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

- a. Pola angsuran akan ditagihkan bersama kuitansi penagihan telepon bulan pertama setelah telepon berfungsi.
- b. Pembayaran secara tunai dapat dilakukan pada Bank yang ditunjuk, atau dibayarkan langsung kepada petugas Telkom yang dibuktikan dengan Kuitansi Pembayaran (Tel.69).

Telkom tidak membenarkan transaksi pembayaran biaya sambungan telepon kepada petugas Telkom diluar Kantor Telkom / Yantel.

2. Tahap Instalasi dan Pengetesan PSB Akses JarKab (Jaringan Kabel).

Pada tahap ini petugas teknik menerima SPK¹⁵⁴ dan melaksanakan instalasi sampai dengan test pengekringan.

3. Tahap Penyelesaian Administrasi Akhir PSB.

Pada tahap ini terjadi *entry* data pelanggan untuk munculnya *Billing* (sampai dengan *kring/welcome call*). Jadi pada saat *kring* berarti telepon sudah bisa operasi dan nantinya akan tercatat dalam L11 pelanggan pada *Billing and Credit*.

(Untuk contoh L11 dapat dilihat pada lampiran).

Khusus untuk penyerahan secara langsung jenis Jasa Telekomunikasi berupa Internet (CJY.net) tidak diperlukan persyaratan dan Prosedur Pasang Baru Telepon, apabila pelanggan telah memiliki sambungan telepon. Jadi tinggal melakukan langkah-langkah seperti telah disebutkan di muka. Kecuali belum menjadi pelanggan telepon tentu harus melewati Prosedur Pengajuan Pasang Baru Telepon biasa lebih dulu. Keduanya akan tercatat dalam pelanggan Telepon biasa.

Untuk penyerahan secara tidak langsung khususnya jenis Jasa Telekomunikasi berupa Internet (CJY.net) bisa dilakukan dengan pendirian Warung Internet (Warnet). Prosedur Pengajuan PSB Warnet

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Iswandi Pimpinan YANTEL 2, Gedung Telkom, Jalan Pahlawan No. 10, Semarang, pada hari Jumat, 27 April 2001.

hampir sama dengan PSB telepon biasa tanpa PKS seperti Wartel¹⁵⁵ yaitu harus melalui 3 tahapan seperti disebutkan di muka. Jadi mulai dari tahap pelayanan PSB, Tahap Instalasi dan Pengetesan PSB Akses Jarkab dan yang terakhir Tahap Penyelesaian Administrasi Akhir PSB (sampai dengan kring/welcome call). Hanya khusus untuk tahap pertama yaitu Tahap Pelayanan PSB (pendaftaran/aplikasi) berbeda. Perbedaan ini tampak pada syarat Pendirian Warnet yang antara lain :

1. Perusahaan berbadan hukum, Koperasi atau Lembaga Pendidikan;
2. Mengisi formulir dan diserahkan ke YANTEL terdekat.¹⁵⁶

Untuk persyaratan pertama, perorangan tidak masuk didalamnya, hal ini berbeda dengan PSB Telepon biasa. Kecuali apabila perorangan yang telah menjadi pelanggan Internet (CJY.net) ingin mendirikan Warnet tanpa seijin PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY.¹⁵⁷ Perlu diketahui bahwa jika di lokasi yang diminta masih tersedia jaringan, terbuka kesempatan untuk diijinkan membuka Warnet tersebut.¹⁵⁸

Keuntungan yang diperoleh jika mendirikan Warnet dengan seijin TELKOM, adalah status sambungan telepon yang dipergunakan adalah "dinas berbayar" yaitu bebas biaya pasang baru dan bebas abonemen

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Arif, Spesialis Jasa Utama pada PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY, Gedung Telkom, Jalan Pahlawan No. 10 Semarang, pada hari Jumat, 27 April 2001.

¹⁵⁶ PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY, *WARNET, Warung Internet, Tempat Pelayanan Jasa Akses Internet Dial up untuk Umum*, Semarang, Agustus 2000.

¹⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Arif, Spesialis Jasa Utama pada PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY, Gedung Telkom, Jalan Pahlawan No. 10, Semarang, pada hari Jumat, 27 April 2001.

¹⁵⁸ Radar Semarang, *Dialog Telkom, Ingin Buka Warnet, Bagaimana Syaratnya*, 26 Oktober 2000, halaman II.

bulanan.¹⁵⁹ *Line* tersedia hanya untuk *outgoing* (hubungan keluar saja) karena fasilitas *incoming* (hubungan masuk) akan di-*block*.¹⁶⁰ Ini dimaksudkan untuk melindungi pemanfaatan oleh pihak lain yang dapat merugikan pengusaha Warnet tersebut. Harga akses Internet dapat ditentukan sendiri oleh pengelola Warnet. TELKOM tidak menuntut apapun kecuali hanya menagihkan sejumlah pulsa yang diproduksi oleh sambungan telepon tersebut secara penuh (sesuai dengan tagihan telepon yang tertera di kuitansi tagihan telepon/L11) tanpa adanya *sharing* sebagaimana Wartel.¹⁶¹ Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, konsumen akhir yang mengakses Internet di Warnet ada yang mendapat *print out* setelah mengakses ada yang tidak. Jadi tergantung pada Warnet masing-masing. Selain itu biaya akses ada yang dihitung per jam atau per menit, tetapi yang jelas tidak dikenai PPN. Hal ini tentu berbeda sekali dengan penyerahan Jasa Telekomunikasi pada Wartel yang membebankan atau mengenakan PPN kepada konsumen akhir.

Untuk penyerahan secara tidak langsung bagi jenis Jasa Telekomunikasi berupa Sambungan Telepon Lokal, SLJJ dan SLI dapat dilakukan kemitraan dengan Penyelenggara Wartel. Untuk pendirian Wartel ini sebenarnya juga sama dengan Prosedur Pasang Baru Telepon

¹⁵⁹ Suara Merdeka, *Info Telkom, Persyaratan Buka Warung Internet*, 26 Oktober 2000, halaman XIV.

¹⁶⁰ Solo Pos, *Hallo Telkom, Warnet, Usaha yang Menjanjikan ?*, 27 Oktober 2000, halaman III.

¹⁶¹ Kedaulatan Rakyat, *Halo....Halo.....,Ingin Buka Warnet*, 30 Oktober 2000, halaman V.

biasa, khususnya untuk tahap ke-2 dan ke-3.¹⁶² Namun dalam hubungannya dengan permasalahan hanya akan disinggung untuk tahap ke-3 saja. Pada tahap ke-3 yaitu Tahap Penyelesaian Administrasi Akhir PSB (sampai dengan kring / *welcome call*) ini PKS disiapkan lebih dulu sebelum kring karena persyaratan dipenuhi. Setelah itu baru kring dan langsung tercatat di *Billing and Credit* (dalam L11 seperti pelanggan biasa). Sesudah kring ini dilanjutkan dengan penandatanganan PKS. Setelah kring sebenarnya Wartel telah dapat beroperasi bila ada konsumen akhir yang datang ingin menggunakan fasilitas yang tersedia.¹⁶³ Jadi setelah kring Wartel sudah dapat menjalankan usahanya melakukan penyerahan jasa keagenan dan memberikan Faktur Pajak Sederhana atau *print out* setelah konsumen akhir selesai menggunakan fasilitas PTUS Wartel. Dulu sebelum tahun 1999 saat kring di Wartel berarti tercatat dalam L11 seperti pelanggan biasa. Tetapi setelah ada keluhan dari penyelenggara Wartel yang ingin tahu rincian *sharing*, PT. Telkom DIVRE IV Jateng dan DIY mengganti L11 ini dengan WB7210.¹⁶⁴

Perlu diketahui, untuk penyerahan secara langsung atau tidak langsung keempat jenis Jasa Telekomunikasi diatas dapat dilakukan setiap saat melalui PSB setiap jam kerja dari saluran pelayanan yang ada.

¹⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Budiyo, Supervisor Bagian Kebijakan Prosedur untuk Penjualan dan Pelayanan Pelanggan pada PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY, Gedung Telkom, lantai VI, Jl. Pahlawan No. 10 Semarang, pada hari Senin, 30 April 2001.

¹⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin Tanjung, Staf Wartel Divisi pada PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY, Gedung Telkom, Jalan Pahlawan No. 10, lantai VI, Semarang, pada hari Jum'at, 8 Juni 2001.

¹⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin Tanjung, Staf Wartel Divisi pada PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY, Gedung Telkom, lantai VI, Jalan Pahlawan No. 10, Semarang, pada hari Jum'at, 22 Juni 2001.

D.1.2. Saat Terutang Pajak Bagi Penyerahan Jasa Telekomunikasi

Untuk Saat Terutang Pajak bagi penyerahan Jasa Telekomunikasi ini dapat kita lihat dalam UU PPN 1984 baik yang telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994 maupun UU No. 18 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya.

Pertama, Untuk UU PPN 1984 sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, mengenai Saat Terutang Pajak bagi Penyerahan Jasa Telekomunikasi dapat dilihat dalam Pasal 11 ayat 1 yang menyatakan :

"Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak atau pada saat impor Barang Kena Pajak atau pada saat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan."

Penjelasan Pasal 11 ayat 1 ini antara lain menjelaskan :

"Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak atau pada saat impor Barang Kena Pajak, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya."

Dalam peraturan pelaksanaan yaitu PP No. 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, khususnya Pasal 33 ayat 4 dikatakan :

"Terutangnya pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya."

Penjelasan Pasal 33 ayat 4 ini menyatakan antara lain :

"Atas penyerahan Jasa Kena Pajak selain pemborong bangunan, terutangnya pajak terjadi pada saat :

- a. tersedianya barang atau fasilitas untuk dipakai, baik sebagian atau seluruhnya; atau
- b. dilakukan penagihan pembangunan atau penggantian; atau
- c. pembayaran, apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan."

Kedua, Untuk UU PPN 1984 sebagaimana diubah dengan UU No.

18 Tahun 2000, khususnya Pasal 11 ayat 1 huruf c :

"Terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak."

Kemudian dalam PP No. 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18

Tahun 2000, khususnya Pasal 13 ayat 4 dikatakan :

"Terutangnya pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan, untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya."

Penjelasan Pasal 13 ayat 4 ini menambahkan :

"Atas penyerahan Jasa Kena Pajak selain pemborong bangunan terutangnya pajak terjadi pada saat :

- a. tersedianya barang atau fasilitas untuk dipakai, baik sebagian atau seluruhnya; atau
- b. dilakukan penagihan pembangunan atau penggantian; atau
- c. pembayaran, apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan."

Mengenai Saat Terutang Pajak ini tidak dapat dilepaskan dari keberadaan PKP dan juga Penerima Jasa. Hal ini disebabkan karena Saat Terutang ini bisa terjadi sebagai akibat dari penyerahan Jasa Kena Pajak (Jasa Telekomunikasi) oleh PKP yang diterima oleh Penerima Jasa. Selain itu berhubungan erat pula dengan Faktur Pajak yang merupakan bukti pungutan atas penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut.

Untuk lebih lengkapnya Penerima Jasa dan Faktur Pajak ini perlu disebutkan pengertiannya di dalam UU PPN 1984 baik yang telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994 maupun UU No. 18 Tahun 2000.

Penerima jasa dalam pasal 1 huruf s UU PPN 1984 sebagaimana diubah UU No. 11 Tahun 1994 adalah :

"Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan atau instansi pemerintah yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut."

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 22 UU PPN 1984 sebagaimana diubah UU No. 18 Tahun 2000 dikatakan :

"Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut."

Kemudian seperti yang sudah disinggung diatas, mengenai Faktur Pajak dapat diketahui pengertiannya dalam UU PPN 1984 sebagaimana diubah oleh UU No. 11 Tahun 1994 dan UU No. 18 Tahun 2000.

Dalam UU PPN 1984 sebagaimana diubah oleh UU No. 11 Tahun 1994 yaitu Pasal 1 huruf t dikatakan :

"Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena impor Barang Kena Pajak."

Dalam UU PPN 1984 sebagaimana diubah oleh UU No. 18 Tahun 2000 yaitu Pasal 1 angka 23 dikatakan :

"Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai."¹⁶⁵

Mengenai Faktur Pajak diatas tentu tidak dapat dilepaskan dari kewajiban PKP untuk membuat Faktur Pajak setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 UU PPN 1984 baik yang diubah pertama kali maupun kedua kalinya.

Kemudian tidak dapat dilepaskan pula dari ketentuan mengenai Faktur Pajak Sederhana, mengingat hal ini berhubungan erat dengan Saat Terutang Pajak bagi penyerahan Jasa Telekomunikasi melalui penyelenggara Wartel A dan B.

Mengenai Faktur pajak sederhana ini dalam UU PPN sebagaimana diubah UU No. 11 Tahun 1994 khususnya pasal 13 ayat 7, pada intinya mengatur bahwa untuk menampung kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak secara langsung kepada konsumen akhir atau penerima jasa yang

tidak diketahui identitasnya direktur jenderal pajak dapat menentukan tanda bukti penyerahan atau pembayaran yang memenuhi persyaratan menjadi Faktur Pajak Sederhana. Di dalam ketentuan UU PPN 1984 sebagaimana diubah dengan UU No. 18 Tahun 2000 khususnya pasal 13 ayat 7 juga mengatur hal yang sama mengenai Faktur Pajak Sederhana sebagai bukti pemungutan untuk penyerahan secara langsung kepada konsumen akhir. Faktur Pajak Sederhana ini diberikan kepada konsumen akhir setelah menggunakan fasilitas atau kemudahan yang tersedia di Wartel. Faktur Pajak Sederhana dibuat dalam bentuk *print out*, kemudian konsumen akhir melakukan pembayaran sesuai yang tertera didalamnya.

D.2. Analisa

Secara normatif sangat jelas bahwa Saat Terutang Pajak ditentukan oleh saat penyerahan Jasa Kena Pajak, jadi pada saat *tatbestand* khususnya perbuatan penyerahan dilakukan. Selain dalam tingkatan undang-undang, peraturan pemerintah juga memberikan pengertian bahwa untuk Jasa Kena Pajak itu Saat Terutang Pajak adalah saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.

Dari ketentuan normatif baik UU PPN 1984 sebagaimana diubah pertama kali dan kedua kali beserta peraturan pemerintah yang menjadi

¹⁶⁵ Lihat pula dalam www.pajak.go.id/FAQ/fakturpjk.html#judul, *Faktur Pajak*.

peraturan pelaksanaannya yang mengatur Saat Terutang Pajak diatas, perlu untuk dihubungkan dengan kenyataan di lapangan.

Secara empiris untuk penyerahan secara langsung ketiga jenis Jasa Telekomunikasi seperti Sambungan Telepon Lokal, SLJJ dan SLI memiliki Saat Terutang Pajak yang sama. Hal ini dapat dilihat dari saat kring setelah seluruh tahapan Prosedur Pasang Baru Telepon selesai dilaksanakan. Saat kring adalah saat pesawat telepon (baik di rumah atau gedung perkantoran) mulai dapat digunakan oleh konsumen akhir untuk ketiga jenis Jasa Telekomunikasi ini. Pada saat itu berarti PT. TELKOM Divre IV Jateng dan DIY sebagai PKP telah melakukan penyerahan Jasa Telekomunikasi kepada konsumen akhir sebagai penerima jasa. Dikatakan demikian karena menurut pendapat peneliti kata penyerahan dalam UU PPN 1984 sebagaimana diubah pertama kali dan kedua kali menunjukkan suatu kenyataan bahwa PKP melakukan perbuatan penyerahan (*tatbestand*) yang nyata. Perbuatan penyerahan yang nyata tersebut dalam hal ini berupa menyediakan pesawat telepon yang sudah dapat digunakan (sudah kring). Menyediakan pesawat telepon yang sudah kring berarti menyediakan fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya (sesuai dengan Pasal 33 ayat 4 PP No. 50 Tahun 1994 dan Pasal 13 ayat 4 PP No. 143 Tahun 2000). Menurut peneliti sebagian berarti hanya digunakannya salah satu

atau dua dari ketiga jenis Jasa Telekomunikasi di atas. Seluruhnya berarti, digunakannya ketiga Jenis Telekomunikasi tersebut.

Selain itu, dengan saat kring sebagai saat dimulai tercatatnya dalam L11 pelanggan oleh bagian *Billing and Credit* menunjukkan pula telah terjadi penyerahan. Dikatakan demikian karena seperti yang kita ketahui L11 pelanggan adalah Faktur Pajak Standar yang merupakan bukti pungutan pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak. Dan dalam UU PPN 1984 baik yang diubah pertama kali atau kedua kali yaitu dalam Pasal 13 ayat 1 terdapat kewajiban PKP membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak. Ini berarti tidak ada penyerahan tanpa bukti pungutan pajak berupa Faktur Pajak, sehingga dibuatnya Faktur Pajak menunjukkan adanya perbuatan penyerahan.

Untuk Saat Terutang Pajak bagi penyerahan secara langsung jenis Jasa Telekomunikasi berupa Internet (CJY.net) pada dasarnya sama dengan penyerahan secara langsung Sambungan Telepon Lokal, SLJJ dan SLI. Dikatakan sama oleh karena pelanggan yang telah berlangganan telepon bila memakai atau mengakses internet (CJY.net) akan tercatat pemakaian pulsanya pada L11 telepon.

Untuk Saat Terutang Pajak bagi penyerahan secara tidak langsung jenis Jasa Telekomunikasi Internet (CJY.net) melalui Warnet juga dimulai saat kring setelah tahap ketiga selesai dilaksanakan. Saat kring ini juga saat mulai terjadi penyerahan Jasa Telekomunikasi karena fasilitas atau

kemudahan *line* telepon untuk Internet (CJY.net) telah tersedia dan dapat dipakai secara nyata (dan tercatat di L11 sebagai bukti pemungutan PPN).

Menurut peneliti walaupun di Warnet tidak ada pengaksesan Internet (CJY.net) sama sekali oleh pemakai jasa (konsumen akhir), penyerahan Jasa Telekomunikasi tetap terjadi. Terjadi dalam bentuk PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY (PKP) menyediakan fasilitas atau kemudahan untuk Warnet yang dapat dioperasikan (kring). Jadi Saat Terutang Pajak tetap terjadi pada saat penyediaan fasilitas atau kemudahan bagi Warnet yang sudah kring tetap berlangsung, bukan pada saat penerima jasa (konsumen akhir) yang datang ke Warnet mengakses Internet (CJY.net). Apalagi pengelola Warnet mendapat tagihan L11 yang merupakan bukti pungutan pajak atas penyerahan Jasa Telekomunikasi yang tetap berlangsung dalam satu bulan, yang menunjukkan Saat Terutang Pajak tetap terjadi dalam satu bulan itu. Disamping itu konsumen akhir yang mengakses di Warnet tidak dipungut PPN sama sekali.

Untuk penyerahan secara tidak langsung Jasa Telekomunikasi berupa Sambungan Telepon Lokal, SLJJ dan SLI pada dasarnya Saat Terutang Pajak sama dengan penyerahan secara langsung kepada konsumen akhir. Jadi setelah tahap ketiga PSB telah selesai berarti Pesawat Telepon Umum Swalayan (PTUS) pada Wartel A dan B telah tersedia untuk dipakai secara nyata baik sebagian atau seluruhnya.

Berarti saat itu telah terjadi penyerahan Jasa Telekomunikasi yang sekaligus merupakan Saat Terutang Pajak dan saat mulainya pencatatan pada L11 Wartel A dan B oleh *Billing and Credit*. Peneliti berpendapat bahwa walaupun belum ada konsumen akhir (penerima jasa) yang menggunakan fasilitas atau kemudahan PTUS, penyerahan Jasa Telekomunikasi tetap ada. Hal ini terjadi karena tanpa penggunaan fasilitas atau kemudahan PTUS oleh konsumen akhir, pencatatan dalam L11 atau WB7210 tetap berlangsung. Apalagi secara normatif jelas bahwa Saat Terutang Pajak tidak ditentukan saat penyerahan kepada konsumen akhir tetapi ditentukan oleh saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya. Meskipun Faktur Pajak Sederhana (*print out*) dibuat setelah pemakai jasa (konsumen akhir) menggunakan fasilitas atau kemudahan itu yang membuktikan telah ada penyerahan Jasa Telekomunikasi secara tidak langsung kepada konsumen akhir, tetapi tidak menentukan Saat Terutang Pajak.

Dengan demikian Saat Terutang Pajak untuk keempat jenis jasa Telekomunikasi diatas baik penyerahan langsung atau tidak langsung kepada konsumen akhir didasarkan pada Prinsip Dasar Akrua (*Accrual Basis*). Dalam prinsip ini Saat Terutang Pajak ditentukan oleh saat penyerahan Jasa Kena Pajak (*Tatbestand*) dan tidak dikaitkan dengan pembayaran.

Peneliti memiliki pandangan bahwa Prinsip Dasar AkruaI yang menentukan Saat Terutang Pajak di atas tidak dapat dilepaskan dari Ajaran Material. Karena ajaran ini berpegang pada pemenuhan *tatbestand* untuk menentukan timbulnya hutang pajak, sedangkan saat timbulnya hutang pajak adalah Saat Terutang Pajak. Dengan demikian faktor objektif berupa *tatbestand* memegang peranan penting bagi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (sebagai pajak objektif), khususnya bagi penentuan Saat Terutang Pajak. Selain itu saat kring yang merupakan saat dimulainya pencatatan dalam L11 dan WB 7210 di atas menunjukkan saat pengadministrasian hutang pajak. L11 dan WB 7210 ini menunjukkan adanya pajak keluaran dan keduanya merupakan Faktur Pajak Keluaran (Faktur Pajak Standar), sekaligus sebagai bukti pemungutan pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak (*tatbestand*).

Dengan demikian dari analisa diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan Saat Terutang Pajak bagi penyerahan Jasa Telekomunikasi berupa Sambungan Telepon Lokal, SLJJ, SLI dan Internet (CJY.net). Tidak terdapat perbedaan baik untuk penyerahan secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen akhir.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari hasil penelitian dan analisa dapat disimpulkan bahwa Penyelenggara Wartel A dan B dibolehkan untuk memungut PPN atas penyerahan Jasa Telekomunikasi dan membuat Faktur Pajak yaitu Faktur Pajak Sederhana. Hal ini disebabkan karena dalam memungut PPN dan membuat Faktur Pajak Sederhana, Penyelenggara Wartel A dan B tidak bertindak untuk dan atas nama sendiri. Penyelenggara Wartel A dan B bertindak untuk dan atas nama PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY atau dikenal sebagai Agen TELKOM sehingga merupakan perpanjangan tangan layanan PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY. Oleh karena merupakan Agen TELKOM maka tindakan Penyelenggara Wartel A dan B di atas tidak bertentangan dengan UU PPN 1984 baik yang sudah diubah oleh UU No. 11 Tahun 1994 maupun UU No. 18 Tahun 2000. Walaupun dalam UU PPN 1984 tersebut hanya PKP yang diperbolehkan memungut PPN atas penyerahan Jasa Telekomunikasi dan membuat Faktur Pajak. Sedangkan yang memenuhi syarat sebagai PKP adalah PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY bukan Penyelenggara Wartel A dan B.

2. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa bisa diambil suatu kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan Saat Terutang Pajak bagi penyerahan Jasa Telekomunikasi berupa Sambungan Telepon Lokal, SLJJ, SLI dan Internet (CJY.net). Tidak terdapatnya perbedaan Saat Terutang Pajak bagi keempat jenis Jasa Telekomunikasi di atas adalah baik untuk penyerahan secara langsung maupun penyerahan secara tidak langsung kepada konsumen akhir. Hal ini disebabkan karena Saat Terutang Pajak dalam hal ini secara empiris/sosiologis ditentukan oleh saat kring yang merupakan saat dimulainya pencatatan dalam L11 atau WB7210. Saat kring ini secara normatif merupakan saat penyerahan Jasa Kena Pajak atau saat tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata yang sekaligus merupakan Saat Terutang Pajak. Sedangkan L11 dan WB7210 adalah Faktur Pajak Standar sebagai bukti pemungutan pajak. Adanya Faktur Pajak Standar yang dibuat menunjukkan telah terjadi penyerahan Jasa Kena Pajak (*tatbestand*) yang saat penyerahannya merupakan Saat Terutang Pajak.

B. SARAN

1. Dalam hubungannya dengan permasalahan yang pertama peneliti dapat memberikan sumbangan berupa saran sebagaimana berikut ini. Secara teoritis hendaknya perlu dibuat suatu kajian khusus

mengenai penyelenggaraan Wartel A dan B ini, mengingat penyelenggaraan Wartel A dan B ini merupakan suatu kenyataan empiris/sosiologis yang berbeda dengan ketentuan normatif dalam UU PPN 1984. Dikatakan berbeda karena secara normatif menurut UU PPN 1984 tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai agen dari PKP yang dapat bertindak untuk dan atas nama PKP untuk melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak, memungut PPN dan membuat Faktur Pajak. Kajian yang dimaksud dapat dilakukan secara mendalam baik secara empiris/sosiologis maupun normatif untuk pengembangan Hukum Pajak. Secara praktis, untuk PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY peneliti memberikan saran perlunya ketelitian dan kecermatan untuk masalah pengadministrasian perpajakan (PPN) Penyelenggaraan Wartel A dan B. Mengingat jumlah Wartel A dan B yang besar akan mempengaruhi jumlah WB7210, jumlah total setoran dan perhitungan diskon. Selain itu untuk pembuat undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya perlu untuk menyusun suatu ketentuan khusus yang mengatur masalah perpajakan penyelenggaraan Wartel A dan B. Walaupun mungkin tidak dimasukkan dalam undang-undang, tetapi bisa dibuat keputusan menteri keuangan atau keputusan direktur jenderal pajak yang khusus mengatur hal ini secara lengkap untuk memberikan

kepastian hukum. Mengingat hingga saat ini hanya diatur secara tidak lengkap di dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1042/PJ.51/1991 tentang Perlakuan PPN sebagai Pajak Masukan dalam usaha Jasa Telekomunikasi.

2. Dalam hubungannya dengan permasalahan yang kedua peneliti dapat memberikan sumbangan berupa saran sebagaimana berikut ini. Secara teoritis, peneliti menyarankan perlunya kajian khusus mengenai Saat Terutang Pajak baik, penyerahan Jasa Telekomunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Kajian tersebut dapat dilakukan dari segi normatif maupun dari segi empiris/sosiologis untuk pengembangan Hukum Pajak. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi yang mempengaruhi perkembangan bidang usaha Jasa Telekomunikasi. Secara praktis, peneliti menyarankan perlunya ditetapkan keputusan menteri keuangan dan keputusan direktur-jenderal pajak yang mengatur secara spesifik tentang Saat Terutang Pajak bagi penyerahan Jasa Telekomunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Makalah

- Aini, Hamdan, Perpajakan, Jakarta : Bumi Aksara, 1993.
- Ali, Chidir, Hukum Pajak Elementer, Bandung : PT. Eresco, 1993.
- Ardiyanto, Suwito, Dasar-Dasar Kepajakan Negara, Jakarta : CV. Nur Cahaya, 1981.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1995.
- _____, Manajemen Penelitian, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1995.
- Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996.
- Asikin, Agustini; Noorjaya, Tika dan Himawati, Yulia, Pajak, Citra dan Bebannya. Pokok-Pokok Pemikiran Salamun A.T., Jakarta : PT. Bina Rineka Pariwara, 1990.
- Boediono, B., Uraian Dasar Pajak Pertambahan Nilai, Jakarta : PT. Gramedia, 1986.
- Bohari, H., Pengantar Hukum Pajak, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1993.
- Brotodihardjo, R. Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung : PT. Eresco, 1995.
- Browne, Steve, Internet Lewat Mosaic dan World-Wide Web, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 1995.
- Faisal, Sanapiah, Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi, Malang : YA3, 1990.
- G., Sartan, Perpajakan, Pengantar Hukum Pajak Positif di Indonesia, Semarang : Djambatan, 1980.
- Gilarso, T., Ekonomi Indonesia, Sebuah Pengantar I, Yogyakarta : Kanisius, 1985.

- Hadisoeparto, Hartono, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi 4, Yogyakarta : Liberty, 1996.
- Haris, Nasrudin, Telekomunikasi Indonesia. Sejarah, Perkembangan dan Proyeksi ke Depan, Bandung : Diterbitkan atas kerjasama PT. TELKOM dan Yayasan Ikatan Alumni Lemhanas (IKAL), 1997.
- Hay, Marhainis Abdul, Dasar-Dasar Hukum Pajak, Jakarta : Badan Penerbit - Unit Penerbitan Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, 1984.
- Huseini, Martani, Mencermati Misteri Globalisasi : Menata-Ulang Strategi Pemasaran Internasional Indonesia Melalui Pendekatan Resourced-Based, Bagian Pertama dari dua tulisan, Jakarta : Usahawan No. 01 Th. XXIX, Januari 2000.
- Ibrahim, Saadudin dan K., Pranoto, Pajak Pertambahan Nilai, Suatu Peralihan dari Pajak Penjualan, Jakarta : Jaya Persada, 1984.
- Judisseno, Rimsky K., Perpajakan, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- _____, Pajak dan Strategi Bisnis. Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penetapan Akuntansi di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Juwana, Hikmahanto, Eksklusivitas vs Persaingan dalam UU Telekomunikasi, Jakarta : Dot Net Edisi 2, 25 Juli - 7 Agustus 2000.
- K.H., Ramadhan; Sriwibawa, Sugiarta dan Yusra, Abrar, Dari Monopoli Menuju Kompetisi. 50 Tahun Telekomunikasi Indonesia, Sejarah dan Kiat Manajemen Telkom, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1989.
- Kuntjorojakti, Hero Utomo, Kumpulan Esai-Esai Terpilih Ekonomi-Politik Internasional di Asia Pasifik, Penyunting Haris Munandar, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1995.
- Lasmana, Eko, Sistem Perpajakan di Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta : Prima Campus Grafika, 1994.
- Makarim, Edmon, dan Sofyan, M., Isu Merger Telkom dan Indosat dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, dot.net edisi 1, 11-24 Juli 2000.

Mardiasmo, Optimalisasi Peran Akuntan Dalam Peningkatan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak, Makalah yang disampaikan dalam Simposium Nasional Mahasiswa Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, tanggal 6 September 1994, dalam Mardiasmo, Perpajakan, Edisi 3, Yogyakarta : Andi Offset, 1995.

_____, Strategi Implementasi Sistem Perpajakan Tahun 1994 Dalam Rangka Menyaring Wajib Pajak, Makalah yang disampaikan dalam Lokakarya Perpajakan Sehari, Pusat Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta, tanggal 22 April 1995, dalam Mardiasmo, Perpajakan, Edisi 3, Yogyakarta : Andi Offset, 1995.

_____, Seluk Beluk Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 dan Implikasinya Terhadap Dunia Usaha di Indonesia, Makalah yang disampaikan dalam Lokakarya Perpajakan Sehari, Pusat Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta, tanggal 22 April 1995, dalam Mardiasmo, Perpajakan, Edisi 3, Yogyakarta : Andi Offset, 1995.

_____, Dampak UU PPN 1984 Terhadap Keputusan Manajemen dan Aspek Administrasi dan Akuntansi, Makalah yang dimuat dalam Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Edisi Nopember, STIE YKPN, Yogyakarta, 1991, dalam Mardiasmo, Perpajakan, Edisi 3, Yogyakarta : Andi Offset, 1995.

_____, Tinjauan Kritis Terhadap Sistem Perpajakan Nasional dan Faktor Pendorong Timbulnya Kejahatan Restitusi Pajak, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Hukum Pajak, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo, tanggal 22 Januari 1994, dalam Mardiasmo, Perpajakan, Edisi 3, Yogyakarta : Andi Offset, 1995.

Miyasto, Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Global, Pidato Pengukuhan diucapkan pada Peresmian Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 6 Desember 1997, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1997.

Misdiyono, Legiman; Waskito, Budi dan Pardede, Tommy, Telkom di Tengah Era Reformasi, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000.

- Muladi, Aspek Hukum Globalisasi, Jurnal Bisnis Strategi, Program Magister Manajemen UNDIP, Vol. 2 Tahun I/1998.
- Munawir, H.S., Perpajakan, Yogyakarta : Liberty, 1997.
- Muqodim, Perpajakan, Buku 2, Edisi ke-2 (Revisi), Yogyakarta : UII Press, 1999.
- Meliala, Tulis S., Perpajakan Dalam Teori dan Praktek, Bandung : CV. Yrama Widya Dharma, 1991.
- Pandiangan, Liberty, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993.
- Rahardjo, Satjipto, Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global. Makalah disampaikan pada pertemuan Dosen Pengajar Sosiologi Hukum se-Jawa Tengah dan DIY. Diselenggarakan oleh UMS, Surakarta, 5 - 6 Agustus 1996.
- Sambodo, Agus, Kewajiban Perpajakan Bagi Badan Usaha dan Orang Pribadi. Tinjauan Dari Sisi Wajib Pajak (dilengkapi dengan perlakuan akuntansi), Edisi Pertama, Yogyakarta : BPFE, 1999.
- Shirky, Clay, Internet Lewat E-mail, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 1995.
- Sidharta, Lani, Internet dengan Windows 95 : WSArchie, WSFtp, WSFinger, WSPing, mlRC dan Mosaic, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 1997.
- Sukardji, Untung, Pajak Pertambahan Nilai, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1999.
- Suandy, Erly, Hukum Pajak, Jakarta : Salemba Empat, 2000.
- Surantono, Bambang dan P.S., Muljadi, Pengetahuan Praktis Perpajakan, Yogyakarta : Liberty, 1993.
- Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1997.
- Surakmad, Winarto, Pengantar Penelitian Ilmiah. Dasar. Metode dan Teknik, Bandung : Tarsito, 1990.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Press, 1984.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : CV. Rajawali, 1990.

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.

_____, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.

Soemitro, Rochmat, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Bandung : PT. Eresco, 1965.

_____, Pajak dan Pembangunan, Cetakan ke-2, Bandung : PT. Eresco, 1982.

_____, Asas dan Dasar Perpajakan I, Bandung : PT. Eresco, 1986.

_____, Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi, Bandung : PT. Eresco, 1990.

Tjahjono, Achmad dan Husein, Muhammad Fakhri, Perpajakan, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1997.

Toruan, Sophar, Ensiklopedi Perpajakan Indonesia, Jakarta : Penerbit Erlangga, 1996.

Usman, B. dan Subroto, K., Pajak-Pajak Indonesia, Jakarta : Yayasan Bina Pajak, 1980.

W., Donny Kertaputra, Perbandingan Hukum Telekomunikasi, Telkom's Legal News, 4/1, Edisi Oktober - Desember 1999.

Waluyo dan Ilyas, Wirawan B., Perpajakan Indonesia. Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan, Seri Kepustakaan Lengkap, Jakarta : Salemba Empat, 2000.

_____, Perpajakan Indonesia. Penyesuaian dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Baru Tahun 2001, Jakarta : Salemba Empat, 2000.

Wahyutomo, Imam, Pajak, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1994.

Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, 1991.

B. Artikel, Laporan Tahunan dan lain-lain

Bernas, Telkomenjawab, Bisnis Warnet, Bagaimana ?, 30 Oktober 2000.

Jawa Pos, Dialog Telkom, Jangan Percaya kepada Biro Pengurusan Wartel, 1 Juni 2000.

_____, Produk Lokal Akses Global, 30 Maret 2001.

Jateng Pos, Bagaimana Menginstall CJY-net dari PC ?, Cukup Modem, PC Pentium RAM 16 MB, dan Telepon, 3 September 1999.

Kedaulatan Rakyat, CJY-net, Internetnya Telkom Jateng & DIY, 17 April 2000.

_____, Halo Halo Ingin Buka Warnet, 30 Oktober 2000.

Media Indonesia, Monopoli Telkom-Indosat Usai, SLJJ dan Lokal Berakhir 2002, SLI 2003, 2 Agustus 2000.

_____, Pengusaha Wartel tidak dikenakan Pajak Ganda, 7 Nopember 1998.

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Strategi Baru Dalam Era Baru, Laporan Tahunan 1998, Bandung, tanpa tahun.

_____, Laporan Tahunan 1999, Bandung, 1999, tanpa tahun.

_____, Album Pembangunan Telekomunikasi, Bandung : diterbitkan kerjasama dengan Yayasan Karya Adiguna, 1997.

_____, Prospektus, Jakarta, 23 Oktober 1995.

PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY, Laporan Tahunan 1999 - 2000, Semarang, 1999.

_____, Direktori Produk dan Layanan, Semarang, tanpa tahun.

- _____, Telepon Tanpa Kabel, Semarang, tanpa tahun.
- _____, Persyaratan dan Prosedur Pasang Baru Telepon, Semarang, April 1999.
- _____, WARNET, Warung Internet, Tempat Pelayanan Jasa Akses Internet Dial-up untuk Umum, Semarang, Agustus 2000.
- Radar Semarang, Dialog Telkom, Ingin Buka Warnet, Bagaimana Syaratnya, 26 Oktober 2000.
- Suara Karya, Wartel Boleh Tentukan Tarif Sendiri, 25 Agustus 2000.
- _____, Telkom Akan Luncurkan Pola Waralaba Wartel, 25 Agustus 2000.
- _____, KSO Divre IV Meraih Hasil Maksimal Melalui Kebersamaan, 26 Januari 2001.
- Suara Merdeka, Pilihan Provider Makin Banyak, Berlomba Menjual "kue" Internet, 19 Agustus 1999.
- _____, Info Telkom, Internet Instan dan Murah, 22 Agustus 1999.
- _____, Info Telkom, "Sijiwae.Net", Internetnya Telkom Jateng / DIY, 10 Mei 2000.
- _____, Wartel dan Bisnis Masa Depan Telkom, 29 Agustus 2000.
- _____, Info Telkom, Persyaratan Buka Warung Internet, 26 Oktober 2000.
- Telkom's Legal News, Telaah Kritis RUU Telekomunikasi (Bagian1) : RUU Telekomunikasi dan Eksklusivitas Telkom, volume 1, Edisi Januari 1999, Bandung : Legal Department of PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., 1999.
- Wawasan, Kontak Telkom, Cara Mengakses CJY.Net, kerjasama TELKOM - Harian WAWASAN, 24 Agustus 1999.
- _____, Kontak Telkom CJY-Net, Internetnya Telkom Jateng dan DIY ?, Kerjasama TELKOM - Harian Sore Wawasan, 19 April 2000.

C. Media Internet

www.club008.com/services/index.html, Layanan Satelindo 008.

www.indosat.com, Product and Services.

www.kompas.com/business/news/0008/01/11.htm, Hak Eksklusivitas TELKOM dan INDOSAT dipercepat.

www.pajak.go.id/FAQ/fakturpjk.html#judul, Faktur Pajak.

www.pajak.go.id/FAQ/wajib_NPWP.html#judul, Wajib Pajak.

www.plasa.com/instan/, Telkomnet Instan.

www.satelindo.co.id, International Telecommunication Services.

www.sijiwae.net, Layanan Sijiwae.Net, dikelola oleh PT. TELKOM DIVRE IV Jateng dan DIY, Jl. Pahlawan 10, Semarang, Jateng.

<http://www.telkom.co.id>, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., to become a leading infocom company in the region.

<http://telkom.net.id/>, Telkom Multimedia Service.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan, Jakarta : CV. Eko Jaya, 1994.

Undang-undang No. 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan, Jakarta : CV. Eko Jaya, 1994.

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1994, dalam Untung Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.05/PJ/1995 tentang Faktur Pajak Sederhana, Himpunan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 1994, 1995 dan 1996, Drs. Amin Widjaja Tunggal, Ak., MBA., Jakarta : Harvarindo, 1996.

Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2000.

Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2000.

Peraturan Pemerintah No. 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000, [www.pajak.go.id/UU/PP-143 Th 2000.htm](http://www.pajak.go.id/UU/PP-143%20Th%202000.htm).

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.524/PJ/2000 tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana, www.pajak.go.id/UU/OOKEP-PJ.-524.htm.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.425/PJ/2001 tanggal 2 Juli 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP.524/PJ/2000 tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana, Warta Perundang-undangan No. 207/Th.XXI, Kamis, 12 Juli 2001.

Undang-undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, Kumpulan Peraturan : Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, Keputusan Dirjen, tentang Telekomunikasi, Buku II, Edisi Desember 1994, Direktorat Pelayanan Bangsisyan, Telkom.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1993 tentang Telekomunikasi, Kumpulan Peraturan : Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri,

Keputusan Dirjen. tentang Telekomunikasi, Buku II, Edisi Desember 1994, Direktorat Pelayanan Bangsisan, Telkom.

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.6/PT.102/MPPT-95 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar Internasional, tanggal 1 Maret 1995, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pos dan Telekomunikasi Tahun 1995, Bagian Hukum dan Organisasi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Jalan Merdeka Barat No. 16 -19 Jakarta 10110.

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.60/PT.102/MPPT-95 tentang Penegasan Hak Eksklusif kepada Badan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri tanggal 14 Agustus 1995, seri Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 1995 (Bagian II), Penyusun : Tim Redaksi Wikrama Waskitha, Penerbit : PT. Wikrama Waskitha, Jakarta : Indonesia, Cetakan Pertama, 1996.

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM 114/PT.102/MPPT-97 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet, Warta Perundang-undangan Nomor : 1705/TH.XX, Kamis, 1 Januari 2001.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 54 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi, tanggal 2 September 1998, Warta Perundang-undangan Nomor : 1805/TH.XXI, Kamis 17 Desember 1998.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 78 Tahun 1998 tentang Pembagian Pendapatan / Komisi atas Penyelenggaraan Jasa Warung Telekomunikasi, tanggal 3 Desember 1998, Komite KSO Wilayah Jawa Tengah, Sekretariat : Gedung Deppar postel, Lt. 6, Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110.

Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, www.detik.com/net/gudangdata/UU 36-99/index.shtml.

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, www.mastel.or.id/indonesia/index.html.

Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor : KD.25/HK.220/OPSAR-33/1998 tanggal 19 Nopember 1998 tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi, PT. Telekomunikasi

Indonesia, Tbk., Kantor Perusahaan, Jl. Japati No. 1 Telp. 62-22-4521510, Fax. 62-22-440313 Bandung 40133 - Indonesia.

Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Nomor : KD.38/YN.230/OPSAR-30/1999 tanggal 15 Desember 1999 tentang Pembagian Pendapatan/Komisi atas Penyelenggaraan Wartel, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Kantor Perusahaan, Jl. Japati No. 1 Telp. 62-22-4521510, Fax. 62-22-440313 Bandung 40133 - Indonesia.

Nota Dinas Nomor : C.TEL.459/YN.230/OPSAR-33/1999 tanggal 15 Desember 1999 Perihal Kebijakan Pembagian Pendapatan / Komisi atas Penyelenggaraan Wartel, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Kantor Perusahaan, Jl. Japati No. 1 Telp. 82-22-4521510, Fax. 62-22-440313 Bandung 40133 - Indonesia.

Nota Dinas Nomor : C.TEL.564/YN.250/OPSAR-33/2000 tanggal 24 Juli 2000 perihal Pelayanan Incoming Call di Wartel, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Kantor Perusahaan, Jl. Japati No. 1 Telp. 62-22-4521510, Fax. 62-22-440313 Bandung 40133 - Indonesia.

Nota Dinas Nomor : C.TEL/KU710/KUG-33/2000 Oktober 2000 perihal Pedoman Pengangkuntansian Pengkreditan PPN Jasa Telekomunikasi, PT. Telekomunikasi, Tbk., Kantor Perusahaan, Jl. Japati No. 1 Telp. 62-22-4521510, Fax. 62-22-440313 Bandung 40133 - Indonesia.

Nota Dinas Nomor : Tel.1082/YN.000/RE4-00/1998 tanggal 15 September 1998 perihal Penyelenggaraan Wartel, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Kantor Unit KSO Divre IV Jl. Pahlawan 10 Telp. 024-8303000, Fax. 024-449980 Semarang 50241 Indonesia.

Keputusan General Manager Unit KSO Divisi Regional IV Nomor : 12/YN180/RE4-00/2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Diskon atas Penyelenggaraan Wartel, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Kantor Unit KSO Divre IV Jl. Pahlawan 10 Telp. 024-8303000, Fax. 024-449980 Semarang 50241 Indonesia.

Perjanjian Kerjasama antara PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. dengan.....tahun 2000,PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Divisi Regional IV Jateng dan DIY.

Perjanjian Kerjasama antara PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.
dengan.....tahun 2001,PT. Telekomunikasi
Indonesia, Tbk. Divisi Regional IV Jateng dan DIY.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, Seri
Pendidikan Nasional, Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan
Nasional 1993 - 1994, Jakarta : CV. Eko Jaya, 1994.